

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019



Drs. H. Imron, M.Ag
Bupati Cirebon



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Sumber

Telp. (0231) 321197-321792 Fax. (0231) 321025

Website : <http://cirebonkab.go.id>

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah patut kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon memuat informasi kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019.

Laporan Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon pada Tahun 2019.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Cirebon ini disusun, agar dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

Sumber, Maret 2020

BUPATI CIREBON,



EXECUTIVE SUMMARY

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Cirebon, sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Indikator Kinerja Utama ini juga merupakan target capaian kinerja yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, telah menetapkan Program dan Kegiatan serta anggaran yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Mengacu pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 39 Tahun 2016, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

- Misi I terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 9 indikator kinerja :
 - Capaian indikator sasaran, sebanyak 4 indikator sasaran atau 66,67 % kategori baik sekali (melampaui target), 1 indikator sasaran atau 16,67% kategori baik (mencapai target), 1 indikator sasaran atau 16,67% kategori cukup (tidak mencapai target) dan 3 indikator sasaran kewenangan pindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- Misi II memiliki 1 tujuan 5 sasaran dan 25 indikator kinerja:
 - Capaian indikator sasaran, sebanyak 15 indikator sasaran atau 65,22% kategori baik sekali (mencapai target), 3 indikator sasaran atau 13,04% kategori baik

(mencapai target) dan 2 indikator sasaran atau 8,70% kategori cukup (tidak mencapai target), 3 indikator sasaran atau 8,70% kategori kurang (tidak mencapai target) dan 2 indikator sasaran kewenangan pindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

- Misi III terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 17 indikator kinerja :

- Capaian indikator sasaran, sebanyak 9 indikator sasaran atau 52,94% kategori baik sekali (melampaui target), 2 indikator sasaran atau 11,76% kategori baik (mencapai target), 6 indikator sasaran atau 35,29% kategori kurang (tidak mencapai target).

- Misi IV terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 3 indikator kinerja :

- Capaian indikator sasaran, sebanyak 2 indikator sasaran atau 66,67% kategori baik sekali (melampaui target) dan 1 indikator sasaran atau 33,33% kategori baik (mencapai target).

- Misi V terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 10 indikator kinerja :

- Capaian indikator sasaran, sebanyak 5 indikator sasaran atau 50% kategori baik sekali (melampaui target), 4 indikator sasaran atau 40% kategori baik dan (mencapai target) dan 1 indikator sasaran atau 10% katagori cukup (tidak mencapai target).

- Misi VI terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 9 indikator kinerja :

- Capaian indikator sasaran, sebanyak 5 indikator sasaran atau 55.56% kategori baik sekali (melampaui target), 3 indikator sasaran atau 33.33% kategori baik dan (mencapai target) dan 1 indikator sasaran atau 11.11% katagori cukup (tidak mencapai target).

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 15 sasaran yang mencakup 73 indikator sasaran, diketahui bahwa 40 indikator sasaran atau 54,79% Baik Sekali, 14 indikator sasaran atau 19,18% Baik, 5 indikator sasaran atau 6,85% Cukup, 9 indikator sasaran atau 12,33% kurang dan 5 indikator sasaran kewenangannya pindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai **136,73%** atau bermakna **Baik Sekali**. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 **Baik Sekali**.

Anggaran yang digunakan dalam mencapai keberhasilan tersebut sebesar Rp. 4.362.142.773.034,73 dari pagu anggaran Rp. 3.998.103.430.861,86, sehingga terdapat efisiensi anggaran Rp. 364.039.342.172,87.

Keberhasilan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat terwujud berkat dukungan dan sinergitas semua elemen masyarakat Kabupaten Cirebon, yang akan terus dipelihara dan akan lebih ditingkatkan guna mencapai sasaran kinerja yang lebih baik.

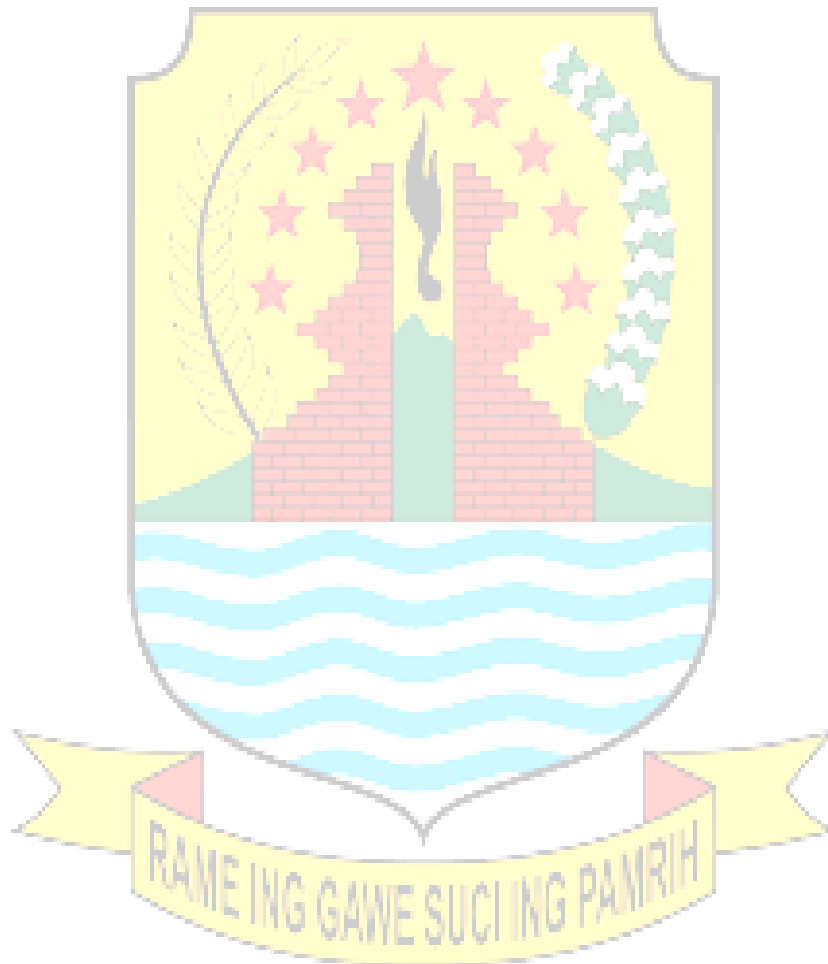


DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	I-1
B. Maksud dan Tujuan	I-3
C. Dasar Hukum.....	I-3
D. Gambaran Umum Daerah	I-5
E. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh	I-23
F. Isu Strategis Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2018.....	I-24
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis	II-1
B. Indikator Kinerja Utama	II-5
C. Rencana Kerja Tahunan	II-9
D. Perjanjian Kinerja 2018	II-10
E. Rencana Aksi Daerah	II-17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Akuntabilitas Kinerja.....	III-2
1. Pengukuran Kinerja.....	III-2
2. Perbandingan Capaian Kinerja Sampai dengan Akhir Periode RPJMD	III-38
B. Akuntabilitas Keuangan	III-45
BAB IV KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	IV-1
B. Rencana Tindak Lanjut	IV-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Adminitrasi Kabupaten Cirebon..... I.6



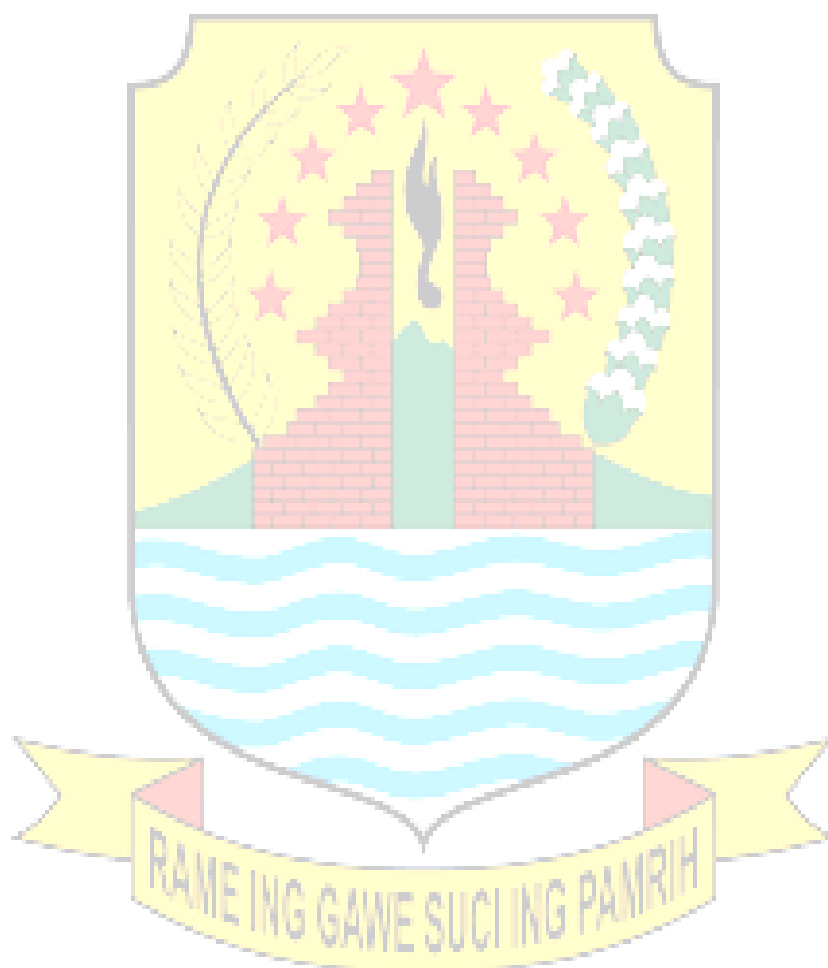
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Cirebon	I.7
Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon.....	I.9
Tabel 1.3. Kepadatan Penduduk Kabupaten Cirebon	I.11
Tabel 1.4. Penduduk Kabupaten Cirebon Menurut Struktur Usia Tahun 2019.....	I.12
Tabel 1.5. Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Cirebon Tahun 2013-2019.....	I.14
Tabel 1.6. PDRB Kabupaten Cirebon Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019.....	I.15
Tabel 1.7. PDRB Kabupaten Cirebon Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2019.....	I.16
Tabel 1.8. SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon	I.17
Tabel 1.9. Kecamatan di Kabupaten Cirebon	I.18
Tabel 1.10. Kelurahan di Kabupaten Cirebon	I.20
Tabel 1.11. Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin	I.21
Tabel 1.12. Jumlah ASN Berdasarkan Ruang Golongan	I.21
Tabel 1.13. Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan.....	I.22
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran	II.3
Tabel 2.2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.....	II.4
Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama Pemkab Cirebon	II.6
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja 2019 Pemkab Cirebon	II.11
Tabel 3.1. Katagori Capaian Kinerja	III.3
Tabel 3.2. Pencapaian Indikator Sasaran/IKU	III.4
Tabel 3.3. Target dan Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Aktifitas Kehidupan Beragama, Keshalehan Sosial Masyarakat dan Toleransi antar dan Intern Umat Beragama	III.6
Tabel 3.4. Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Pendidikan Untuk Semua	III.9

Tabel 3.5. Target dan Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	III.13
Tabel 3.6. Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya, Berketerampilan dan Berjiwa Kewirausahaan	III.15
Tabel 3.7. Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Kabupaten Cirebon Sebagai Daerah Wisata Berbasis Budaya.....	III.18
Tabel 3.8. Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Kemandirian Peningkatan Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga	III.19
Tabel 3.9. Target dan Capaian Indikator Sasaran Peningkatan Konektifitas Antar Wilayah	III.20
Tabel 3.10. Taget dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Pembangunan Prasarana Wilayah yang Memadai	III.22
Tabel 3.11. Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Cirebon yang Bersih, Asri dan Lestari.....	III.25
Tabel 3.12. Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat	III.27
Tabel 3.13. Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kondisi Perekonomian Masyarakat	III.28
Tabel 3.14. Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang lebih Berkualitas	III.30
Tabel 3.15. Target dan Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima.....	III.33
Tabel 3.16. Target dan Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah	III.34
Tabel 3.17. Target dan Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih	III.35
Tabel 3.18. Anggaran Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2019..	III.46
Tabel 3.19. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019..	III.46
Tabel 3.20. Target dan Realisasi PAD Tahun 2019.....	III.47
Tabel 3.21. Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2019...	III.47

Tabel 3.22. Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah
 Tahun 2019 III.48

Tabel 3.23. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019.... III.49



1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Daerah merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan gambaran akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah kepada publik. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun dokumen Laporan Kinerja. Secara operasional, penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja pemerintah.

Dokumen Laporan Kinerja daerah memiliki peran strategis dalam mekanisme pelaporan kinerja instansi pemerintah daerah. Dokumen ini menjadi bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, dokumen ini menjadi bahan evaluasi pencapaian kinerja. Di era transparansi dan tuntutan publik terhadap kinerja instansi pemerintah, keberadaan dokumen Laporan Kinerja menjadi bagian dari kerangka pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan demikian, hal yang terpenting dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah mekanisme pengukuran kinerja, evaluasi, dan pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Di era desentralisasi saat ini, pemerintah daerah mendapatkan ruang kewenangan untuk mengelola berbagai sumber daya yang tersedia.

Dalam bingkai sistem pemerintahan nasional, Pemerintah Kabupaten Cirebon mendapatkan mandat untuk menyelenggarakan berbagai kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Merujuk pada berbagai regulasi diatas, Pemerintah Kabupaten Cirebon harus mampu mempertanggungjawabkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan kongkuren yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar meliputi urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan sosial dan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sedangkan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 18 urusan serta 8 urusan pilihan pemerintahan kepada publik sebagaimana dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas eksternal dan internal sesuai dengan dinamika pembangunan dan tuntutan masyarakat. Berbekal berbagai target kinerja sebagaimana telah diformulasikan dalam indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah, Pemerintah Kabupaten Cirebon bertekad untuk menyampaikan informasi capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan kepada publik secara baik.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 ini Pemerintah Kabupaten Cirebon akan memberikan gambaran dan menjelaskan secara utuh dan komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Cirebon dimaksudkan untuk menjadi instrumen evaluasi dan umpan balik perbaikan terhadap berbagai capaian kinerja.

2. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Cirebon bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat atas kinerja terukur yang telah dan seharusnya dicapai, dan menyediakan media tolok ukur capaian kinerja dalam upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Cirebon, yaitu:

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya;
- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Ketentuan Teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara reviu atas kinerja Pemerintah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lemtekda) Kabupaten Cirebon;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
- n. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 – 2019;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 8 Seri A.); dan

- p. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 67 Seri A.).

D. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Fisik

Secara geografis, wilayah Kabupaten Cirebon berada pada posisi 108°19'30"-108°50'03" Bujur Timur (BT) dan 6°30'58"- 7°00'24" Lintang Selatan (LS).

Secara administratif, Kabupaten Cirebon memiliki wilayah seluas 990,36 km² yang meliputi 40 kecamatan, terbagi menjadi 412 desa dan 12 kelurahan, 2.700 Rukun Warga (RW), dan 9.377 Rukun Tetangga (RT). Adapun batas-batas administratif Kabupaten Cirebon adalah:

1. Sebelah Utara : Kab. Indramayu, Kota Cirebon dan Laut Jawa
2. Sebelah Selatan: Kabupaten Kuningan
3. Sebelah Barat : Kabupaten Majalengka
4. Sebelah Timur : Kota Cirebon dan Kabupaten Brebes
(Provinsi Jawa Tengah)

Secara geo-ekonomi, Kabupaten Cirebon memiliki posisi yang strategis (*geo-strategic*) dengan mencermati hal-hal sebagai berikut.

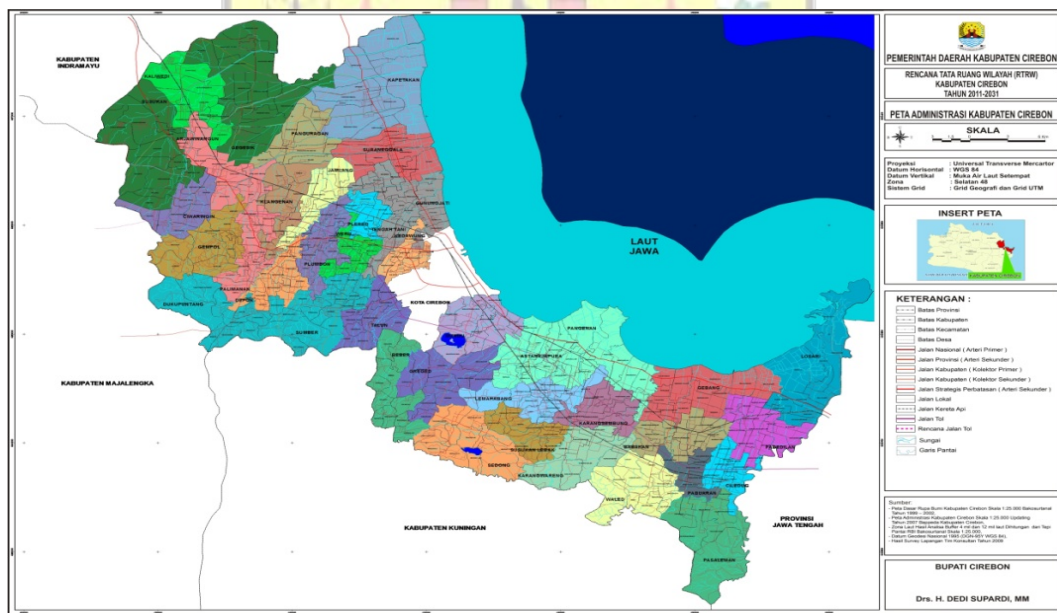
- a) Kabupaten Cirebon berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah sehingga menjadi pintu gerbang masuk ke Provinsi Jawa Barat. Hal ini merupakan potensi bagi pengembangan Kabupaten Cirebon untuk menarik investor ke wilayah ini;
- b) Kabupaten Cirebon berada di pantai Utara Jawa yang merupakan jalur utama distribusi barang dan jasa, dan mobilisasi orang tingkat regional dan nasional;
- c) Kabupaten Cirebon memiliki akses jalur transportasi utama wilayah Pantai Utara Jawa yaitu ruas jalan bebas hambatan (jalan tol) (ruas jalan tol Palimanan-Kanci/Palikanci, dan ruas jalan tol Kanci-Pejagan). Selain itu, Kabupaten Cirebon dilalui

oleh jalur kereta api yakni jalur kereta api Cirebon-Jakarta, jalur kereta api Cirebon-Bandung, jalur kereta api lintas Utara Jawa (Cirebon-Semarang-Surabaya), dan jalur kereta api lintas Selatan Jawa (Cirebon-Yogyakarta-Surabaya);

- d) Kabupaten Cirebon menjadi lokasi sumber energi jalur transmisi Sumatera-Jawa-Bali yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Electric Power (CEP) di Kecamatan Astanajapura;
- e) Kabupaten Cirebon menjadi bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) wilayah Cirebon sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Gambar 1.1.

Peta Administrasi Kabupaten Cirebon



Secara topografis, wilayah Kabupaten Cirebon memiliki ketinggian antara 0-130 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah kecamatan yang terletak sepanjang jalur Pantura termasuk pada dataran rendah yang memiliki ketinggian antara 0-10 mdpl meliputi 10 kecamatan yaitu Kecamatan Kapetakan, Suranenggala, Gunungjati, Mundu, Astanajapura, Pangenan, Gebang, Losari, dan Pabedilan. Sementara, 30 kecamatan lainnya berada pada ketinggian antara 11-30 mdpl. Adapun pembagian wilayah berdasarkan ketinggian dibedakan sebagai berikut :

- 1) Wilayah berketinggian antara 0-25 mdpl seluas 64.636 Ha atau 65,31% dari luas Kabupaten Cirebon;
- 2) Wilayah berketinggian antara 25-50 mdpl seluas 1.525,20 Ha atau 10,65% dari luas Kabupaten Cirebon;
- 3) Wilayah berketinggian antara 50-100 mdpl seluas 10.196,40 Ha atau 10,30% dari luas Kabupaten Cirebon;
- 4) Wilayah berketinggian antara 100-200 mdpl seluas 61.150 Ha atau 6,21% dari luas Kabupaten Cirebon;
- 5) Wilayah berketinggian antara 200-300 mdpl seluas 4.275,55 Ha atau 4,32% dari luas Kabupaten Cirebon;
- 6) Wilayah berketinggian 300 mdpl seluas 2.180,20 Ha atau 2,20% dari luas Kabupaten Cirebon;

Berdasarkan konturnya, Kabupaten Cirebon memiliki kemiringan antara 0-40%. Untuk lebih jelasnya, tingkat kemiringan wilayah dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1.

Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Cirebon

No	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	0 – 8 %	88.075, 71	88,93
2	>8 – 15 %	2.598, 48	2,62
3	>15 – 25 %	5.152, 05	5,2
4	>25 – 40 %	1.853, 52	1,87
5	>40 %	1356, 24	1,37
Jumlah		99.036	100

Sumber: Cirebon Dalam Angka, Tahun 2019

Secara geologis, wilayah Kabupaten Cirebon memiliki delapan jenis struktur tanah, yaitu Aluvial (Qa) seluas 52.224 ha (52,76%), hasil gunung api muda yang tak terurai (Qyu) seluas 33.740 ha (34,10%), breksi kompleks Kromong (Qvk) seluas 1.110 ha (1,12%), batu gamping kompleks Kromong (MI) seluas 202,60 ha, formasi Kaliwungu (Pk) seluas 8.964,20 ha (9,06%), formasi Cijulang (Tpel) seluas 825 ha (0,83%), formasi Kalibiuk (Tpb) seluas 1.345 ha (1,36%), dan hasil gunung api tua yang tak terurai (Qvu) seluas 560 ha (0,63%). Berdasarkan jenis tanahnya, wilayah Kabupaten Cirebon memiliki sembilan jenis tanah

yaitu alluvial, regosol, litosol, grumosol, mediteran, latasol, podsolik, regosol, dan glei humus. Secara umum, jenis-jenis tanah tersebut sesuai untuk kegiatan pertanian (sawah dan palawija), dan kegiatan perikanan.

Secara hidrologis, wilayah Kabupaten Cirebon meliputi air tanah dan air permukaan, dimana jumlah air permukaan 1.418,83 juta meter kubik (m^3). Sebaran air tanah di wilayah Kabupaten Cirebon diklasifikasikan menjadi air tanah asin, air tanah dangkal, air tanah sedang, dan air tanah langka. Adapun berdasarkan jenis, air tanah dibedakan menjadi air tanah dangkal dan air tanah dalam. Sementara, jenis air permukaan meliputi sungai, danau/situ dan mata air. Volume debit air sebagaimana yang tertuang diatas pemanfaatannya meliputi untuk kebutuhan-kebutuhan domestik 6,5 juta m^3 , industri 5,184 juta m^3 , irigasi 1.046 juta m^3 , budi daya perikanan 81,3 juta m^3 .

Secara klimatologis, berdasarkan klasifikasi *Schmidt* dan *Ferguson*, Kabupaten Cirebon beriklim tipe C dan D. Daerah dengan kategori ini mempunyai ciri iklim tropis, suhu antara $24^{\circ}C$ sampai $36^{\circ}C$ dengan suhu rata-rata $28^{\circ}C$. Kabupaten Cirebon memiliki curah hujan antara 0-3.317 milimeter (mm) dengan rata-rata jumlah curah hujan sebanyak 1.265,15 mm. Curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Dukupuntang (3.317 mm) dan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Suranenggala (136 mm).

Secara kewilayahan, infrastruktur wilayah memiliki peran strategis dalam peningkatan struktur perwilayahan, mendukung distribusi barang, jasa dan mobilitas orang. Untuk mendukung peran tersebut, infrastruktur memerlukan pengembangan sistem jaringan prasarana jalan dan jembatan yang diarahkan pada lima Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Cirebon yaitu PKL Sumber, PKL Ciledug, PKL Lemahabang, PKL Palimanan dan PKL Arjawinangun.

Infrastruktur wilayah meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, irigasi, listrik, telepon dan sarana lain seperti sarana pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Kebutuhan infrastruktur

wilayah tersebut terkait dengan fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, dimana dengan kondisi infrastruktur perbatasan yang baik maka dapat menjadi faktor penarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Cirebon.

2. Kondisi Demografis

Kabupaten Cirebon memiliki jumlah penduduk mencapai 2.184.380 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Sumber dengan jumlah penduduk sebanyak 90.719 jiwa, sedangkan kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Pasaleman dengan jumlah penduduk sebanyak 26.922 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Cirebon menunjukkan kenaikan dengan rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) tahun 2018-2019 sebesar 1,01% per tahun. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2.
Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon
per Kecamatan Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019*)
1.	Waled	57 885	58.428	51.936	54.014	54.307
2.	Pasaleman	27 465	28.501	30.646	26.793	26.922
3.	Ciledug	46 454	45.508	44.306	44.555	44.516
4.	Pabuaran	38 218	35.919	34.968	35.445	35.449
5.	Losari	61 034	60.687	59.087	59.673	59.788
6.	Pabedilan	56 404	61.314	59.594	55.978	56.241
7.	Babakan	69 154	72.461	70.544	68.993	69.912
8.	Gebang	63 912	65.171	63.421	65.027	65.156
9.	Karangsembung	38 105	37.962	36.664	36.397	36.561
10.	Karangwareng	29 267	30.849	30.036	28.159	28.218
11.	Lemahabang	57 114	55.046	51.936	53.214	53.977
12.	Susukan Lebak	41 026	41.719	40.621	40.203	40.152
13.	Sedong	43 397	44.626	43.454	40.660	40.695
14.	Astanajapura	84 297	79.573	70.261	73.478	73.749
15.	Pangenan	49 529	45.090	44.841	44.597	44.180
16.	Mundu	83 766	73.715	70.518	71.732	71.439

No	Kecamatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019*)
17.	Beber	40 108	41.559	40.471	40.516	41.249
18.	Greged	57 609	61.211	57.619	53.269	53.484
19.	Talun	72 709	69.409	67.585	65.198	65.863
20.	Sumber	86.605	91 181	88.255	89.192	90.719
21.	Dukupuntang	64.793	68 483	64.887	62.656	62.813
22.	Palimanan	63.420	61 894	62.282	60.899	61727
23.	Plumbon	76.605	82 186	74.999	78.259	79.867
24.	Depok	66.734	62 992	64.474	62.272	63.266
25.	Weru	64.451	71 749	63.900	66.909	68.034
26.	Plered	56.346	57 561	51.115	52.132	53.257
27.	Tengah Tani	41.553	45 495	39.021	41.884	42.530
28.	Kedawung	67.572	70 204	56.462	57.980	58.747
29.	Gunungjati	85.537	88 035	75.737	78.319	79.016
30.	Kapetakan	62.212	56 805	57.882	56.036	57.427
31.	Suranenggala	47.416	45 318	44.422	43.471	44.663
32.	Klangenan	50.207	56 541	54.382	51.417	52.620
33.	Jamblang	40.636	38 779	38.801	38.035	38.677
34.	Arjawinangun	71.759	70 151	63.055	67.780	68.450
35.	Panguragan	52.313	47 305	47.215	42.570	42.542
36.	Ciwaringin	41.200	43 533	34.281	36.821	37.305
37.	Gempol	47.993	48 506	46.795	44.831	45.698
38.	Susukan	77.811	68 862	69.779	64.382	65.460
39.	Gegesik	81.822	77 099	77.115	68.979	69.263
40.	Kaliwedi	44.882	39 675	42.394	39.851	40.441
Jumlah		2.289.511	2.306.602	2.245.895	2.162.576	2.184.380

Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester I Tahun 2019 Disdukcapil.

Rata-rata kepadatan penduduk tahun 2019 di Kabupaten Cirebon sebesar 2.033 jiwa/km² artinya dalam 1 km persegi dihuni oleh 2.033 orang. Kecamatan yang memiliki kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Weru sebesar 7.541 jiwa/km², sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Pasaleman sebesar 658 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel. 1.3
Kepadatan Penduduk Kabupaten Cirebon Per Kecamatan
Tahun 2015–2019 (jiwa/km²)

No	Kecamatan	Luas Wilayah Km ²	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
			2015	2016	2017	2018	2019*)
1.	Waled	28,46	2.034	2.053	1.847	1.931	1.768
2.	Pasaleman	32,11	855	888	817	1.302	658
3.	Ciledug	13,25	3.506	3.435	3.336	4.423	3.130
4.	Pabuaran	8,95	4.270	4.013	3.886	6.389	3.765
5.	Losari	39,07	1.562	1.553	1.466	1.818	1.309
6.	Pabedilan	24,08	2.342	2.546	2.147	1.444	2.075
7.	Babakan	21,93	3.153	3.304	2.946	2.312	3.017
8.	Gebang	31,68	2.017	2.057	1.923	1.205	1.785
9.	Karangsembung	15,14	2.517	2.507	2.337	2.687	1.948
10.	Karangwareng	23,12	1.266	1.334	1.193	3.156	1.050
11.	Lemahabang	21,49	2.658	2.561	2.402	1.919	2.361
12.	Susukan Lebak	18,74	2.189	2.226	2.091	3.636	2.249
13.	Sedong	31,02	1.399	1.439	1.262	1.273	1.177
14.	Astanajapura	25,47	3.310	3.124	2.890	2.468	2.637
15.	Panganan	30,54	1.622	1.476	1.397	2.583	1.237
16.	Mundu	25,58	3.275	2.882	2.757	2.318	2.667
17.	Beber	23,25	1.725	1.787	1.739	1.799	1.626
18.	Greged	29,92	1.925	2.046	1.780	2.425	1.712
19.	Talun	25,65	2.835	2.706	3.045	2.887	3.465
20.	Sumber	36,40	2.505	2.425	3.459	3.211	3.111
21.	Dukupuntang	17,18	3.986	3.777	1.694	2.653	1.706
22.	Palimanan	18,19	3.403	3.424	3.480	3.160	3.240
23.	Plumbon	15,55	5.285	4.823	4.136	2.883	4.096
24.	Depok	9,19	6.854	7.016	3.928	4.223	3.864
25.	Weru	11,34	6.327	5.635	7.247	5.181	7.541
26.	Plered	8,97	6.417	5.698	4.515	3.324	4.010
27.	Tengah Tani	9,58	4.749	4.073	4.630	7.862	6.076
28.	Kedawung	60,20	1.166	938	5.957	7.815	3.825
29.	Gunung Jati	22,98	3.831	3.296	3.716	1.998	3.524
30.	Kapetakan	20,57	2.762	2.814	871	994	812
31.	Suranenggala	17,76	2.552	2.501	1.796	2.617	1.652
32.	Klangenan	24,11	2.345	2.256	2.413	1.273	2.518
33.	Jamblang	20,31	1.909	1.910	2.098	1.946	2.327
34.	Arjawinangun	17,79	3.943	3.544	2.726	1.191	2.803
35.	Panguragan	30,73	1.539	1.536	2.024	1.818	1.935
36.	Ciwaringin	50,10	869	684	1.976	2.777	2.262
37.	Gempol	60,38	803	775	1.420	1.429	1.472

No	Kecamatan	Luas Wilayah Km ²	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
			2015	2016	2017	2018	2019*)
38.	Susukan	27,82	2.475	2.508	1.212	1.065	1.209
39.	Gegesik	21,21	3.635	3.636	1.095	855	1.073
40.	Kaliwedi	27,82	1.931	2.063	1.373	1.411	1.375
Jumlah		990,36	2.830	2.844	2.732	2.177	2.033

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon Dalam Angka, Tahun 2019

Penduduk Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 sekitar 2.184.380 jiwa yang terdiri dari 1.105.458 jiwa laki-laki (50,61%) dan 1.078.922 jiwa perempuan (49,39%). Sex rasionya adalah sekitar 105 yang berarti terdapat sekitar 105 orang laki-laki diantara 100 perempuan. Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon pada tahun 2018 dan 2019 relatif menurun dibanding 2018. Perbandingan sex ratio pada tahun 2019 sekitar 105 dan tahun 2018 dengan jumlah penduduk Kabupaten Cirebon sekitar 2.162.576 jiwa yang terdiri dari 1.095.984 jiwa laki-laki (50,67%) dan 1.066.592 jiwa perempuan (49,32%), sex rasionya adalah sekitar 105% yang berarti terdapat sekitar 105 orang laki-laki diantara 100 perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Diduga salah satu penyebabnya adalah karena penduduk perempuan di daerah ini lebih banyak keluar daerah untuk sekolah, bekerja dan mencari pekerjaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.4

Tabel. 1.4.
Penduduk Kabupaten Cirebon menurut Struktur Usia Tahun 2019

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 - 4	92.178	85.535	177.713
2.	5 - 9	90.947	84.645	175.592
3.	10 - 14	70.922	67.590	138.512
4.	15 - 19	69.043	70.812	139.864
5.	20 - 24	99.498	96.948	196.446
6.	25 - 29	103.321	95.574	198.895

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
7.	30 - 34	97.325	92.430	189.755
8.	35 - 39	101.256	102.046	203.302
9.	40 - 44	89.380	90.383	179.763
10.	45 - 49	78.241	77.202	155.443
11.	50 - 54	61.841	63.183	125.024
12.	55 - 59	49.903	51.060	100.963
13.	60 - 64	38.798	39.390	78.188
14.	65 - 69	29.311	27.127	56.438
15.	70 - 74	15.675	16.682	32.357
16.	>75	17.819	18.306	36.125
Jumlah		1.105.458	1.078.922	2.184.380

*Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester I Tahun 2019
Disdukcapil.*

Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2000, 2010 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Cirebon pada kurun waktu 2000-2010 adalah 1,40 persen per tahun. Sementara pada tahun 2010-2016 pertumbuhan penduduknya adalah sekitar 0,79 persen per tahun. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut, oleh banyak pihak dianggap sebagai suatu hal yang merisaukan apalagi bila tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi tidak merata juga berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial, terutama bila tidak diimbangi dengan penambahan lapangan kerja. Dengan kata lain apabila pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan penduduk akan menjadi masalah, terlebih bila terdapat kesenjangan pendapatan yang cukup tinggi. Pertumbuhan penduduk yang positif akan memperluas lahan hunian dan mengurangi lahan usaha bagi penduduk itu sendiri.

Pada tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Cirebon relatif menurun dari tahun sebelumnya menjadi 2.184.380 jiwa, dengan rincian struktur usia produktif dan tidak produktif terdiri dari penduduk usia muda (0-14 tahun) di Kabupaten Cirebon adalah sekitar 491.817 orang, penduduk usia produktif (15-64 tahun) sekitar 1.567.643 orang, dan penduduk usia lanjut (65 tahun keatas) sekitar 124.920 orang. Angka beban tanggungan penduduk Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 adalah sebesar 39,34 artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban ekonomi sekitar 38 orang usia tidak produktif

TPAK di Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 mencapai 61,85 %, yang berarti bahwa pada setiap 100 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) sekitar 61 orang di antaranya adalah termasuk angkatan kerja. TPAK tahun 2019 ini naik bila dibandingkan tahun 2018 yakni sekitar 3,64%. Semakin tinggi angka TPAK maka semakin besar penyediaan tenaga kerja, dan secara otomatis kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan perekonomian semakin cepat, karena berkaitan dengan seberapa besar produktivitas yang dihasilkan oleh para pekerja tersebut. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Sebagai catatan bahwa persentase angkatan kerja yang ditampilkan tidak lain adalah TPAK itu sendiri. Bisa dilihat kondisi ketenagakerjaan pada Tabel. 1.5.

Tabel.1.5

Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Cirebon Tahun 2013 - 2019

Uraian	Tahun						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	59,20	59,55	58,51	58,45	58,21	61.25	61.85
Tingkat Penangguran Terbuka (%)	14,88	13,32	10,51	9,21	8,80	9.61	10.56
Bekerja (jiwa)	763.934	792.245	813.824	832.719	885.085	880.807	890.762

Sumber : BPS Kabupaten Cirebon Dalam Angka Tahun 2019

3. Kondisi Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon dapat diukur dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Dari perubahan PDRB tersebut, terjadi peningkatan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 1,08% dari angka 41.947.728.13 juta rupiah tahun 2018 menjadi 45.461.939 juta rupiah pada tahun 2019.

Selain itu, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang juga merupakan barometer pertumbuhan ekonomi secara riil pada Tahun 2019 mencapai 32.160.192 juta rupiah atau meningkat sebesar 1,10% dari Tahun 2018 sebesar 29,148,228 juta rupiah.

Untuk lebih jelasnya mengenai PDRB Kabupaten Cirebon ADHK dan PDRB ADHB dapat dilihat pada Tabel.1.6 dan Tabel. 1.7.

Tabel.1.6
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019 (Dalam Juta Rupiah)

PDRB Pengeluaran (Seri 2010)	[Seri 2010] PDRB Seri 2010 menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	Harga Berlaku				
	2015	2016	2017	2018	2019
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	29,000,694.9	32,186,521.0	35,534,084.3	37.208,13	39,941,908
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	668,772.3	656,703.5	701,271.4	768,54	962,977
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,277,848.8	2,691,142.3	2,917,188.7	3.044,56	3.506.662
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	11,626,865.3	12,700,113.5	13,220,644.2	14.340,15	15.445.191
5. Perubahan Inventori	1,735,693.5	1,755,517.1	1,665,146.1	1.665,15	1.784.917
6. Net (Ekspor-Impor)	(12,730,823.8)	(14,237,334.0)	(15,155,437.4)	(15.136,31)	(16.179.715)
7. PRODUK DOMESTIK BRUTO	32,579,051.0	35,752,663.3	38,882,897.2	41.947.728.13	45.461.939

Tabel.1.7**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015 – 2019 (Dalam Juta Rupiah)**

PDRB Pengeluaran (Seri 2010)	[Seri 2010] PDRB Seri 2010 menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Harga Konstan 2010				
	2015	2016	2017	2018	2019
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	22,148,222.9	23,182,605.1	24,360,803.3	25,693,497.2	27.238.347
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	536,111.7	554,712.5	523,007.1	551,247.1	709.619
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,731,633.9	1,789,490.1	1,915,547.7	2,020,249.2	2.231.607
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	8,800,459.5	9,090,583.9	9,418,577.5	9,700,862.0	10.784.147
5. Perubahan Inventori	1,255,701.4	1,210,627.5	1,082,293.0	1,125,227.9	1.130.490
6. Net (Ekspor-Import)	(9,429,874.3)	(9,515,026.9)	(9,703,973.9)	(9,942,854.5)	(9.934.019)
7. PRODUK DOMESTIK BRUTO	25,042,254.9	26,312,992.3	27,596,254.8	29,148,228.9	32.160.192

Sumber : BPS Kabupaten Cirebon Dalam Angka Tahun 2019

4. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan melegalisasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

Dengan merujuk pada kedua peraturan di atas Pemerintah Kabupaten Cirebon membentuk organisasi perangkat daerah dengan komposisi 2 Sekretariat, 1 Inspektorat, 22 Dinas, 6 Badan dan 2 Rumah Sakit Daerah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.8**SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon**

No.	Nama dinas
1.	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat DPRD
3.	Inspektorat
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6.	Badan Keuangan dan Aset Daerah
7.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
8.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
11.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
12.	Dinas Kelautan dan Perikanan
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14.	Dinas Kesehatan
15.	Dinas Ketahanan Pangan
16.	Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum/ Satpol PP
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika
18.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
19.	Dinas Lingkungan Hidup
20.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
21.	Dinas Pemadam Kebakaran
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24.	Dinas Pendidikan

25.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
26.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
27.	Dinas Perhubungan
28.	Dinas Pertanian
29.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
30.	Dinas Sosial
31.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
32.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waled
33.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arjawinangun

Selain SKPD di atas, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga membentuk Kecamatan dengan jumlah 40 Kecamatan dan 12 Kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.9
Kecamatan di Kabupaten Cirebon

No.	Nama Kecamatan
1.	Kecamatan Arjawinangun
2.	Kecamatan Astanajapura
3.	Kecamatan Babakan
4.	Kecamatan Beber
5.	Kecamatan Ciledug
6.	Kecamatan Ciwaringin
7.	Kecamatan Depok
8.	Kecamatan Dukupuntang
9.	Kecamatan Gebang
10.	Kecamatan Gegesik
11.	Kecamatan Gempol
12.	Kecamatan Greged

No.	Nama Kecamatan
13.	Kecamatan Gunungjati
14.	Kecamatan Jamblang
15.	Kecamatan Kaliwedi
16.	Kecamatan Kapetakan
17.	Kecamatan Karangsembung
18.	Kecamatan Karangwareng
19.	Kecamatan Kedawung
20.	Kecamatan Klangeran
21.	Kecamatan Lemahabang
22.	Kecamatan Losari
23.	Kecamatan Mundu
24.	Kecamatan Pabedilan
25.	Kecamatan Pabuaran
26.	Kecamatan Palimanan
27.	Kecamatan Pangenan
28.	Kecamatan Panguragan
29.	Kecamatan Pasaleman
30.	Kecamatan Plered
31.	Kecamatan Plumbon
32.	Kecamatan Sedong
33.	Kecamatan Sumber
34.	Kecamatan Suranenggala
35.	Kecamatan Susukan
36.	Kecamatan Susukanlebak
37.	Kecamatan Talun
38.	Kecamatan Tengah tani
39.	Kecamatan Waled
40.	Kecamatan Weru

Tabel 1.10

Kelurahan di Kabupaten Cirebon

No.	Nama Kelurahan
1	Kelurahan Sumber
2	Kelurahan Perbutulan
3	Kelurahan Cempaka
4	Kelurahan Kenanga
5	Kelurahan Kemantren
6	Kelurahan Pamokolan
7	Kelurahan Sendang
8	Kelurahan Kaliwadas
9	Kelurahan Pasalakan
10	Kelurahan Pejambon
11	Kelurahan Babakan
12	Kelurahan Gegunung

1.4. Kondisi Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon berjumlah 12.781 orang, rincian jumlah dan komposisi ASN di Lingkungan Kabupaten Cirebon dalam beberapa Tabel di bawah ini :

Komposisi jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Cirebon dari jenis kelamin, komposisi jumlah berdasarkan jenis kelamin mayoritas berjenis kelamin laki-laki sebesar 47,98% dibanding dengan jumlah perempuan yang sebesar 52,02%. Sebagaimana digambarkan dalam table 2.6 berikut ini.

Tabel 1.11**Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	6.132
2	Perempuan	6.649
	Total	12.781

Sementara berdasarkan golongan dan ruang ASN, terbanyak dari golongan III dan kemudian golongan IV, besarnya jumlah golongan III dan Golongan IV ini dikarenakan, jumlah dari fungsional guru dan tenaga medis lebih besar dari jumlah tenaga teknis lainnya dan pejabat dan staf struktural, berikut ini table yang menggambarkan ASN Kabupaten Cirebon dari ruang dan golongan.

Tabel 1.12**Jumlah ASN Berdasarkan Ruang Golongan**

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan I/A	-
	Golongan I/B	5
	Golongan I/C	24
	Golongan I/D	56
	Total Golongan I	85
2.	Golongan II/A	80
	Golongan II/B	212
	Golongan II/C	621
	Golongan II/D	385
	Total Golongan II	1.298
3.	Golongan III/A	1.103
	Golongan III/B	1.721
	Golongan III/C	1.555

No.	Golongan	Jumlah
	Golongan III/D	1.535
	Total Golongan III	5.914
4.	Golongan IV/A	2.251
	Golongan IV/B	3.090
	Golongan IV/C	139
	Golongan IV/D	4
	Total Golongan IV	5.484
	Total	12.781

Dilihat dari faktor pendidikan jumlah pendidikan yang dipadukan dengan jenis kelamin, hal ini untuk mengetahui komposisi ASN di Kabupaten Cirebon terkait dengan gender serta jumlah pendidikan yang ditempuh berdasarkan atas jenis kelamin ASN, dari tabel di bawah ini dapat dibaca bahwa dari sisi komposisi sangat logis dimana jumlah ASN berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari jumlah perempuan, sehingga sangat masuk akal jika dari segi pendidikan pun akan mengikuti, akan tetapi hal ini tidak menjadi hubungan yang baku antara jenis kelamin dan tingkat pendidikan, meskipun dari komposisi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon menyatakan itu.

Tabel 1.13

Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan

No.	Golongan	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	SD	43	3
2.	SMP	148	7
3.	SMA	1.045	318
4.	DI	24	68
5.	DII	508	594
6.	DIII	318	934

No.	Golongan	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
7.	DIV	36	193
8.	S1	3.672	4.358
9.	S2	322	160
10.	S3	3	-
	SubTotal	6.119	6.635
	Total	12.781	

E. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh

Lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon, adalah :

- Lingkungan internal
 - a. Komitmen dan tekad bersama seluruh komponen birokrasi Pemerintah Kabupaten Cirebon dan masyarakat untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
 - b. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah khususnya pelayanan publik;
 - c. Kejelasan regulasi, tanggung jawab, dan kewenangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - d. Hubungan jejaring kerja yang terjalin secara harmonis dan sinergis antara eksekutif dan legislatif dilingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon yang mendukung rumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam program-program

pembangunan daerah dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Cirebon.

- Lingkungan eksternal
 - a. Dukungan masyarakat dalam menciptakan suasana kondusif di wilayah Kabupaten Cirebon sehingga dapat terlaksananya kinerja pemerintah yang baik dan berkesinambungan;
 - b. Dinamika regulasi dan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkenaan dengan kelembagaan dan pelimpahan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan
 - c. Pola koordinasi dan komunikasi yang sinergi dengan berbagai unsur seperti komunitas, dunia akademik, dan dunia usaha dalam membangun Kabupaten Cirebon secara bertanggung jawab;

F. Isu Strategis Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2019

1. Isu Strategis

Berdasarkan telaahan kebijakan pembangunan dan analisis berbagai permasalahan diatas, Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan isu strategis sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama:
 - a. Implementasi pendidikan keagamaan secara baik;
 - b. Internalisasi keshalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat
2. Keterjangkauan, kualitas, dan partisipasi pendidikan:
 - a. Keterjangkauan meliputi akses dan pembiayaan pendidikan;
 - b. Kualitas dan kuantitas pendidikan meliputi SDM pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan;

- c. Partisipasi pendidikan masyarakat meliputi peran serta masyarakat bagi keberlanjutan pendidikan dasar dan menengah
3. Jaminan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan :
- a. Kesehatan ibu, bayi, dan balita meliputi kematian ibu, bayi, balita; gizi ibu, bayi, dan balita; cakupan imunisasi dan kunjungan ibu hamil;
 - b. Jaminan dan keterjangkauan akses pelayanan kesehatan meliputi keikutsertaan menjadi peserta BPJS;
 - c. Mutu pelayanan kesehatan meliputi SDM medis dan paramedis, sarana dan prasarana kesehatan;
 - d. Promosi, Jejaring, dan partisipasi masyarakat;
 - e. Penyehatan lingkungan meliputi perilaku hidup bersih dan sehat, pengendalian penyakit (menular dan non menular)
4. Ketersediaan dan kemantapan infrastruktur wilayah :
- a. Kemantapan jembatan dan jalan meliputi jalan kabupaten dan poros desa;
 - b. Mempercepat penyediaan infrastruktur dasar meliputi perumahan, sanitasi, dan listrik;
 - c. Keterpaduan pembangunan bidang keciptakaryaan meliputi sanitasi, penataan kawasan kumuh, penataan dan pengembangan bangunan dan lingkungan permukiman;
 - d. Mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal dan/atau di perbatasan;
 - e. Penataan fasilitas sosial dan fasilitas umum meliputi jalan pemukiman, taman, tempat ibadah, dan ruang terbuka hijau;
 - f. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni dan terjangkau;
 - g. Prasarana air bersih dan sanitasi meliputi saluran pembuangan air limbah domestic, sampah, dan jamban;
 - h. Pemeliharaan irigasi teknis dan setengah teknis;
 - i. Prasarana telekomunikasi dan informasi.

5. Ketahanan pangan :
 - a. Ketersediaan meliputi produksi, produktivitas pangan, alih fungsi lahan, teknologi;
 - b. Akses dan distribusi pangan meliputi jalan produksi, gudang/lumbung pangan, tata niaga;
 - c. Keanekaragaman/diversifikasi pangan;
 - d. Stabilitas harga pangan;
 - e. Mutu dan keamanan pangan.
6. Pengendalian kependudukan :
 - a. Distribusi meliputi sebaran dan migrasi/urbanisasi;
 - b. Struktur/komposisi meliputi kelahiran, kematian, perpindahan, pertumbuhan penduduk, dan rasio jenis kelamin
7. Penurunan jumlah penduduk miskin :
 - a. Pendapatan meliputi mata pencaharian;
 - b. Jaminan sosial masyarakat miskin;
 - c. Akses terhadap sumber daya sosial, ekonomi, dan politik
8. Reformasi birokrasi :
 - a. Penataan kelembagaan pemerintahan;
 - b. Sistem kepegawaian meliputi kapasitas dan profesionalisme pegawai, remunerasi aparatur sipil negara;
 - c. Pelayanan publik;
 - d. Perencanaan pembangunan;
 - e. Penganggaran dan pembiayaan pembangunan;
 - f. Pengendalian, evaluasi, dan pengawasan pembangunan;
 - g. Sarana dan prasarana pemerintahan
9. Peningkatan investasi
 - a. Ketersediaan infrastruktur dasar wilayah;
 - b. Pelayanan perijinan usaha meliputi ketersediaan sistem pelayanan perijinan berbasis teknologi informasi; mekanisme dan prosedur perijinan, dan kapasitas sumber daya manusia;

- c. Stabilitas wilayah meliputi keamanan dan ketertiban, politik, dan kepastian hukum;
- d. Promosi potensi dan kelayakan investasi;
- e. Akses permodalan dan jasa keuangan;
- f. Penciptaan sentra-sentra ekonomi;
- g. Pengembangan ekonomi kerakyatan.

10. Ketersediaan energi

- a. Akses listrik bagi rumah tangga kurang mampu
- b. Energi terbarukan

11. Kesempatan dan daya saing ketenagakerjaan

- a. Daya saing tenaga kerja meliputi keterampilan dan produktivitas;
- b. Kesempatan kerja meliputi kewirausahaan/entrepreneurship dan pengangguran;
- c. Penempatan dan perlindungan tenaga kerja.

12. Pengelolaan lingkungan hidup :

- a. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi hutan kota dan alun-alun/taman kecamatan;
- b. Perubahan iklim global dan lokal;
- c. Bencana alam meliputi adaptasi, mitigasi, dan rehabilitasi bencana;
- d. Konservasi, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya alam;
- e. Pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- f. Pengelolaan limbah;
- g. Implementasi pembangunan berwawasan ekonomi hijau (green economy) dan ekonomi biru (blue economy);
- h. Penegakkan hukum lingkungan.

13. Pembinaan dan pengembangan generasi muda dan olahraga :

- a. Nilai kebangsaan dan kepemimpinan;
- b. Sarana dan prasarana kepemudaan;

- c. Budaya berolahraga;
 - d. Sarana dan prasarana olahraga.
14. Pelestarian dan pengembangan seni, budaya, dan pariwisata :
- a. Pelestarian dan pengembangan seni dan budaya;
 - b. Destinasi wisata;
 - c. Sarana dan prasarana seni dan budaya.

2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 menyangkut aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek pemerintahan, dan aspek fisik dan prasarana wilayah. Berdasarkan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019, berbagai hal dirumuskan untuk mengatasi isu strategis tahun 2019. Adapun prioritas pembangunan tahun 2019 yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
2. Meningkatkan keterjangkauan, kualitas, dan partisipasi pendidikan.
3. Meningkatkan jaminan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan.
4. Meningkatkan ketersediaan dan kemantapan infrastruktur wilayah.
5. Meningkatkan ketahanan pangan.
6. Meningkatkan pengendalian kependudukan.
7. Percepatan penurunan jumlah penduduk miskin.
8. Percepatan reformasi birokrasi.
9. Peningkatan investasi.
10. Meningkatkan ketersediaan dan keberlanjutan energi.
11. Meningkatkan kesempatan dan daya saing ketenagakerjaan.

12. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.
13. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan generasi muda.
14. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni, budaya, dan pariwisata.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Kabupaten Cirebon diuraikan sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum daerah, struktur organisasi, lingkungan strategis, isu strategis yang berpengaruh, prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon.

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan visi dan misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah, indikator kinerja utama, penetapan perjanjian kinerja.

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan kerangka pengukuran kinerja, pengukuran dan analisis kinerja. Pencapaian kinerja keuangan daerah.

BAB. IV PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan rencana tindak lanjut

2 BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan visi dan misi sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019. Adapun penjelasan secara rincinya sebagai berikut.

Visi Kabupaten Cirebon adalah **“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon yang agamis, maju, adil, sinergi, dan sejahtera”**.

Untuk memperjelas sasaran yang hendak diwujudkan, pengertian terhadap rumusan visi sebagai batasan operasionalnya, yaitu:

- | | |
|--------|---|
| Agamis | adalah suatu kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada pengamalan nilai-nilai agama menuju tatanan masyarakat dan aparatur pemerintah yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia; |
| Maju | adalah suatu kondisi masyarakat dan pemerintah yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing nasional dan global berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan, dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan sumber daya yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik, berprestasi, dan berdaya guna; |
| Adil | adalah suatu kondisi pembangunan daerah yang menjadi bagian dari satu kesatuan pembangunan Jawa Barat dan Nasional; |

Sinergi	adalah suatu kondisi pembangunan daerah yang menjadi bagian dari satu kesatuan pembangunan Jawa Barat dan Nasional;
Sejahtera	adalah suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan pokok/dasarnya secara lahir dan bathin dalam berbagai aspek dan memiliki rasa aman, damai, dan tenteram.

Untuk mencapai visi tersebut, kepala daerah menyusun misi-misi dengan rumusan sebagai berikut.

- Misi pertama,** Meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia yang berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik;
- Misi Kedua,** Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berbudaya, berilmu, dan berketerampilan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan;
- Misi Ketiga,** Mendorong pemerataan pembangunan tematik/sektoral dan kewilayahan berdasarkan potensi yang tersedia;
- Misi Keempat,** Menciptakan sinergi pembangunan secara menyeluruh antar berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademik, dan komunitas);
- Misi Kelima,** Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai, dan tenteram;
- Misi Keenam,** Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

2. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Cirebon, tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun kedepan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut.

Tabel 2.1**Tujuan dan Sasaran**

No.	Tujuan	Sasaran
1	Membentuk sumber daya manusia yang memiliki integritas (jati diri), sikap dan perilaku yang berlandaskan nilai-nilai agama, jujur, dan bertakwa	Meningkatnya aktivitas kehidupan beragama, keshalehan sosial masyarakat, dan toleransi antar dan internal umat beragama
2	Meningkatkan derajat SDM yang sehat, berbudaya, berilmu, berketerampilan, dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua 2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 3. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya kerja, berketerampilan dan berjiwa kewirausahaan 4. Terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai daerah wisata berbasis budaya 5. Terwujudnya kemandirian dan peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga
3	Meningkatkan pemerataan pembangunan sektoral dan kewilayahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan koneksitas antar wilayah 2. Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai 3. Terwujudnya Cirebon yang bersih, asri, dan lestari
4	Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
5	Meningkatkan pemerataan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya perekonomian masyarakat 2. Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas 3. Terpenuhinya akses seluruh masyarakat terhadap infrastruktur permukiman layak
6	Mewujudkan reformasi birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pelayanan publik yang prima 2. Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah 3. Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih

Adapun hubungan keterkaitan antara visi misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat dilihat dalam tabel 2.2. dibawah ini.

Tabel 2.2

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon yang agamis, maju, adil, sinergi, dan sejahtera		
1 Meningkatkan kualitas SDM yang berakhlak mulia yang berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik	Membentuk sumber daya manusia yang memiliki integritas (jati diri), sikap dan perilaku yang berlandaskan nilai-nilai agama, jujur dan bertakwa	Meningkatnya aktivitas kehidupan beragama, keshalehan sosial masyarakat, dan toleransi antar dan intern umat beragama
2 Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berbudaya, berilmu, dan berketrampilan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan kewirausahaan	Meningkatkan derajat SDM yang sehat, berbudaya, berilmu, berketerampilan dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua 2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 3. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya, berketrampilan dan berjiwa kewirausahaan 4. Terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai daerah wisata berbasis budaya 5. Terwujudnya kemandirian dan peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga
3 Mendorong pemerataan pembangunan tematik/sektoral dan kewilayahan berdasarkan potensi yang	Meningkatkan pemerataan pembangunan sektoral dan kewilayahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan koneksitas antar wilayah 2. Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai

	Misi	Tujuan	Sasaran
	tersedia		3. Terwujudnya Cirebon yang bersih, asri dan lestari
4	Menciptakan sinergi pembangunan secara menyeluruh antar berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademik, dan komuniti)	Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
5	Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai dan tentram	Meningkatkan pemerataan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat 2. Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas 3. Terpenuhinya akses seluruh masyarakat terhadap infrastruktur permukiman layak
6	Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)	Mewujudkan reformasi sistem birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pelayanan publik yang prima 2. Meningkatnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah 3. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik dan bersih

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan 16 sasaran strategis yang mencakup 73 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 39 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Cirebon Tahun 2016. Adapun rincian IKU tersebut diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Cirebon

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	
1	Meningkatnya aktivitas kehidupan beragama dan kesalehan sosial masyarakat serta toleransi antar dan intern umat beragama	a	Angka melek huruf Al-Quran lulusan SD/MD
		b	Angka Melek huruf Al Quran lulusan SMP
		c	Angka Melek huruf Al Quran lulusan SMA
		d	Angka Melek huruf Al Quran lulusan SMK
		e	Jumlah siswa yang hafal juz 'amma pada pendidikan SLTP dan SLTA
		f	Jumlah DKM yang menyelenggarakan kegiatan ba'da maghrib mengaji
		g	Jumlah penghafal Quran
		h	Prestasi lomba keagamaan tingkat provinsi Jawa Barat
		i	Jumlah kasus konflik yang bernuansa agama (IKU)
		2	Terwujudnya pelayanan pendidikan untuk semua
b	Angka Melek Huruf (AMH) pada penduduk usia 15 tahun keatas (pp6)		
c	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)		
d	Angka Partisipasi Kasar (APK)		
	- SD/MI		
	- SMP/MTs		
	- SMA/MA		
e	Angka Partisipasi Murni (APM)		
	- SD/MI		
	- SMP/MTs		
	- SMA/MA		
	- SMK		
f	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per usia tingkatan sekolah		
	- SD		
	- SMP		
	- SMA dan SMK		
3	Meningkatnya kualitas	a	Angka Harapan Hidup (AHH)
		b	ratio Kematian Ibu

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	
	kesehatan masyarakat	c	ratio Kematian Bayi
		d	Balita gizi buruk (BB/TB)
		e	cakupan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin pada pelayanan dasar
		g	Rasio rumah sakit per satuan penduduk
		h	Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk
		i	Jml puskesmas yang menyediakan pelayanan dokter anak dan kandungan
		k	Rasio dokter terhadap penduduk
		l	Rasio paramedis terhadap penduduk
		m	presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan
		n	Jumlah Posyandu Purnama
4	Terwujudnya masyarakat yang berbudaya, berketrampilan, dan berjiwa kewirausahaan	a	Jumlah kawasan seni
		b	Jumlah pertunjukan/pagelaran/festival budaya tingkat nasional (iku)
		c	Cakupan peserta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (spm) <ul style="list-style-type: none"> • Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis kompetensi • Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan kewirausahaan • Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan • Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) • Besaran Pekerja/buruh yang menjadi program jamsostek. • Besaran Pemeriksaan Perusahaan • Besaran Pengujian peralatan di Perusahaan.
		d	Jumlah wirausahawan baru
		e	Angka pengangguran Terbuka
5	Terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai daerah wisata berbasis budaya	a	Meningkatnya kunjungan wisatawan
6	Terwujudnya peningkatan peran pemuda dan prestasi Olah raga	a	prestasi olahraga di tingkat Provinsi Jawa Barat
7	Peningkatan	a	Jumlah panjang jalan kabupaten dalam

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	
	koneksitas antar wilayah		kondisi baik
		b	Jumlah panjang ruas jalan poros desa dalam kondisi baik
8	Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai	a	jaringan irigasi:
			- panjang saluran induk
			- panjang saluran sekunder
			- Bangunan jaringan irigasi
		c	jumlah rumah tangga berakses air minum untuk keperluan sehari-hari
		d	jumlah daerah rawan banjir
		f	prosentase pengangkutan sampah
		g	Persentase penduduk yg terlayani sistem jaringan drainase Skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun
		h	Persentase pengurangan sampah di perkotaan (daerah layanan persampahan)
		i	Cakupan ketersediaan rumah layak huni
j	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten (pos jaga)		
9	Terwujudnya Cirebon yang bersih, Asri dan lestari	a	Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah mandiri
		b	Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		c	Prosentase kawasan lindung
		d	Penghargaan Adipura
		e	Jumlah sungai yang memenuhi kualitas baku mutu air
		f	Jumlah industri yang memenuhi kualias baku mutu udara
		g	Jumlah pengaduan kasus dugaan terjadinya pencemaran lingkungan
10	Terwujudnya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	a	Jumlah komunitas
		b	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
		c	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan
11	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	a	Nilai PDRB
		b	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
		c	PDRB per kapita
		d	Tingkat inflasi
		e	Jumlah daerah rawan pangan
		f	Nilai investasi
		g	Prosentase Koperasi aktif

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	
		h	Jumlah lokasi wisata kuliner di kecamatan
12	Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas	a	Menurunnya Jumlah penduduk miskin
		b	Meningkatnya cakupan listrik bagi penduduk
13	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	a	Indeks Kepuasan Masyarakat
		b	Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan SOP dan SPM
		c	Kecamatan yang menjalankan Pelayanan administrasi Terpadu kecamatan (PATEN)
14	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	a	Rasio pegawai S2 terhadap jumlah seluruh pegawai
		b	Penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi/ latar pendidikan
15	Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih	a	Rata-rata capaian kinerja SKPD
		b	Penilaian RAD Pencegahan Penanggulangan Korupsi (PPK)
		c	Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal
		d	Peningkatan Pendapatan asli daerah

C. Rencana Kerja Tahunan

Perencanaan Kinerja tahunan adalah Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2019.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah bentuk pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Perjanjian kinerja bermaksud untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (insentif dan disinsentif).

Dengan kata lain, Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur;

- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Pemerintah Kabupaten Cirebon telah membuat Perjanjian kinerja tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan kewenangan, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja tahun 2019 ini disusun berdasarkan pada rencana kinerja tahun 2019 yang telah ditetapkan meliputi 26 urusan wajib pemerintahan dan 8 urusan pilihan dengan sasaran sebanyak 15 (lima belas) sasaran strategis yang diukur dengan 73 (tujuh puluh tiga) indikator.

Berdasarkan alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran di atas, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp. 3.192.321.679.057 sebagaimana tercantum dalam APBD Perubahan Anggaran Tahun 2019. Anggaran sebesar itu digunakan untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 2.120.633.908.120 atau 66,43% dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 1.071.687.770.937 atau 33,57%.

Secara ringkas, gambaran keterkaitan sasaran, indikator kinerja dan target tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Kabupaten Cirebon

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	
				Nilai	Satuan
1	Meningkatkan SDM yang berakhlak mulia yang berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik	Meningkatnya aktivitas kehidupan beragama dan kesalehan sosial masyarakat serta toleransi antar dan intern umat beragama	a. Angka melek huruf al-quran lulusan SD/MD	70	%
			b. Angka melek huruf al-quran lulusan SMP	75	%
			c. Angka melek huruf al-quran lulusan SMA	80	%
			d. Angka melek huruf al-quran	80	%

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019		
				Nilai	Satuan	
			lulusan SMK			
			e. Jumlah siswa yang hafal jus'amma pada pendidikan SMP dan SMA	5	%	
			f. Jumlah DKM yang menyelenggarakan kegiatan ba'da magrib mengaji	424	DKM	
			g. Jumlah menghafal quran	1.216	Orang	
			h. Prestasi lomba keagamaan tingkat propinsi jawa barat	5	-	
			i. Jumlah kasus konflik yang bernuansa agama	4	Kasus	
2	Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berbudaya, berilmu dan berketrampilan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan kewirausahaan.	1. Terwujudnya pelayanan pendidikan untuk semua	a. Peningkatan indeks pendidikan	85,67-86,67	%	
			b. Angka Melek Huruf (AMH) pada penduduk usia 15 tahun keatas	95,74	%	
			c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,03	Tahun	
			d. Angka Partisipasi Kasar (APK)			
			- SD/MI	130	%	
			- SMP/MTs	110,00	%	
			- SMA/MA	81	%	
			e. Angka Partisipasi Murni (APM)			
			- SD/MI	99,96	%	
			- SMP/MTs	90,50	%	
			- SMA/MA	62,76	%	
			- SMK	48,95	%	
			f. Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per usia tingkatan sekolah			
		- SD	50	%		
		- SMP	20	%		
		- SMA/SMK	23	%		
			2. Meningkatkan kualitas	a. Angka Harapan Huruf (AHH)	67	tahun
				b. Ratio kematian ibu	76,29	point

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	
				Nilai	Satuan
		kesehatan masyarakat	c. Ratio kematian bayi	3,81	point
			d. Balita gizi buruk	0,61	%
			e. Cakupan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin pada pelayanan dasar	1.345.865	orang
			f. Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,052	%
			g. Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk	0,053	%
			h. Jumlah puskesmas yang menyediakan pelayanan dokter anak dan kandungan	57	unit
			i. Rasio dokter terhadap penduduk	0,137	%
			j. Rasio paramedis terhadap penduduk	1,574	%
			k. Presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	1.345.000	%
			l. Jumlah Posyandu Purnama	769	unit
	3. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya, berkepribadian, dan berjiwa kewirausahaan		a. Jumlah kawasan seni	1	kawasan
			b. Jumlah pertunjukan/pagelaran/festival budaya tingkat nasional	1	kali
			c. Cakupan peserta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (SPM)	75	%
		- Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis kompetensi	75	%	

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	
				Nilai	Satuan
			- Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan kewirausahaan	75	%
			- Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	55	%
			- Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	75	%
			- Besaran Pekerja/buruh yang menjadi program jamsostek.	55	%
			- Besaran Pemeriksaan Perusahaan	60	%
			- Besaran Pengujian peralatan di Perusahaan.	65	%
			d. Jumlah wirausahawan baru	100	orang
			e. Angka pengangguran terbuka	8,7	%
		4. Terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai daerah wisata berbasis budaya	a. Meningkatnya kunjungan wisatawan	10	%
		5. Terwujudnya peningkatan peran pemuda dan prestasi olah raga	a. Prestasi olah raga di tingkat provinsi Jawa Barat		
			- POPDA	0	Peringkat
			- PORDA	0	Peringkat
	3.Mendorong pemerataan pembangunan	1. Peningkatan koneksitas	a. Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	646,65	Km

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019		
				Nilai	Satuan	
	tematik/sektoral dan kewilayahan berdasarkan potensi yang tersedia	antar wilayah	b. Jumlah panjang ruas jalan poros desa dalam kondisi baik	Data sudah menjadi jalan kabupaten.	Km	
		2. Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai	a. Jaringan irigasi			
			- Panjang saluran induk	78,102	Km	
			- Panjang saluran sekunder	39,464	Km	
			- Bangunan jaringan irigasi	100	%	
			b. Jumlah rumah tangga berakses air minum untuk keperluan sehari-hari	210.700	rumah tangga	
			c. Jumlah daerah rawan banjir	0	Kecamatan	
			d. Prosentase pengangkutan sampah	52	%	
			e. Persentase penduduk yg terlayani sistem jaringan drainase Skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	50	%	
			f. Persentase pengurangan sampah di perkotaan (daerah layanan persampahan)	20	%	
			g. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	84	%	
		h. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten (pos jaga)	14	Pos jaga		
		3. Terwujudnya Cirebon yang bersih, Asri dan lestari	a. Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah mandiri	8	Kelompok	
			b. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	40	Kecamatan	
			c. Prosentasi kawasan lindung	30	%	
			d. Penghargaan Adipura	1	kali	

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	
				Nilai	Satuan
			e. Jumlah sungai yang memenuhi kualitas baku mutu air	5	sungai
			f. Jumlah industri yang memenuhi kualitas baku mutu udara	25	industri
			g. Jumlah pengaduan kasus dugaan terjadinya pencemaran lingkungan	12	pengaduan
4.	Menciptakan sinergi pembangunan secara menyeluruh antar berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademik dan komuniti)	1. Terwujudnya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	a. Jumlah komunitas	92	komunitas
			b. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	92	kelompok
			c. Jumlah lembaga ekonomi pedesaan	424	lembaga
5.	Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai dan tentram	1. Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	a. Nilai PDRB	12.847.447	Rp (dlm juta)
			b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,55	%
			c. PDRB per kapita	21.568.345	Rp
			d. Tingkat Inflasi	3,5-4,5	%
			e. Jumlah Daerah rawan pangan	7	desa
			f. Nilai Investasi	1.492.239	Rp (dlm juta)
			g. Prosentase Koperasi aktif	100,00	%
			h. Jumlah lokasi wisata kuliner di kecamatan	8	lokasi
		2. Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas	a. Menurunnya jumlah penduduk miskin	11,65	%
			b. meningkatnya cakupan listrik bagi penduduk	100	%
6.	Mewujudkan	1. Terwujudnya	a. Indeks Kepuasan Masyarakat	4,25	indeks

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	
				Nilai	Satuan
	tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	pelayanan publik yang prima	b. Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan SOP dan SPM	11	unit
			c. Kecamatan yang menjalankan Pelayanan administrasi Terpadu kecamatan (PATEN)	40	kecamatan
		2. Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	a. Rasio pegawai S2 terhadap jumlah seluruh pegawai	3,7	%
			b. Penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi/ latar pendidikan	100	%
		3. Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih	a. Rata-rata capaian kinerja SKPD	70-75	%
			b. Penilaian RAD Pencegahan Penanggulangan Korupsi (PPK)	Baik	Angka/huruf
			c. Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal	5	%
			d. Peningkatan Pendapatan asli daerah	15	%

Adapun anggaran Belanja Langsung Urusan Tahun 2019 yang disediakan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 1.071.687.770.937 yang digunakan untuk pelaksanaan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan pada 33 SKPD dengan rincian selengkapnya dapat dilihat pada lampiran I .

E. Rencana Aksi Daerah (RAD)

Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menyusun rencana aksi daerah penetapan kinerja sebagaimana diuraikan pada lampiran.

3

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pemerintah Kabupaten Cirebon selaku pengemban amanah masyarakat Cirebon melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon 2014-2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

A. Akuntabilitas Kinerja

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator tujuan dan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran atas pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1

Katagori Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75 % sd. 100 %	Baik (B)
3	55 % sd. 75 %	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2019 berdasarkan pada tingkat pencapaian indikator sasaran dan menggambarkan tingkat capaian pada program/kegiatan. Secara kuantitatif untuk menghitung capaian target indikator kinerja, rumus yang digunakan adalah :

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi pencapaian kinerja. Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Capaian Kinerja} = (\text{Realisasi}/\text{Target}) \times 100\%$$

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja. Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Capaian Kinerja} = (\text{Rencana} - (\text{Rencana} - \text{Realisasi})) / \text{Rencana} \times 100\%$$

Secara umum Pemerintah Kabupaten Cirebon telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014–2019.

Dalam RPJMD terdapat 6 (enam) Misi, 7 (tujuh) Tujuan dan 16 (enam belas) sasaran, dengan 73 (tujuh puluh tiga) indikator sasaran terdiri dari

- Misi I terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 9 indikator kinerja,
- Misi II terdapat 1 tujuan, 5 sasaran dan 25 indikator kinerja,

- Misi III terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 17 indikator kinerja,
- Misi IV terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 3 indikator kinerja
- Misi V terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 10 indikator kinerja
- Misi VI terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 9 indikator kinerja.

Tabel 3.2

Pencapaian Indikator Sasaran/IKU

No.	Misi	Jumlah Tujuan	Jumlah Indikator		
			Jumlah sasaran	Indikator Sasaran	Pencapaian Indikator Sasaran
1	2	3	4	5	6
1	Misi 1	1	1	9	BS=4, B=1, C=1, K=0 Pindah ke propinsi 3
2	Misi 2	1	5	25	BS=15, B=3, C=2, K=3, Indikator pindah ke Provinsi =2
3	Misi 3	1	3	17	BS=9, B=2, C=0, K=6
4	Misi 4	1	1	3	BS=2, B=1, C=0, K=0
5	Misi 5	1	3	10	BS=5, B=4, C=1, K=0
6	Misi 6	1	3	9	BS=5, B=3, C=1, K=0
JUMLAH		6	16	73	BS=40, B=14, C=5, K=9, 5 IKU pindah ke Provinsi

Berikut ini adalah tabel jumlah sasaran katagori dan persentase capaian kinerja per misi yang ada

No	Katagori	Jumlah	%
Misi I			
1	Baik Sekali	4	66,67
2	Baik	1	16,67
3	Cukup	1	16,67
4	Kurang	0	0,00
5	Kewenangan Pindah	3	0,00
	Total	9	100
Misi II			
1	Baik Sekali	15	65,22
2	Baik	3	13,04
3	Cukup	2	8,70
4	Kurang	3	13,04
5	Kewenangan Pindah	2	0,00

No	Katagori	Jumlah	%
	Total	25	100.00
Misi III			
1	Baik Sekali	9	52,94
2	Baik	2	11,76
3	Cukup	0	0,00
4	Kurang	6	35,29
	Total	17	100
Misi IV			
1	Baik Sekali	2	66,67
2	Baik	1	33,33
3	Cukup	0	0.00
4	Kurang	0	0.00
	Total	3	100
Misi V			
1	Baik Sekali	5	50,00
2	Baik	4	40,00
3	Cukup	1	10,00
4	Kurang	0	0.00
	Total	10	100
Misi VI			
1	Baik Sekali	5	55.56
2	Baik	3	33.33
3	Cukup	1	11.11
4	Kurang	0	0.00
	Total	9	100

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 15 sasaran yang mencakup 73 indikator sasaran, diketahui bahwa 40 indikator sasaran atau 54,79% (Baik Sekali), 14 indikator sasaran atau 19,18 % (Baik), 5 indikator sasaran atau 6,85% (Cukup), 9 indikator sasaran atau 12,33% (kurang) dan 5 indikator sasaran kewenangannya pindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai **136,73 %** atau bermakna **Baik Sekali**. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 **Baik Sekali**.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada

indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Misi Kesatu : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia yang berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik.

Untuk merealisasikan misi kesatu, Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan sasaran strategis yakni meningkatnya aktivitas kehidupan beragama dan kesalehan sosial masyarakat serta toleransi antar dan intern umat beragama. Kehidupan beragama, kesolehan sosial, dan toleransi ditetapkan menjadi sasaran strategis mengingat bahwa Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah yang menjadi sentra pengembangan agama Islam di Indonesia. Daerah ini memiliki penduduk dengan berbagai macam ajaran agama/keyakinan, ada Islam, Kristen, Hindu, dan Budha. Aspek agama menjadi kekuatan dasar dan *driving force* dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan kesholehan sosial dan sikap toleransi, keberanekaragaman agama menjadi potensi pemersatu pembangunan. Namun demikian, pada sisi lain, kondisi ini memiliki potensi kerawanan sosial dan konflik horizontal berbasis suku, agama dan ras (sara) jika tidak dikelola dengan baik. Aspek toleransi untuk hidup bersanding secara damai menjadi hal penting untuk dikomunikasikan dengan berbagai komponen masyarakat agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan secara kondusif. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon memandang hal ini menjadi strategis bagi kondusivitas wilayah.

Untuk memotret pencapaian realisasi misi 1 ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menetapkan 9 indikator sasaran.

Tabel 3.3

Target dan Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Aktivitas Kehidupan Beragama, Keshalehan Sosial Masyarakat dan Toleransi antar dan Intern Umat Beragama.

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	%	Target 2019	Realisasi 2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Angka Melek Huruf	%	62	75.20	121.29	70	76	108,57

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	%	Target 2019	Realisasi 2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Alquran Lulusan SD/MI							
2	Angka Melek Huruf Alquran Lulusan SMP/MTs	%	52	55,71	107,13	75	75	100
3	Angka Melek Huruf Alquran Lulusan SMA/MA	%	66	Jadi Kewenangan Propinsi		80	Jadi Kewenangan Propinsi	
4	Angka Melek Huruf Alquran Lulusan SMK	%	73	Jadi kewenangan propinsi		80	Jadi Kewenangan Propinsi	
5	Jumlah Siswa Yang Hafal Juz Amma pada Pendidikan SLTP dan SLTA	%	5	Jadi kewenangan Propinsi		5	Jadi Kewenangan Propinsi	
6	Jumlah DKM yang menyelenggarakan kegiatan Ba'da Maghrib Mengaji	%	424	776	183,02	424	541	127,59
7	Jumlah Penghapal Alquran	Orang	1.105	171	15,48	1.216	1000	82,24
8	Prestasi Lomba Keagamaan Tingkat Provinsi Jawa Barat	Peringkat	5	7	71,43	5	7	71,43
9	Jumlah Kasus Konflik Yang Bernuansa Agama	Kasus	4	0	200	4	1	400
Rata-Rata					116,39			98,87

Dari tabel di atas, untuk indikator kinerja Sasaran Meningkatnya aktivitas kehidupan beragama, keshalehan sosial masyarakat dan toleransi antar dan intern umat beragama, terdapat 9 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja mencapai 98,87% dengan katagori **Baik** dimana lebih rendah dari rata-rata capaian tahun 2018 yang sebesar 116,39%. Pencapaian target kinerja pada Tahun 2019 ini karena beberapa hal berikut ini :

1. Budaya religius masyarakat Kabupaten Cirebon dalam menerapkan dan mempelajari aspek-aspek keagamaan;
2. Peran tokoh agama yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan seperti Nahdhatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan lembaga pendidikan keagamaan yang tidak berafiliasi kepada organisasi tersebut seperti Al-Bahjah dan lembaga pondok pesantren modern lainnya.

3. Adanya sinergitas dan kerjasama yang memadai dengan instansi dan lembaga swadaya masyarakat dalam menginisiasi dan mengintervensi program dan kegiatan yang menjadi indikator pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

Dari tabel di atas juga dapat diketahui ada satu indikator kinerja yang belum mencapai target yaitu indikator Jumlah Penghafal Alquran dan ada 3 (tiga) indikator yang pinda h kewenangan nya menjadi kewenangan propinsi hal ini dikarenakan oleh :

1. Sebagian besar lembaga keagamaan seperti majelis taklim, madrasah, kelompok pengajian dan pondok pesantren mengajarkan ilmu agama secara umum, sangat sedikit yang secara khusus pada pengkajian dan penghafal al-qur'an (tahfidz);
2. keterbatasan kemampuan untuk memantau dan menginisiasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan indikator kinerja pada satu indikator di atas;
3. Untuk meningkatkan angka melek huruf al qur'an para siswa perlu untuk diselenggarakan kurikulum ekstrakurikuler baca tulis al qur'an di seluruh satuan pendidikan dan diujikan diakhir masa pendidikan untuk mendapatkan sertifikat/ijazah kelulusan baca tulis al qur'an untuk dijadikan salah satu syarat untuk mendapatkan ijazah kelulusan dan nilai hasil UAN dan UAS.

Untuk mendorong pencapaian target yang belum tercapai, Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan sinergi dan peningkatan partisipasi lembaga-lembaga pendidikan berbasis keagamaan, serta mengintervensi dan menginisiasi program dan kegiatan untuk lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, majelis taklim, kelompok-kelompok pengajian, dan penerapan peraturan daerah tentang Madrasah Takmilyah Diniyah Awaliyah (MDTA) secara lebih tegas.

Misi Kedua : Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berbudaya, berilmu, dan berketerampilan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan kewirausahaan.

Tabel 3.4

Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	%	Target 2019	Realisasi 2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Indeks Pendidikan	%	84.33-85.60	68.09	80.74	85,67-86,67	78,66	91,82
2	Angka Melek Huruf (AMH) pada Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	%	95.37	95.53	100,17	95,23	95,53	100,32
3	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6.75	6.61	97.92	7,00	6,62	94,57
4	Angka Partisipasi Kasar <ul style="list-style-type: none"> ▪ SD/MI ▪ SMP/MTs ▪ SMA/MA 	%	109 110.11 80.98	117.05 115.08 91.58	107.38 104.51 113.09	109,00 110,11 81	116,52 122,27	106,90 111,04
5	Angka Partisipasi Murni <ul style="list-style-type: none"> ▪ SD/MI ▪ SMP/MTs ▪ SMA/MA ▪ SMK 	%	99.95 90.3 62.28 48.45	107.33 97.46 85.02 57.18	107.38 107.93 85.02 118.02	99,96 90,50 62,76 48,95	103,32 97,88	103,36 108,15
6	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Jumlah Penduduk per Usia Tingkatan Sekolah <ul style="list-style-type: none"> ▪ SD/MI ▪ SMP/MTs ▪ SMA/MA 	%	54 19 22	46.77 18.93 29.76	86.61 99.63 135.27	54,00 30,85	47,39 20,25	87,76 65,64
Rata-Rata					102.44			94,82

Tabel 3.4 di atas menggambarkan capaian atas sasaran Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua, dari tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian atas semua indikator kinerja yang masuk dalam sasaran ini adalah 94,82% atau masuk dalam katagori **Baik**, capaian ini lebih besar dari capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 yang memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 102.44%. Capaian indikator kinerja tertinggi diraih oleh Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) yang mencapai 108.15 % (Baik Sekali), dan Indikator Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Jumlah Penduduk Perusia Tingkatan Sekolah SMK yang mencapai 135,27 (baik sekali).

Ketidaktercapaian indikator kinerja pada sasaran ini dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut ini :

1. Banyaknya animo siswa Kabupaten Cirebon yang melanjutkan sekolah ke Kota Cirebon dan kabupaten atau kota lainnya.
2. Rawan *Drop Out* (DO) SD dan SMP yang lokasi rumah siswa jauh dari sekolah terutama dipedesaan dan Angka putus sekolah dan mengulang sekolah pada jenjang pendidikan SD dan SMP masih relatif tinggi;
3. Rasio guru dan murid belum mencapai kondisi yang ideal. Rasio antara guru dan murid di semua jenjang pendidikan mengalami fluktuasi dimana jumlah pertambahan murid tidak seimbang dengan pertambahan jumlah guru serta persebaran guru di Kabupaten Cirebon belum merata, apalagi ditambah dengan setiap tahunnya banyak guru yang pensiun namun tidak diikuti dengan penerimaan formasi CPNS guru;
4. Kualifikasi guru SD, SLB dan SMP masih kurang (guru SD dan SLB dibawah D-II, Guru SMP dibawah D-III), dan permasalahan pada pola perkembangan karier guru dalam pelaksanaan materi, rotasi maupun promosi;
5. Indeks pendidikan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini karena rendahnya rata-rata lama sekolah yang disebabkan banyak siswa pada jenjang pendidikan SD dan SMP mengalami putus sekolah dan rawan *drop out*;
6. Sarana prasarana belajar belum memadai, pelaksanaan materi lokal belum mantap serta serta Sistem pelaporan belum berjalan sebagaimana mestinya;
7. Jumlah Taman Kanak - Kanak masih kurang dan persebarannya tidak merata; dan

8. Belum tertampungnya siswa penyandang disabilitas di lembaga pendidikan luar biasa.

Solusi untuk menghilangkan penyebab ketidaktercapaian target kinerja di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk menampung siswa penyandang disabilitas perlu melakukan pendataan siswa penyandang disabilitas untuk mengetahui jumlah siswa penyandang disabilitas, memaksimalkan sekolah luar biasa yang ada, dan membentuk sekolah inklusi di tingkat kecamatan;
2. Untuk mengantisipasi banyaknya animo siswa Kabupaten Cirebon yang melanjutkan sekolah ke Kota Cirebon perlu melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasana sekolah yang memiliki standar internasional dan nasional, perlu meningkatkan kapasitas, kualitas dan kreativitas kompetensi para tenaga pendidik dalam hal pemberian materi pembelajaran dan pelatihan, serta penyusunan kurikulum pembelajaran atau mutu pembelajaran yang dapat merangsang motivasi belajar, kreativitas, dan perilaku yang baik atas dasar agama, sosial dan budaya para peserta didik sehingga mutu sekolah di Kabupaten Cirebon bisa bersaing dengan sekolah di luar Kabupaten Cirebon;
3. Untuk pemerataan distribusi guru di wilayah Kabupaten Cirebon perlu dilakukan upaya pemerataan guru dengan dilakukannya pendataan dengan sistem *on line* melalui aplikasi Dapodik;
4. Meningkatkan motivasi siswa miskin melalui peningkatan pelayanan (bantuan untuk siswa miskin dan berprestasi) dalam rangka mengurangi jumlah siswa putus sekolah;
5. Meningkatkan motivasi guru melalui peningkatan pelayanan dalam rangka meningkatkan kemampuan kompetensi guru ke jenjang pendidikan lebih tinggi;

6. Untuk perluasan memperoleh kesempatan belajar dilakukan melalui penajaman kurikulum/pokok bahasan yang dapat memberikan keleluasaan untuk dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK);
7. Perlu dilakukan revitalisasi rehabilitasi dan refungsionalisasi gedung sekolah;
8. Untuk perluasan memperoleh kesempatan pendidikan, masyarakat perlu diikutsertakan dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan termasuk dalam penyusunan program/kurikulum
9. Perlu dilakukan pengangkatan guru PNS baru dan Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan;
10. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
11. Meningkatkan profesionalisme guru agar mampu menjabarkan kurikulum dan rumusan tujuan yang lebih tajam/operasional, materi yang tepat (esensi) sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta kondisi lingkungan;
12. Meningkatkan kemampuan para guru untuk membuat dan memanfaatkan sumber belajar dan alat peraga/pendidikan yang ada dilingkungan sekitar, kecuali alat – alat yang sukar dibuat, perlu disediakan oleh pemerintah;
13. Menyusun dan melaksanakan standarisasi sarana dan prasarana serta memasyarakatkan, memelihara dan memanfaatkannya;
14. Perluasan dan penambahan program Paket A, Paket B dan Paket C;

15. Meningkatkan fungsi institusi dan pengisian lowongan kerja kepala sekolah, kepala urusan tata usaha di sekolah; dan Memantapkan pendekatan *School Based Management* dan *Community Based Management* melalui pemberdayaan institusi.

Tabel 3.5
Target dan Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	%	Target 2019	Realisasi 2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	66.38	66.04	99.49	67	71,84	107,22
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	Point	81.33	73.27	90.09	58,42	70,23	120,21
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	Point	3.92	29.76	759.18	2,4	2,62	109,30
4	Balita gizi buruk (BB/TB)	%	0.73	3.06	419.18	0,61	0,26	56,77
5	cakupan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin pada pelayanan dasar	orang	1.345.865	1.925.427	143.62	1.345.865	642.602	47,75
6	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	%	0.053	0.052	98.11	0,052	0,005	9,78
7	Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk	%	0.054	15.07	109.20	0,053	0,099	186,71
8	Jumlah puskesmas yang menyediakan pelayanan dokter anak dan kandungan	Unit	57	57	100	57	18	31,58
9	Rasio dokter terhadap penduduk	%	0.138	1,507	155.4	0,137	0,261	190,37
10	Rasio paramedis terhadap penduduk	%	1.516	1.682	110.95	1,574	0,916	58,23
11	presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	Orang	1.345.000	1.197.588	89.04	1.345.000	1.834.820	136,42
12	Jumlah Posyandu Purnama	Unit	692	1.495	216.04	769	1.529	198,83
Rata-Rata					199.19			103,28

Tabel di atas menggambarkan capaian indikator kinerja untuk sasaran Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, rata-rata capaian indikator kinerja tahun 2019 adalah 103,28% yang masuk dalam katagori **Baik Sekali**, dan mengalami penurunan capaian tahun 2018 yang sebesar 199,19%. Indikator kinerja yang belum melampaui target adalah Angka Kematian Bayi (AKB) yang memiliki selisih 33,02 dari dan target. Dan secara umum indikator kinerja pada sasaran ini pada katagori sangat baik.

Keberhasilan atas capaian indikator kinerja di atas, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga masih memiliki permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Tidak tercapainya target angka kematian bayi pada tahun 2019 disebabkan karena kurangnya kompetensi petugas dalam kegawatdaruratan neonatal di puskesmas, sehingga perlu upaya peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
2. Kurangnya tenaga medis dan paramedis sehingga kurang optimalnya pelayanan kesehatan di puskesmas, sehingga perlu adanya penerimaan CPNS untuk formasi tenaga medis dan paramedis.

Untuk menghilangkan penyebab atas permasalahan di atas, beberapa langkah dan solusi yang diambil diantaranya :

1. Menyusun formasi dan analisis kebutuhan serta pemenuhan atas kekurangan ASN untuk tenaga medis dan para medis di lingkungan Kabupaten Cirebon;
2. Perbaikan, pemeliharaan, peningkatan mutu, kualitas dan jumlah sarana dan prasarana kesehatan baik yang bersifat dasar maupun penunjang;
3. Pelayanan kesehatan masyarakat yang berbasis posyandu terus dikembangkan melalui peran serta masyarakat dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan bersih demi mewujudkan gerakan masyarakat yang mengarah pada sikap dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
4. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) merupakan langkah ampuh untuk menangkal penyakit. Namun dalam praktiknya, penerapan PHBS yang kesannya sederhana tidak selalu mudah dilakukan. Terutama bagi

mereka yang tidak terbiasa. Dalam hal ini, pendidikan dari keluarga sangat dibutuhkan;

- Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan aktif mengambil bagian dalam penyelenggaraan peningkatan kesehatan masyarakat. Sedangkan pemerintah terus memberikan fasilitas, membina, mendorong serta menggerakkan swadaya masyarakat di Bidang Kesehatan agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Tabel 3.6

Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya, Berketerampilan dan Berjiwa Kewirausahaan

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	%	Target 2019	Realisasi 2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah kawasan seni	Kawasan	1	1	100	1	1	100
2	Jumlah pertunjukan/pagelaran/festival budaya tingkat nasional	Kali	1	1	100	1	1	100
3	Cakupan peserta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (spm)							
	• Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis kompetensi	%	70	70.79	101.13	1.727	1.056	61,14
	• Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan kewirausahaan	%	70	78.79	112.56	480	368	76,66
	• Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	50	56.17	37.856	55	18.154	47,96
	• Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	70	70.77	101.10	36	19	52,78
	• Besaran Pekerja/buruh yang menjadi program jamsostek.	Orang	55	53.51	97.29	59.349	59.349	100
	• Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	50	Pindah Ke Provinsi	0	Pindah kewenangan ke Provinsi Jawa barat		
	• Besaran Pengujian peralatan di Perusahaan.	%	55	Pindah Ke Provinsi	0	Pindah kewenangan ke Provinsi Jawa barat		
	• Jumlah wirausahawan baru	Orang	100	180	180	160	180	112,50
	• Angka pengangguran terbuka	%	8,9	9.61	107.98	8,7	10,28	118,16
Rata-Rata					112.49			85,47

Dari tabel 3.6 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja tahun 2019 untuk sasaran terwujudnya masyarakat yang

berbudaya, berketerampilan dan berjiwa kewirausahaan adalah sebesar 85,47 (**Baik**), walaupun lebih kecil dari capaian kinerja tahun 2018 yang sebesar 112.49%.

Pada tahun 2019 ada dua indikator kinerja yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Besaran Pemeriksaan Perusahaan dan Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan.

Pada sasaran terwujudnya masyarakat yang berbudaya, berketerampilan dan berjiwa kewirausahaan ada satu indikator kinerja yang belum melampaui target yang telah ditetapkan yaitu Besaran Pekerja/buruh yang menjadi program jamsostek. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tahun 2019 dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Permasalahan yang dihadapi pada program peningkatan kesempatan kerja adalah tingginya tingkat pertumbuhan angkatan kerja baru dan arus migrasi masuk sehingga mengakibatkan tidak semua pencari kerja memperoleh pekerjaan dan rendahnya tingkat pendidikan formal mayoritas angkatan kerja di Kabupaten Cirebon sehingga berpengaruh pada produktivitas dan nilai tambah pekerja;
2. Program pendidikan dan pelatihan (training) teknis kompetensi ketenagakerjaan belum sepenuhnya cocok dengan kebutuhan perusahaan, serta masih terkendalanya pelaksanaan kegiatan training menyangkut kurikulum, kebutuhan teknis/instruktur dan anggaran berbanding jumlah angkatan kerja yang ada di Kabupaten Cirebon.
3. Belum optimalnya program-program yang dapat menginisiasi pembentukan semangat *entrepreneurship* para pada para pekerja dan kalangan remaja dan pemuda;
4. Dalam upaya pengembangan lembaga ketenagakerjaan masih belum optimalnya mekanisme kerja kelembagaan

ketenagakerjaan yaitu Tripartit, Dewan Pengupahan dan Serikat Pekerja/Buruh; dan

5. Sengketa atau perselisihan yang terjadi seringkali tidak memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja melalui mekanisme perjanjian bersama.

Dari permasalahan yang ada berikut ini adalah alternative solusi yang bias ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang ada, yaitu :

1. Melakukan kegiatan *job canvasing*, *job fair* dan sosialisasi kepada masyarakat.
2. Perlu adanya sertifikasi kompetensi.
3. Upaya yang perlu dilaksanakan secara langsung oleh Dinas adalah perlu adanya pelatihan *Mobile Training Unit* (MTU) dan pelatihan berbasis kompetensi, serta secara tidak langsung berupa *up grading* pengelolaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) melalui bimbingan teknis kepada Akreditur dan akreditasi LPK itu sendiri. TKI yang telah selesai masa kontrak kerjanya dan kembali ke daerah asal atau purna TKI sering kehilangan sumber pendapatan karena tidak mampu mengelola keuangan dengan baik. Dengan kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi purna TKI, setiap peserta dibekali pengetahuan memanfaatkan peluang berwirausaha agar mampu mandiri secara finansial.
4. Solusi yang dilaksanakan adalah memperluas akses informasi pasar kerja, baik kepada penyedia kerja maupun pencari kerja. Selain itu sebagai upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas, Disnakertrans perlu melaksanakan pelatihan bagi tenaga kerja penyandang cacat agar mampu bekerja dengan toleransi kecacatan tertentu.
5. Perlu upaya untuk membuat Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Cirebon.

6. Upaya perbaikan kondisi lembaga ketenagakerjaan yang dilakukan adalah melalui pembinaan terhadap lembaga ketenagakerjaan serta penciptaan hubungan harmonis di antara kelembagaan ketenagakerjaan.
7. Upaya fasilitasi pejabat fungsional pengawas Kenagakerjaan yang ada untuk melaksanakan kegiatan pemilihan pekerja teladan dan penilaian perusahaan terbaik mempekerjakan tenaga kerja perempuan.
8. Perlu meningkatkan pembinaan, koordinasi dan sosialisasi kepada perusahaan dan pekerja melalui bimbingan teknis, sosialisasi dan seminar tentang ketenagakerjaan.
9. Perlu penambahan pelatihan terhadap pencari kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dan wirausaha.
10. Penguatan Balai Latihan Kerja sebagaipusat pelatihan yang lengkap, modern dan inovatif yang mampu mencetak tenaga kerja terampil.

Tabel 3.7

Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai Daerah Wisata Berbasis Budaya

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	%	Target 2019	Realisasi 2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kunjungan wisatawan	%	10	49.45	494.50	1.303.966	1.486.241	113,98
Rata-Rata					494.50			113,98

Sasaran Terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai daerah wisata berbasis budaya yang memiliki satu indikator kinerja memiliki capaian kinerja 113,98% (Baik Sekali), capaian ini melebihi target 2019 yang hanya 10%, sedangkan capaian kinerjanya mencapai 494,50%. Capaian tahun ini juga lebih besar dari capaian tahun 2018 yaitu 494,50%. Meskipun berhasil melampaui target kinerja dengan sangat baik karena adanya pergeseran destinasi wisata dari Kota Bandung ke Daerah Cirebon serta karena akses jalan tol cipali yang mendukung aksesibilitas untuk mengunjungi Kabupaten Cirebon serta memudah mobiltas wisatawan

dalam melakukan perjalanan. Namun demikian, terkait dengan masalah ini ada permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon diantaranya adalah :

1. Kurangnya kreativitas manajemen kepariwisataan dalam mengkreasikan program dan even pariwisata di Kabupaten Cirebon;
2. Masih rendahnya dukungan dari pihak pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat terhadap even wisata, budaya dan kesenian yang dilaksanakan di Kabupaten Cirebon.

Menghadapi permasalahan di atas, alternatif pemecahan masalah yang ada adalah sebagai berikut :

1. Mensinergikan dan mengadaptasi kalender even pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Cirebon dengan kalender wisata instansi, badan atau lembaga lain misalnya Kementerian Pariwisata;
2. Mempromosikan kegiatan-kegiatan kepariwisataan, budaya dan kesenian yang ada di Kabupaten Cirebon secara lebih terkordinasi dan lebih massif dalam media informasi yang ada.

Tabel 3.8

Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Kemandirian Peningkatan Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	%	Target 2019	Realisasi 2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prestasi olahraga di tingkat Provinsi Jawa Barat	peringkat	8	7	100,89	-	-	-
Rata-rata					100,89			

Pencapaian rata-rata atas sasaran terwujudnya kemandirian peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga pada tahun 2018 sebesar 100,89 (**baik sekali**), pencapaian tahun tidak diselenggarakan POPDA dan PORDA. Ukuran peringkat dalam olahraga adalah untuk even

olahraga tingkat Provinsi Jawa Barat yaitu berupa POPDA dan Pekan Olahraga Daerah (PORDA).

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Cirebon adalah :

1. Terbatasnya utusan pemuda pelopor;
2. Belum adanya pola rekrutmen, pembinaan dan pencarian bibit (*talent scouting*) untuk pembinaan atlet usia dini serta adanya ancaman direkrutnya bibit atlet berbakat Kabupaten Cirebon oleh daerah lain;
3. Masih kurangnya sarana dan prasana yang representatif dan masih kurangnya instruktur untuk cabang olahraga prestasi;
4. Kurangnya komitmen penyedia jasa perbaikan dan pembangunan sarpras olahraga.

Untuk menyelesaikan permasalahan di atas berikut ini adalah solusi yang ada :

1. Melakukan koordinasi ke seluruh kecamatan agar mengirimkan utusan pemuda pelopor.
2. Membentuk dan membina instruktur cabang olahraga prestasi.
3. Pemberian penghargaan (*reward*) kepada bibit atlet berbakat Kabupaten Cirebon serta melakukan pembinaan secara berkelanjutan.

Misi Ketiga : Mendorong Pemerataan Pembangunan Tematik/Sektoral dan Wilayah Berdasarkan Potensi yang Tersedia.

Tabel 3.9

Target dan Capaian Indikator Sasaran Peningkatan Koneksitas antar Wilayah

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	%	Target 2019	Realisasi 2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Km	626.44	568.49	90.75	646,65	679,68	105,11

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	%	Target 2019	Realisasi 2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Jumlah panjang ruas jalan poros desa dalam kondisi baik	Km	449.91	451.26	100.30	Data sudah menjadi jalan Kabupaten	-	-
Rata-Rata					95.53			105,11

Koneksitas antar wilayah menjadi salah satu bagian penting untuk kelancaran distribusi barang, jasa dan mobilisasi orang. Koneksitas wilayah akan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Berdasarkan rata-rata hasil pencapaian target indikator kinerja tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah panjang jalan Kabupaten Cirebon dalam kondisi baik mencapai 105,11% (**Sangat Baik**).

Hasil pencapaian ini melebihi target yang telah ditetapkan. Sementara, hasil ini lebih besar dari rata-rata capaian tahun 2018 sebesar 95,53% (**Baik**). Ketidaktercapaian target kinerja tahun 2018 disebabkan oleh beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah :

1. Pertumbuhan prosentase kendaraan yang kurang terkendali dibandingkan jalan yang terus akan mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan dan kompetisi global;
2. Masih Kurangnya Kesadaran para pengguna jalan terutama kendaraan berat yang melebihi tonase yang mengakibatkan cepatnya tingkat kerusakan jalan;
3. Luas wilayah dan banyaknya ruas jalan yang tersebar diwilayah Kabupaten Cirebon;
4. Adanya diwilayah tertentu yang kondisi tanah dasarnya labil; dan
5. Kebiasaan buruk masyarakat yang membuang limbah cair ke area jalan.

Untuk mengatasi masalah ini ada beberapa pemecahan masalah atau solusi adalah :

1. Mengoptimalkan Potensi yang ada untuk infrastruktur jalan yang pada setiap tahunnya mengalami kenaikan dengan penajaman Data skala prioritas penanganan jalan dan melakukan peningkatan jalan dan pemeliharaan periodik jalan secara berkesinambungan;
2. Melakukan Koordinasi dengan Dinas/Instansi Terkait;
3. Mengoptimalkan Unit Pelayanan Teknis yang merupakan kepanjangan tangan dinas untuk mengatasi Luas wilayah dan banyaknya ruas jalan yang tersebar diwilayah Kabupaten Cirebon; dan
4. Memanfaatkan teknologi kontruksi yang ada seperti penggunaan teknologi betonisasi (*rigid pavement*) pada ruas-ruas jalan tertentu.

Tabel 3.10

Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Pembangunan Prasarana Wilayah yang Memadai

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	%	Target 2019	Realisasi 2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jaringan Irigasi							
	• Panjang Saluran Induk	Km	73.33	134.53	183.46	78,102	141,500	181,17
	• Panjang Saluran Sekunder	Km	37.26	22.97	85.59	39,464	30,113	76,30
	• Bangunan Jaringan Irigasi	Km	90	69	76.67	100	77	77,00
2	Jumlah rumah tangga berakses air minum untuk keperluan sehari-hari	Rumah tangga	150.320	482.814	321.19	210.700	482.814	229,15
3	Jumlah daerah rawan banjir	Desa	2	6	300	78	8	11,74
4	Persentase pengangkutan sampah	%	47	10	21.28	52	13	4,00
5	Persentase penduduk yg terlayani sistem jaringan drainase Skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	%	45	42.00	93.33	50	42.00	84,00
6	Persentase pengurangan sampah di perkotaan (daerah layanan persampahan)	%	30	18	60.00	20	2,4	8,33
7	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Unit	79	487.57	617.17	488.693	490.517	100,37
8	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten (pos jaga)	Pos jaga	13	9	69.23	14	1	25,00
Rata-Rata						199.65		63,10

Dari hasil pencapaian indikator kinerja di atas, rata-rata capaian indikator kinerja Sasaran Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai tahun 2019 adalah sebesar 63,10% (Cukup) sehingga pencapaian ini mengalami penurunan capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 199,65%, sementara untuk pencapaian terkecil adalah indikator pengurangan sampah perkotaan, hal ini menjadi perhatian pihak Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Meskipun secara rata-rata pencapaian indikator kinerja ini sangat baik, di bawah ini adalah permasalahan dan solusi yang dihadapi :

1. Menurunnya fungsi jaringan irigasi dan bangunan pelengkap, sehingga diperlukan perencanaan SDA secara terpadu dan berkelanjutan yang sesuai dengan tingkat kerusakan serta melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi dan bangunan pelengkap;
2. Kurangnya informasi dalam data base irigasi, maka perlu diadakan pembuatan data base secara menyeluruh dan update data base secara kontinyu;
3. Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya air, baik air permukaan maupun air tanah, sehingga diperlukan upaya konservasi SDA dengan mengadakan penanaman pohon disekitar wilayah aliran sungai;
4. Kurangnya pemahaman SDM dalam penyusunan Angka Kebutuhan Nyata Operasional dan Pemeliharaan (AKNOP), sehingga perlu dilakukan pendidikan dan bimbingan teknis terhadap juru dan petugas pintu air;
5. Meningkatnya daya rusak air, maka perlu dilakukan upaya preventif/ pencegahan dengan mengadakan konservasi SDA; mengadakan pembangunan cekdam dan bendung yang dapat mengendalikan serta mengatur aliran sungai untuk kepentingan irigasi; dan mewujudkan pengadaan bahan banjir seperti sand bag dan kawat bronjong untuk antisipasi penanganan darurat

pada daerah irigasi yang terkena banjir serta upaya repressive/penanganan dengan mengadakan pembangunan tebing saluran dan sarana dan prasarana pada saluran yang longsor akibat bencana maupun pembangunan saluran pembuang guna mengatasi genangan banjir;

6. Masih rendahnya partisipasi himpunan petani pemakai air terhadap pemeliharaan jaringan irigasi dan bangunan pelengkap, maka perlu dilakukan pembinaan kelembagaan himpunan petani pemakai air agar memiliki kepedulian untuk memelihara jaringan irigasi serta kemampuan teknis untuk melakukan perbaikan jaringan irigasi dan bangunan pelengkap;
7. Dengan terjadinya anomali cuaca, maka perlu dilakukan review Rencana Tata Tanam Global serta optimalisasi pemanfaatan embung yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon;
8. Terbatasnya sarana dan prasarana angkutan sampah dalam melayani wilayah pelayanan kebersihan yang cukup luas sehingga perlu adanya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kebersihan dan Persampahan;
9. Luasnya cakupan daerah pelayanan pengangkutan persampahan (kebersihan), sehingga perlu mengoptimalkan sumber daya yang ada (sarana dan prasarana, SDM dan anggaran) serta mendorong terciptanya upaya pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat (TPST 3R, Bank Sampah, Komposter Multy Drum).
10. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya (3R; *reuse, reduce and recyle*), sehingga perlu didorong dan difasilitasi terbentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pengelola sampah sebagai kader lingkungan di masyarakat.
11. Perilaku masyarakat yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya, maka perlu mengoptimalkan kegiatan

sosialisasi/*sharing*/diskusi tentang pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat sehingga terbentuk paradigma baru tentang pengelolaan sampah sebagai amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

12. Masih kurang pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait dengan kondisi rumah dan lingkungan yang rawan bencana kebakaran dan hubungan singkat listrik.

Tabel 3.11
Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Cirebon yang Bersih, Asri dan Lestari

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	%	Target 2019	Realisasi 2019	%
1	2	3	5	6		5	6	
1	Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah mandiri	Kelompok	8	13	162,5	8	2	25,00
2	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kec.	30	8,69	28,97	50	37,5	75,00
3	Prosentase kawasan lindung	%	30	2,43	8,1	30	2,43	8,10
4	Penghargaan Adipura	Kali	1	1	100	1	-	-
5	Jumlah sungai yang memenuhi kualitas baku mutu air	Sungai	5	5	100	5	7	140,00
6	Jumlah industri yang memenuhi kualitas baku mutu udara	Industri	20	18	90	25	303	1.212,00
7	Jumlah pengaduan kasus dugaan terjadinya pencemaran lingkungan	Aduan	12	1	8,33	12	1	8,33
Rata-Rata					69,98			292,07

Capaian rata-rata atas sasaran terwujudnya Cirebon yang bersih, asri dan lestari tahun 2019 adalah sebesar 292,07% (**Sangat Baik**) capaian ini lebih besar dari tahun 2018 yaitu 69,98%, dan capaian terkecil didapat oleh indikator Jumlah pengaduan kasus dugaan terjadinya pencemaran lingkungan yang hanya mencapai 8,33% (**kurang**).

Permasalahan dan solusi berkaitan dengan sasaran terwujudnya Cirebon yang bersih, asri dan lestari adalah :

1. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan, upaya yang dilakukan dengan sosialisasi dan

pembinaan secara terus menerus dalam pengelolaan lingkungan dan kebersihan lingkungan.

2. Masih kurangnya sarana pengelolaan sampah, maka ke depan diharapkan adanya penambahan sarana pengelolaan sampah.
3. Para pelaku usaha dan masyarakat masih belum sepenuhnya mengerti tentang kewajiban memiliki dokumen lingkungan, maka perlu ditingkatkan upaya sosialisasi kepada pihak yang berkompeten.
4. Tingginya kerusakan lingkungan sehingga jumlah lahan yang perlu dikonservasi sangat luas, hal ini tidak sebanding dengan jumlah pengadaan bibit yang ada, upaya yang dilakukan dengan kegiatan konservasi secara berkelanjutan.
5. Pelaksanaan penanaman pohon tergantung pada musim penghujan dan letak lokasi sumber mata air mayoritas jauh, maka penanaman dilakukan pada musim hujan menghindari resiko mati dan bantuan bibitnya (ukuran bibit) disesuaikan dengan jenis dan lokasi.
6. Peran serta kesadaran dari dunia usaha masih rendah dalam pengelolaan lingkungan hidup terutama dalam hal pelaksanaan penanaman pohon, manfaat dan kegunaannya, maka dilakukan kerjasama dengan masyarakat melalui perangkat desa dan dunia usaha untuk melaksanakan penanaman pohon sehingga diharapkan semua pihak ikut berperan merasa memiliki serta bertanggungjawab.
7. Informasi yang meliputi seluruh data yang terkait dengan kondisi lingkungan hidup belum sepenuhnya terpenuhi secara lengkap baik dari Kecamatan ataupun dari SKPD terkait, sehingga perlu diadakannya koordinasi yang lebih intensif terkait dengan pengumpulan informasi data dari pihak Kecamatan maupun SKPD terkait dalam mendukung

tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Cirebon.

8. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap RTH serta kurangnya lahan sebagai RTH di perkotaan, maka perlu adanya regulasi tentang RTH di perkotaan dan pembinaan dan himbauan tentang RTH.

Misi Keempat : Menciptakan Sinergi Pembangunan Secara Menyeluruh Antar Berbagai Pemangku Kepentingan (Pemerintah, Dunia Usaha, Akademik Dan Komunitas).

Tabel 3.12
Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	%	Target 2019	Realisasi 2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah komunitas	Komunitas	90	140	155,55	92	140	152,17
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	90	210	233,33	92	210	228,26
3	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan	Lembaga	339	349	102,95	424	349	82,31
Rata-Rata					163,92			154,25

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebesar 163,92 (**baik sekali**). Hal ini disebabkan revitalisasi dan peran serta PKK, pendampingan desa, dan pembentukan komunitas dalam masyarakat.

Meskipun pencapaian target pada sasaran ini telah tercapai akan tetapi masih ada permasalahan yang dihadapi dalam kelembagaan/institusional desa, diantaranya adalah :

1. Masih belum terpenuhinya komitmen dan kesepakatan bersama antara kepala desa dan perangkat desa untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga perlu untuk meningkatkan kapasitas individu maupun organisasi;

2. Belum berubahnya etos dan kedisiplinan kerja perangkat desa, sehingga diperlukan pendidikan dan pelatihan secara terus menerus dan sistematis dalam mengangkat kapasitas sekretaris desa khususnya tentang perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, penyusunan kebijakan desa, kepemimpinan desa, manajemen pelayanan desa dan pengambilan keputusan, serta diperlukan pengawasan secara melekat dari pihak kecamatan;
3. Pengurus LPMD/K masih belum maksimal memahami tugas pokok dan fungsinya, sehingga perlu dilakukan pembekalan dan pelatihan bagi pengurus LPMD/K;
4. Belum terbentuknya lembaga ekonomi secara menyeluruh di tiap-tiap desa yang berguna untuk meningkatkan PADes, sehingga perlu pendirian BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa;
5. Masih kurang optimalnya sumber daya manusia dalam pengurusan dan pengelolaan pasar desa, sehingga perlu adanya pelatihan bagi pengurus pasar desa.

Misi Kelima : Mewujudkan Standar Hidup Layak Masyarakat Melalui Pemenuhan Hak-Hak Dasar Terutama Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Penciptaan Rasa Aman, Damai dan Tenteram.

Tabel 3.13
Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kondisi Perekonomian Masyarakat

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	%	Target 2019	Realisasi 2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai PDRB	Rp (juta)	12.183.449	41.947.728	344,30	49.446.364	47.982.288	97,04
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5,50	5,05	91,82	5,55	5,08	91,57
3	PDRB per kapita	Rp/ kapita	19.590.887	19.424.048	99,15	21.568.345	15.315.423	71,01
4	Tingkat inflasi	%	3,5-4,5	2,69	76,86	3,5	2,00	57,14
5	Jumlah daerah rawan	Desa	8	6	75	7	7	100

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	%	Target 2019	Realisasi 2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	pangan							
6	Nilai investasi	Rp (Juta)	1.297.599	2.007.508	154.71	1.492.239.001.007	1.704.927.126.400	114,25
7	Persentase koperasi aktif	%	97	89.67	92.44	219	219	100
8	Jumlah lokasi wisata kuliner di kecamatan	Lokasi	8	53	662.5	8	25	312,5
Rata-Rata					199.60			117,94

Dari tabel di atas tergambar kondisi indikator makro perekonomian Kabupaten Cirebon, indikator kinerja di atas merupakan indikator untuk sasaran terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat, dari tabel di atas secara umum kondisi perekonomian kabupaten Cirebon mengalami peningkatan, hal ini terindikasi dari capaian kinerja tahun 2019 yang memiliki rata-rata 117,94% (Baik Sekali), menurun dari tahun sebelumnya yang berada di angka 199,60%.

Ada dua indikator kinerja yang masih belum mencapai target 2019, yaitu tingkat inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu terkait dengan kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan intansi baik daerah maupun pusat.

Beberapa permasalahan dan solusi antara lain :

1. Pelaksanaan pameran promosi investasi dan pariwisata belum didukung oleh sumber daya manusia yang professional serta belum terintegrasi dengan even investasi dan pariwisata dalam skala yang lebih besar;
2. Tingkat inflasi masih dipengaruhi oleh factor-faktor yang berasal dari luar daerah, dan beberapa komoditas memang sangat dipengaruhi oleh faktor ini, oleh sebab itu Tim Pengendali Inflasi Daerah belum berjalan secara optimal dan diperlukan sumber data perubahan jumlah dan harga komoditas pemengaruh nilai inflasi yang paling signifikan;

3. Lokasi produk unggulan daerah yang menjadi potensi ekonomi tersebar di 40 kecamatan, sehingga dalam pelaksanaan perlu dilakukan penjadwalan secara tertib.
4. Masih minimnya perusahaan PMA/PMDN yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), sehingga perlu ditingkatkan koordinasi yang optimal dengan instansi terkait.

Tabel 3.14
Target dan Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Lebih Berkualitas

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	%	Target 2019	Realisasi 2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menurunnya Jumlah penduduk miskin	Orang	12.12	12.97	107.01	2.963	2.963	100
2	Meningkatnya cakupan listrik bagi penduduk	%	100	87.10	87.1	100	87.10	87,10
Rata-Rata					97,05			93,55

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja untuk sasaran terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas menunjukkan kenaikan sebesar 93,55 (**Baik**), lebih menurun dari capaian tahun 2018 yang sebesar 97,05%.

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja sasaran terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas ini adalah :

1. Permasalahan struktur, artinya bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon masih belum optimal dan menunjukkan hasil capaian yang menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, hal ini dikarenakan kemungkinan adanya kelemahan dalam proses perencanaan dan keterbatasan sumber daya/anggaran untuk bisa menginisiasi dan mengintervensi program dan kegiatan yang mampu menurunkan angka kemiskinan yang signifikan.

2. Kemiskinan juga berhubungan dengan tingkat pendidikan masyarakat sehingga diperlukan program dan kegiatan kolaboratif yang mampu menekan angka kemiskinan;
3. Selain itu, masalah kemiskinan juga berhubungan dengan laju pertumbuhan penduduk dan jumlah angkatan kerja, tingkat pengangguran di daerah, maka perlu sinergitas antar beberapa stakeholder dan pengambil keputusan untuk bekerja sama lintas sektoral sehingga bisa menurunkan angka kemiskinan.

Berkaitan dengan masalah di atas ada beberapa solusi yaitu :

1. Menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Karena pengangguran adalah salah satu sumber penyebab kemiskinan terbesar;
2. Memberikan subsidi pada kebutuhan pokok manusia, sehingga setiap masyarakat bisa menikmati makanan yang berkualitas. Hal ini berdampak pada meningkatnya angka kesehatan masyarakat;
3. Meminimalisasi maladministrasi dan praktek administrasi public yang tidak sehat, karena kedua hal tersebut merupakan penyebab layanan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal inilah yang kemudian menjadikan masyarakat tidak bisa menikmati hak mereka sebagai warga negara sebagaimana mestinya;
4. Mendorong program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan filantropi seperti zakat infaq dan shodaqoh untuk menumbuhkan pemerataan kesejahteraan di antara masyarakat dan mengurangi kesenjangan kaya-miskin. Potensi zakat di indonesia, ditengarai mencapai angka 1 triliun setiap tahunnya. Dan jika bisa dikelola dengan baik akan menjadi potensi besar bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat;

5. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras.
6. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar;
7. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin :
 - a. Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah;
 - b. Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus;
 - c. Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat;
8. Selain yang diatas terdapat 4 strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu:
 - a. Menyempurnakan program perlindungan social;
 - b. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar;
 - c. Pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. Pembangunan yang inklusif.

Misi Keenam : Mewujudkan Tatanan Masyarakat dan Reformasi Sistem Birokrasi Menuju Sistem Berbangsa dan Bernegara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Tabel 3.15
Target dan Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Pelayanan
Publik yang Prima

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	%	Target 2019	Realisasi 2019	%
1	2	3	7	8	9	7	8	9
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	4.13	4.13	100	4,25	3,18	74,82
2	Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan SOP dan SPM	Unit	9	9	100	11	11	100
3	Kecamatan yang menjalankan Pelayanan administrasi Terpadu kecamatan (PATEN)	Kec.	30	40	133.33	40	40	100
Rata-Rata					111.11			91,61

Pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya pelayanan publik yang prima sebagaimana tercantum pada tabel di atas, sudah sepenuhnya mencapai target kinerja yang ditetapkan, rata-rata capaian kinerja yang dicapai adalah 91.61% (Baik), dari tabel diatas secara umum mengalami peningkatan pada indikator jumlah unit pelayanan yang melaksanakan SOP dan SPM dan kecamatan yang menjalankan Pelayanan administrasi Terpadu kecamatan (PATEN) target dan realisasi terpenuhi hal ini lebih baik dari capaian kinerja tahun 2018.

Berkaitan dengan kondisi di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh ASN kabupaten Cirebon, sehingga nilai IKM yang dicapai masih belum mencapai target yang ditetapkan;
2. Beberapa SKPD masih belum mengacu pada Standar Pelayanan Minimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga beberapa jenis pelayanan masih belum memenuhi prasyarat minimal yang harus dicapai;
3. Budaya masyarakat yang guyub dan gotong royong seringkali tidak sesuai dengan budaya profesionalisme ASN, masyarakat

seringkali mengungkapkan cara terima kasih yang kadang belum sesuai dengan peraturan dan kode etik ASN.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, berikut ini adalah beberapa solusi yang ditawarkan yaitu :

1. Optimilasaki dan revitalisasi pelayanan publik pada masyarakat melalui program dan kegiatan yang langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
2. Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) dan *standard operating procedure* (SOP) bagi setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon baik yang memiliki fungsi pelayanan mikro dan makro, langsung dan tidak langsung kepada masyarakat;

Tabel 3.16

Target dan Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	%	Target 2019	Realisasi 2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rasio pegawai S2 terhadap jumlah seluruh pegawai	%	3.4	3.66	107.65	3,7	3,7	100
2	Penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi/ latar pendidikan	%	100	81.84	81.84	96	88,42	92,10
Rata- Rata					94.75			96,05

Tabel di atas menggambarkan capaian kinerja sasaran meningkatnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah, mencapai rata-rata 95.05% (**Baik**), lebih besar dari capaian tahun 2018 sebesar 94.75% (**Baik**).

indikator kinerja Rasio pegawai S2 terhadap jumlah seluruh pegawai sudah tercapai dimana target yang ditentukan 3,7% sedangkan realisasinya 3,7% ditambah dengan jumlah anggaran yang memadai untuk program pendidikan S2 di tahun 2019 ini.

Sementara untuk indikator kedua pada sasaran di atas yaitu indikator Penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi/ latar

pendidikan disebabkan oleh kesenjangan antara kompetensi yang dipersyaratkan dengan jumlah ASN yang masih jauh dari mencukupi dan belum pada jumlah yang ideal. Permasalahan ini juga disebabkan oleh lebih banyak jumlah kotak jabatan daripada jumlah PNS yang ada, sehingga penempatan masih belum sesuai dengan kompetensi yang ada.

Atas kedua permasalahan di atas, beberapa solusi yang bisa ditawarkan :

1. Meningkatkan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk meningkatkan jenjang pendidikan formal bagi ASN Kabupaten Cirebon sesuai dengan target dan sasaran yang ada pada RPJMD 2014-2019;
2. Melakukan profiling, pemetaan dan evaluasi berkenaan dengan kompetensi yang dibutuhkan dan kompetensi yang dimiliki pegawai, kesenjangan (*gap*) yang ada nantinya dijadikan bahan dalam penyusunan analisis kebutuhan diklat.
3. Mengajukan usulan rekrutmen atau pengadaan PNS untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, sehingga jumlah ASN yang ada mendekati angka ideal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas administratif dan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.

Tabel 3.17

Target dan Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	%	Target 2019	Realisasi 2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rata-rata capaian kinerja SKPD	%	65-70	75	107.14	80	76	95
2	Penilaian RAD Pencegahan Penanggulangan Korupsi (PPK)	Angka/Huruf	51-75	52	69.33	52-75	90	120%
3	Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal	%	4	5.02	125.5	85	80	94
4	Peningkatan Pendapatan asli daerah	%	15	75.55	503.67	617.644	639.806	103,59
Rata-Rata					201.41			103,15

Peningkatan rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatnya tata pemerintahan yang baik dan bersih seperti pada tabel di atas adalah 103.15% (**Baik Sekali**), realisasi capaian kinerja tahun ini lebih baik dari tahun 2018 yaitu 111.1% (**Baik Sekali**).

Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan tata pemerintah yang baik dan bersih adalah

1. Masih rendahnya disiplin dan kinerja pegawai, antara lain, disebabkan oleh masih lemahnya fungsi pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintahan, belum sepenuhnya diterapkan sistem karier berdasarkan prestasi kerja, gaji yang belum memadai untuk hidup layak;
2. Pendidikan dan pelatihan (diklat) belum sepenuhnya dapat meningkatkan mutu kinerja;
3. Belum diterapkannya standar mutu pelayanan publik secara konsisten, belum memadainya sarana dan prasarana/fasilitas pelayanan, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*e-government*) dalam pemberian pelayanan, dan belum sepenuhnya diterapkan akuntabilitas kinerja;
4. ASN Kabupaten Cirebon masih belum dapat memenuhi harapan masyarakat dalam dapat memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, transparan, dan tidak diskriminatif;
5. Masih adanya struktur organisasi instansi pemerintahan yang masih cenderung kaya struktur dan miskin fungsi. Artinya, pembentukan unit-unit kerja struktural cenderung kurang proporsional dan efisien, serta kurang memberi peluang diterapkannya jabatan-jabatan fungsional yang relevan;
6. Masih lemahnya sinkronisasi tata hubungan kerja antara kementerian/ lembaga dan instansi pemerintah daerah, lemahnya sistem dan prosedur dalam melaksanakan manajemen

instansi pemerintahan, serta masih lemahnya pengelolaan dokumen dan kearsipan negara;

7. Semua permasalahan tersebut terutama disebabkan oleh belum dilaksanakannya fungsi-fungsi manajemen di lingkungan instansi pemerintahan secara benar dan konsisten.

Langkah-langkah kebijakan yang dilakukan diupayakan bersifat terobosan dan melanjutkan hal-hal yang relevan yang telah dilakukan.

1. Meminimalisasi praktek maladministrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui:
 - a. penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan kegiatan instansi pemerintahan;
 - b. pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku korupsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. peningkatan efektivitas pengawasan melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat serta tindak lanjut atas hasil pengawasan;
 - d. pembangunan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif, dan bertanggung jawab;
 - e. peningkatan pemberdayaan dan sinergi penyelenggara negara, dunia usaha, dan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah melalui:
 - a. penataan kembali kelembagaan pemerintahan daerah agar dapat berfungsi secara lebih efektif dan responsif dengan struktur yang lebih proporsional dan efisien;
 - b. peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan, termasuk prosedur kerja pada tingkatan dan kegiatan instansi pemerintahan daerah;

- c. penataan dan peningkatan kapasitas pegawai agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Cirebon;
 - d. peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi; dalam hal ini, terus dilakukan upaya peningkatan gaji pegawai secara proporsional, adil, dan layak;
 - e. optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan *e-government* dan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan.
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon, antara lain, melalui:
- a. peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama pelayanan dasar, pelayanan umum, dan pelayanan unggulan;
 - b. peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan mengawasi pelaksanaan aparatur pemerintahan, termasuk kinerja pelayanan publik; peningkatan transparansi, partisipasi, dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi.

2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Sampai dengan Akhir Periode RPJMD

Kemajuan pencapaian target jangka menengah adalah kemajuan pencapaian target kinerja tiap-tiap indikator kinerja dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD, sedangkan Capaian Kinerja jangka menengah adalah tahapan membandingkan antara Realisasi **sampai dengan** Tahun 2019 dibandingkan target lima tahunan.

Capaian kinerja jangka menengah yang merupakan tingkat kemajuan pencapaian target jangka menengah sebagai berikut:



No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian Kinerja 2018			% Capaian Kinerja 2019			% Capaian Kinerja RPJMD		
					Target 2018	Realisasi 2018	% Capaian Kinerja 2018	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian Kinerja 2019	Target RPJMD 2014-2019	Realisasi s/d 2019	% Capaian Kinerja RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	I	Meningkatnya aktivitas kehidupan beragama dan kesalehan sosial masyarakat serta toleransi antar dan intern umat beragama	a. angka Melek Huruf Al-Quran lulusan SD/MD	%	62	75.2	121.29	70	76	108,57	300	76	43.33
			b. angka Melek Huruf Al-Quran lulusan SMP	%	52	55.71	107.13	75	75	100	345	75	34.09
			c. angka Melek Huruf Al-Quran lulusan SMA	%	73	66,96	Pindah ke provinsi	80	-	-	375	-	35.71
			d. angka Melek Huruf Al-Quran lulusan SMK	%	73	66.96	Pindah ke provinsi	80	-	-	375	-	35.71
			e. jumlah siswa yang hafal jus'amma pada pendidikan SLTP dan SLTA	%	5	5	Pindah ke provinsi	5	-	-	25	-	40.00
			f. jumlah DKM yang menyelenggarakan kegiatan ba'da magrib mengaji	DKM	424	776	183.02	424	541	127,59	424	541	360.61
			g. jumlah penghafal Quran	orang	1.105	171	15.48	1.216	1000	82,24	5071	1000	6.78
			h. prestasi lomba keagamaan tingkat Propinsi Jawa Barat	peringkat	5	7	140.00	5	7	71,43	lima besar	7	6 besar
			i. jumlah kasus konflik yang bernuansa agama	kasus	4	0	200	4			6		33.33
			2	II	1. Terwujudnya pelayanan pendidikan untuk semua	a. peningkatan indeks pendidikan	%	84.33-85.60	68.09	80.74	85,67-86,67	78,66	91,82
b. Angka Melek Huruf (AMH) pada penduduk usia 15 tahun keatas	%	95.37				95.53	100.17	95,74	95,33	100,32	94.26	95,33	202.13
c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	6.75				6.61	97.92	7,00	6,62	94,57	7.35	6,62	197.41
d. Angka Partisipasi Kasar (APK)													
- SD/MI	%	109				117.05	107.38	130	116,52	106,90	114	116,52	198.56
- SMP/MTs	%	110.11				115.08	104.51	110,00	122,27	111,04	110.41	122,27	192.25
- SMA/MA	%	80.98				91.58	113.09	81	-	-	79.54	-	210.56
e. Angka Partisipasi Murni (APM)													

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian Kinerja 2018			% Capaian Kinerja 2019			% Capaian Kinerja RPJMD		
					Target 2018	Realisasi 2018	% Capaian Kinerja 2018	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian Kinerja 2019	Target RPJMD 2014-2019	Realisasi s/d 2019	% Capaian Kinerja RPJMD
			- SD/MI	%	99.95	107.33	107.38	99,96	103,32	103,36	99.92	103,32	203.77
			- SMP/MTs	%	90.3	97.46	107.93	90,50	97,88	108,15	89.7	97,88	192.05
			- SMA/MA	%	62.28	85.02	136.51	62,76	-	-	60.84	-	226.10
			- SMK	%	48.45	57.18	118.02	48,95	-	-	46.95	-	273.89
			f. Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per usia tingkatan sekolah										
			- SD	%	50	46.77	86.61	54	47,39	87,76	48	47,39	199.52
			- SMP	%	19	18.93	99.63	30,85	20,25	65,64	18	20,25	205.17
			- SMA/SMK	%	22	29.76	135.27	23	-	-	19	-	261.89
		2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	a. Angka Harapan Hidup (AHH)	tahun	66.38	66.04	99.49	67	71,84	107,22	65.98	71,84	200.50
			b. Ratio kematian ibu	point	81.33	73.27	90	76,29	70,23	120,21	95.92	70,23	163.97
			c. Ratio kematian bayi	point	3.92	29.76	759	2,4	2,62	109,30	4.17	2,62	809.35
			d. Balita gizi buruk	%	0.73	306	419	0,61	0,26	56,77	1.09	0,26	28085.32
			e. Cakupan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin pada pelayanan dasar	orang	1.345.865	1.925.427	143.62	1.345.865	642.602	47,75	1345865	642.602	244.49
			f. Rasio rumah sakit per satuan penduduk	%	0.053	0.52	98.11	0,052	0,005	9,78	0.055	0,005	1043.64
			g. Rasio puskesmas. klinik. puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk	%	0,054	9.2	109.2	0,053	0,099	186,71	0.027	0,099	34370.37
			h. Jumlah puskesmas yang menyediakan pelayanan dokter anak dan kandungan	unit	57	57	100	57	18	31,58	57	18	200.00
			i. Rasio dokter terhadap penduduk	%	0.138	1.507	155.4	0,137	0.261	190,37	0.142	0.261	1213.38
			j. Rasio paramedis terhadap penduduk	%	1.516	1.682	110.73	1,574	0.916	58,23	1,457	0.916	230.89
			k. presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan	orang	1.345.000	1.197.588	89.04	1.345.000	1.834.820	136,42	1345000	1.834.820	189.04

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian Kinerja 2018			% Capaian Kinerja 2019			% Capaian Kinerja RPJMD		
					Target 2018	Realisasi 2018	% Capaian Kinerja 2018	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian Kinerja 2019	Target RPJMD 2014-2019	Realisasi s/d 2019	% Capaian Kinerja RPJMD
			kesehatan										
			1. Jumlah Posyandu Purnama	unit	692	1.495	216.04	769	1.529	198,83	769	198,83	324.32
		3. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya, berketrampilan, dan berjiwa kewirausahaan	a. Jumlah kawasan seni	kawasan	1	1	100	1	1	100	-	100	100.00
			b. Jumlah pertunjukan/pagelaran/festival budaya tingkat nasional	kali	1	1	100	1	1	100	-	100	200.00
			c. Cakupan peserta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (SPM)										
			- Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis kompetensi	%	70	70.79	101.13	1.727	1.056	61,14	55	61,14	229.73
			- Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan kewirausahaan	%	70	78.79	112.56	480	368	76,66	55	76,66	291.67
			- Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	50	56.17	112.34	55	18.154	47,96	35	47,96	300.71
			- Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	70	70.77	101.1	36	19	52,78	45	52,78	247.56
			- Besaran Pekerja/buruh yang menjadi program jamsostek.	%	55	53.51	97.29	59			45		263.47
			- Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	55	Pindah Ke Provinsi		60	Pindah ke provinsi		40		0.00
			- Besaran Pengujian peralatan di Perusahaan.	%	60	Pindah Ke Provinsi		65	Pindah ke provinsi		45		0.00
		d. Jumlah wirausahawan baru	orang	100	180	180	160	180	112,50	500	112,50	100.00	
		e. Angka pengangguran terbuka	%	8.9	9.61	107.98	8,7		10,28	9.5	10,28	197.16	
		4. Terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai daerah wisata berbasis budaya	a. Meningkatnya kunjungan wisatawan	%	10	49.45	494.5	1.303.966	1.486.241	113,98	50	113,98	270.04
		5. Terwujudnya	a. Prestasi olah raga di	Peringkat	8	7	100.89	-	-	-	-	-	833.33

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian Kinerja 2018			% Capaian Kinerja 2019			% Capaian Kinerja RPJMD		
					Target 2018	Realisasi 2018	% Capaian Kinerja 2018	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian Kinerja 2019	Target RPJMD 2014-2019	Realisasi s/d 2019	% Capaian Kinerja RPJMD
		peningkatan peran pemuda dan prestasi olah raga	tingkat provinsi Jawa Barat										
	III	1. Peningkatan koneksitas antar wilayah	a. Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Kilometer	626.44	568.51	90.75	646,65	679,68	105,11	509.14	105,11	219.39
			b. Jumlah panjang ruas jalan poros desa dalam kondisi baik	Kilometer	449.91	451.26	100.3	Data sudah menjadi jalan kabupaten.	Data sudah menjadi jalan kabupaten.		359.91		244.98
		2. Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai	a. Jaringan irigasi										
			- Panjang saluran induk	Kilometer	73	135	183.46	78,102	141,500	181,17	58,995	181,17	252.47
			- Panjang saluran sekunder	Kilometer	37	23	85.59	39,464	30,113	76,30	30,666	76,30	74.99
			- Bangunan jaringan irigasi	%	90	69	76.67	100	77	77,00	50	77,00	292.00
			b. Jumlah rumah tangga berakses air minum untuk keperluan sehari-hari	rumah tangga	150.32	483	321.19	210.700			84,400		566.17
			c. Jumlah daerah rawan banjir	Desa	2	6	300	78	8	11,76	8	11,76	150.00
			d. Prosentase pengangkutan sampah	%	47	10	21.28	52	13	4,00	32	4,00	146.88
			e. Persentase penduduk yg terlayani sistem jaringan drainase Skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm. selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	%	45	45	93.33	50			150		56.00
			f. Persentase pengurangan sampah di perkotaan (daerah layanan persampahan)	%	30	18	60	20	2.4	8.33	39	8.33	102.56
			g. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	75	96.05	128.07	488.695	490.517	100,37	67	100,37	871.07
			h. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten (pos jaga)	Pos jaga	13	9	69,23	14	1	25,00	9	25,00	233,33

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian Kinerja 2018			% Capaian Kinerja 2019			% Capaian Kinerja RPJMD		
					Target 2018	Realisasi 2018	% Capaian Kinerja 2018	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian Kinerja 2019	Target RPJMD 2014-2019	Realisasi s/d 2019	% Capaian Kinerja RPJMD
		3. Terwujudnya Cirebon yang bersih. Asri dan lestari	a. Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah mandiri	Kelompok	8	13	162,5	8	2	25,00	42	25,00	50,00
			b. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kecamatan	30	8.69	28.97	50	37,50	75,00	40	75,00	71.73
			c. Prosentase kawasan lindung	%	30	2.43	8.1	30			30		16.20
			d. Penghargaan Adipura	kali	1	1	100	1	-	-	5	-	40.00
			e. Jumlah sungai yang memenuhi kualitas baku mutu air	sungai	5	5	100	5	7	140,00	25	140,00	40.00
			f. Jumlah industri yang memenuhi kualitas baku mutu udara	industri	20	18	90	25	303	1.212,00	75	1.212,00	44.00
			g. Jumlah pengaduan kasus dugaan terjadinya pencemaran lingkungan	pengaduan	12	1	8.33	12	1	8,33	60	8,33	21.67
IV	1. Terwujudnya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	a. Jumlah komunitas	komunitas	90	140	155.55	92			424		61.79	
		b. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	kelompok	90	210	233.33	92			424		98.11	
		c. Jumlah lembaga ekonomi pedesaan	lembaga	339	349	102.95	424			424		108.73	
V	1. Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	a. Nilai PDRB	Rp (dlm juta)	12.183.449	41.947.728	344.3	49.446	47.982	97,04	10,419,976	97,04	682.30	
		b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5,5	5.05	91.82	5,55	5,08	91,57	5.35	91,57	199.44	
		c. PDRB per kapita	Rp	19.590.887	19.424.048	99.15	21.568.345	15.315.423	71,01	14,765,489	71,01	255.40	
		d. Tingkat Inflasi	%	3.5-4.5	2.69	76.86	3,5-4,5	2.00	57,14	3.5-4.5	57,14	15.37	
		e. Jumlah Daerah rawan pangan	desa	8	6	75	7	7	100	45	100	33.33	
		f. Nilai Investasi	Rp (dlm juta)	1.297.599	2.007.508	154.71	1.492.239	1.704.927	114,25	853,192	114,25	334.47	
		g. Prosentase Koperasi aktif	%	97	89.67	92.44	219	219	100	88.42	100	202.83	

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian Kinerja 2018			% Capaian Kinerja 2019			% Capaian Kinerja RPJMD			
					Target 2018	Realisasi 2018	% Capaian Kinerja 2018	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian Kinerja 2019	Target RPJMD 2014-2019	Realisasi s/d 2019	% Capaian Kinerja RPJMD	
			h. Jumlah lokasi wisata kuliner di kecamatan	lokasi	8	53	662.5	8	25	312,5	40	312,5	142.50	
		2. Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas	a. Menurunnya jumlah penduduk miskin	%	12,12	12.97	107.01	2.963	2.963	100	11.65	100	227.12	
			b. meningkatnya cakupan listrik bagi penduduk	%	100	87.1	87.1	100				100		172.30
	VI	1. Terwujudnya pelayanan publik yang prima	a. Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	4,13	3.88	100	4,25	3,18	74,82	4.25	74,82	182.59	
				b. Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan SOP dan SPM	unit	9	9	100	11	11	100	30	100	53.33
				c. Kecamatan yang menjalankan Pelayanan administrasi Terpadu 3.kecamatan (PATEN)	Kecamatan	30	40	133.33	40	40	100	40	100	125.00
		2. Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	a. Rasio pegawai S2 terhadap jumlah seluruh pegawai	%	3.4	3.66	107.65	3,7	3,7	100	2.93	100	227.30	
			b. Penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi/ latar pendidikan	%	100	81.84	81.84	96	88,42	92,10	100	92,10	150.84	
		3. Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih	a. Rata-rata capaian kinerja SKPD	%	65-70	75	107.14	70-75	76	95	50-55	95	254.55	
			b. Penilaian RAD Pencegahan Penanggulangan Korupsi (PPK)	%	51-75	52	69.33	75	90	120	Baik	120	Baik	
			c. Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal	%	4	5.02	125.5	85	80	94	5	94	100.40	
			d. Peningkatan Pendapatan asli daerah	%	15	75.55	503.67	617.646	639.806	103.59	15	103.59	503.67	

B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan Berpedoman pada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi-strategi kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014–2019 diarahkan kepada :

- a. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan;
- b. Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja;
- c. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional;
- d. Meningkatkan peranserta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan strategi kebijakan fiskal tersebut di atas, maka kebijakan umum keuangan/anggaran RPJMD Kabupaten Cirebon 2018-2019 diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu : fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

- a. Fungsi alokasi, yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena bersifat publik services seperti penanganan prasarana dasar dan penyediaan infrastruktur;
- b. Fungsi distribusi, yaitu penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial, dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya;
- c. Fungsi stabilitasi, yaitu penganggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun 2016 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, pagu dan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

Tabel 3.18
Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019

Uraian	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Pendapatan Daerah	4.067.884.688.382,00	3.986.782.181.944,19	98,01%
Belanja Daerah	4.362.142.773.034,73	3.998.103.430.861,86	91,65%

Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Penerimaan yang Sah, pada Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp. 4.067.884.688.382,00 dan realisasi sebesar Rp. 3.986.782.181.944,19 (98,01%).

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.19
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	617.644.092.930,00	639.806.097.586,19	103,59%
2	Dana Perimbangan	2.286.225.194.387,00	2.186.136.771.963,00	95,62%
3	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.164.015.401.065,00	1.160.839.312.395,00	99,73%
Jumlah Pendapatan Daerah		4.067.884.688.382,00	3.986.782.181.944,19	98,01%

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp. 617.644.092.930,00 dan realisasi sebesar Rp. 639.806.097.586,19 (103,59%). Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.20
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Hasil Pajak Daerah	217.850.949.000,00	213.572.238.616,00	98,04%
2	Hasil Retribusi Daerah	41.298.590.975,00	42.841.103.005,00	103,74%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.844.449.579,00	12.990.615.843,00	131,96%
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	348.650.103.376,00	370.402.140.122,19	106,24%
Jumlah Pendapatan Daerah		617.644.092.930,00	639.806.097.586,19	103,59%

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus ditargetkan sebesar Rp. 2.286.225.194.387,00 dan realisasi/penerimaan sebesar Rp. 2.186.136.771.963,00 atau (95,62%).

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Dana Perimbangan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.21
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2019

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	114.902.812.801,00	74.858.070.080,00	65,15 %
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.591.969.932.000,00	1.563.639.127.000,00	98,22 %
3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	579.352.449.586,00	547.639.574.883,00	94,53%
Jumlah Dana Perimbangan		2.286.225.194.387,00	2.186.136.771.963,00	95,62 %

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya tahun anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp. 1.164.015.401.065,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.160.839.312.395,00 atau (99,73%).

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.22
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun 2019

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
1	Pendapatan Hibah	222.853.200.000,00	221.895.600.000,00	99,57%
2	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 2)	287.744.801.065,00	294.592.460.792,00	102,38%
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	461.115.736.000,00	461.115.736.000,00	100,00%
4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	192.301.664.000,00	183.235.515.603,00	95,29%
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		1.164.015.401.065,00	1.160.839.312.395,00	99,73%

Belanja Daerah Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp. **4.362.142.773.034,73** dengan realisasi sebesar Rp. **3.998.103.430.861,86** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung ditargetkan sebesar Rp. 2.350.259.010.061,73 dengan realisasi sebesar Rp. 2.203.974.289.016,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.011.883.762.973,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.794.129.141.845,86 sehingga ada penghematan sebesar Rp. 217.754.621.127,14.

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Belanja Daerah tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.23**Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018**

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
1	Belanja Tidak Langsung	2.350.259.010.061,73	2.203.974.289.016,00	93,78%
2	Belanja Langsung	2.011.883.762.973,00	1.794.129.141.845,86	89,18%
Jumlah Belanja Daerah		4.362.142.773.034,73	3.998.103.430.861,86	91,65%

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan, dalam Laporan ini dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, merupakan Anggaran yang digunakan secara langsung untuk program pembangunan.

2. Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Barat Nomor : 29.A/LHP/XVIII.BDG/05/2017 tanggal 29 Mei 2017, BPK RI Perwakilan Jawa Barat memberikan **Opini Wajar Tanpa Pengecualian** (WTP) atau *unqualified opinion* adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material dan menerapkan system pengendalian intern yang memadai.

Dengan pemberian opini WTP pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Cirebon, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi

keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.



4

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2019 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD tahun 2014-2019.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Cirebon telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Cirebon yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019. Pada Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menetapkan 16 sasaran dengan 73 indikator sasaran yang terbagi atas 9 indikator untuk Misi 1, 25 indikator untuk Misi 2, 17 indikator untuk Misi 3, 3 indikator untuk Misi 4, 10 indikator untuk misi 5, 9 indikator untuk misi 6.

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 15 sasaran yang mencakup 73 indikator sasaran, diketahui bahwa 40 indikator sasaran atau 54,79 % Baik Sekali, 14 indikator sasaran atau 19,18 % Baik, 5 indikator sasaran atau 6,85% Cukup, 9 indikator sasaran atau 12,33% kurang dan 5 indikator sasaran kewenangannya pindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai **136,73%** atau bermakna **Baik Sekali**. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 **Baik Sekali**.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama, secara umum capaian kinerja masing-masing sasaran dalam kategori Sangat Berhasil. Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung adanya kerja sama yang sinergis dari seluruh jajaran Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait.

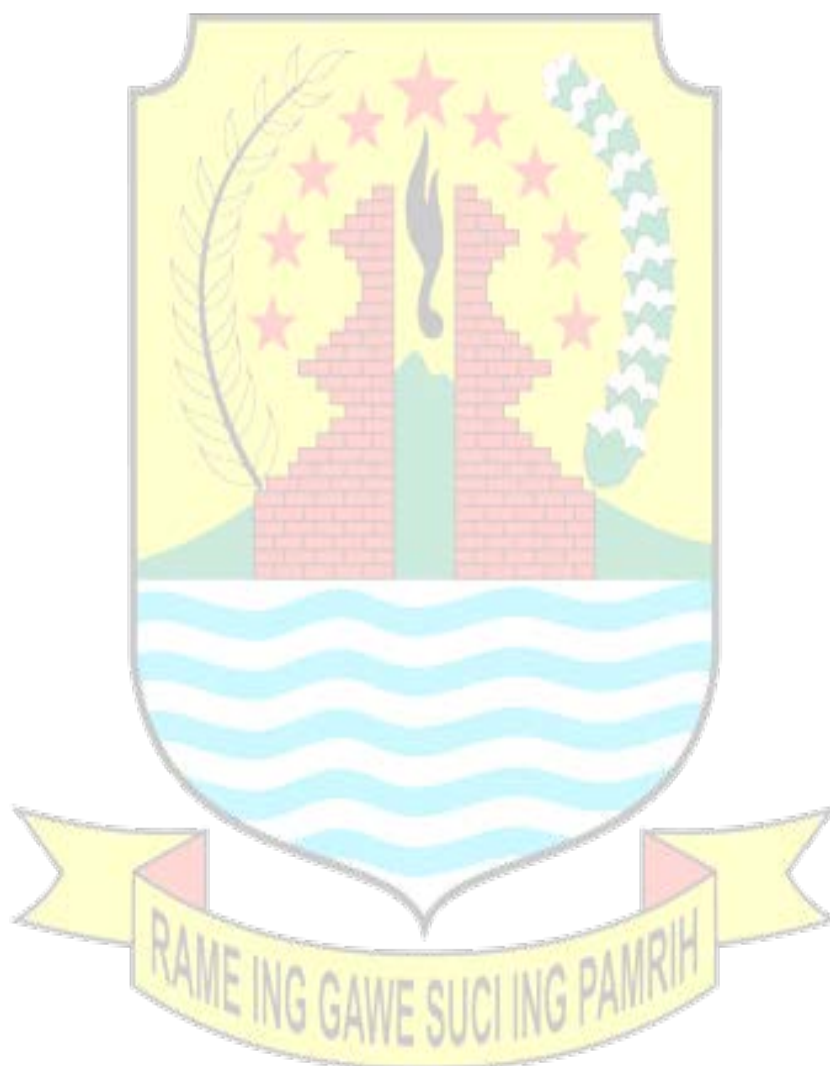
Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja telah dilakukan analisis dan evaluasi, sehingga diketahui langkah-langkah strategis yang dilaksanakan dalam meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

B. Rencana Tindak Lanjut

Mencermati hasil pencapaian kinerja Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Cirebon akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Mengupayakan prioritas alokasi anggaran berbasis prioritas program dan kegiatan dengan semangat efisiensi dan efektivitas untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang belum memenuhi target dan meningkatkan pencapaian hasil yang sudah memenuhi target.
2. Mengupayakan sistem perencanaan dan pengendalian yang lebih transparan dan akuntabel pada setiap satuan kerja perangkat daerah.
3. Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama daerah yang telah ditetapkan.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menyusun dan merumuskan target dan indikator kinerja program dan kegiatan.
5. Mendorong masyarakat/komunitas, dunia akademik, dan dunia usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
6. Menekan angka putus sekolah melalui peningkatan Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar.
7. Perluasan pelayanan kesehatan melalui peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon yang menggambarkan Capaian Kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada Tahun 2019 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Cirebon.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



BELANJA BERDASARKAN URUSAN TAHUN 2019

KODE			SKPD	TARGET	TOTAL REALISASI	%	TARGET BTL	REALISASI BTL	%	TARGET BL	REALISASI BL	%
1.			URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR									
1.	01.	01	DINAS PENDIDIKAN	1.346.497.589.500,00	1.303.352.052.979,00	96,80	1.006.481.326.500,00	987.084.645.411,00	98,07	340.016.263.000,00	316.267.407.568,00	93,02
1.	02.	01	DINAS KESEHATAN	561.224.733.501,00	450.350.727.630,00	80,24	148.657.698.300,00	139.532.844.556,00	93,86	412.567.035.201,00	310.817.883.074,00	75,34
1.	02.	02	RSUD WALED	173.397.693.745,00	160.697.525.494,00	92,68	27.902.664.000,00	26.860.144.595,00	96,26	145.495.029.745,00	133.837.380.899,00	91,99
1.	02.	03	RSUD ARJAWINANGUN	161.489.023.630,00	159.492.984.710,86	98,76	32.004.005.500,00	30.642.707.004,00	95,75	129.485.018.130,00	128.850.277.706,86	99,51
1.	03.	01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	346.129.794.246,00	318.164.305.550,00	91,92	26.031.311.500,00	23.052.995.201,00	88,56	320.098.482.746,00	295.111.310.349,00	92,19
1.	04.	01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	157.671.361.440,00	142.227.264.380,00	90,20	6.837.544.500,00	6.296.637.485,00	92,09	150.833.816.940,00	135.930.626.895,00	90,12
1.	05.	01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	23.380.461.450,00	21.448.333.345,00	91,74	9.024.988.500,00	7.722.933.173,00	85,57	14.355.472.950,00	13.725.400.172,00	95,61
1.	05.	02	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	18.023.777.065,00	16.794.373.487,00	93,18	7.603.423.500,00	7.092.899.133,00	93,29	10.420.353.565,00	9.701.474.354,00	93,10
1.	06.	01	DINAS SOSIAL	26.568.596.656,00	24.759.429.637,00	93,19	4.717.757.500,00	3.994.285.339,00	84,66	21.850.839.156,00	20.765.144.298,00	95,03
TOTAL				2.808.579.578.875,00	2.597.286.997.212,86	92,48	1.269.260.719.800,00	1.232.280.091.897,00	97,09	1.545.122.311.433,00	1.365.006.905.315,86	88,34
2.			URUSAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR									
2.	01.	01	DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	14.268.142.587,00	3.741.964.885,00	96,31	5.993.928.000,00	5.617.919.390,00	93,73	8.274.214.587,00	8.124.045.495,00	98,19
2.	03.	01	DINAS KETAHANAN PANGAN	8.562.369.983,00	7.633.471.695,00	89,15	3.590.092.000,00	3.330.057.932,00	92,76	4.972.277.983,00	4.303.413.763,00	86,55
2.	05.	01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	41.645.902.922,00	38.192.802.564,00	91,71	5.610.474.500,00	5.159.481.583,00	91,96	36.035.428.422,00	33.033.320.981,00	91,67
2.	06.	01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	19.142.235.680,00	17.580.079.758,00	91,84	7.585.944.000,00	7.156.592.237,00	94,34	11.556.291.680,00	10.423.487.521,00	90,20
2.	07.	01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.242.418.496,00	9.583.321.240,00	93,57	3.605.369.000,00	3.284.849.909,00	91,11	6.637.049.496,00	6.298.471.331,00	94,90
2.	08.	01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN	31.550.396.232,00	28.974.661.160,00	91,84	11.400.993.500,00	9.492.514.448,00	83,26	20.149.402.732,00	19.482.146.712,00	96,69
2.	09.	01	DINAS PERHUBUNGAN	64.194.628.044,00	58.249.391.164,00	90,74	7.850.182.000,00	7.269.272.924,00	92,60	56.344.446.044,00	50.980.118.240,00	90,48
2.	10.	01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	20.413.696.700,00	19.156.683.198,00	93,84	3.672.161.500,00	3.414.828.190,00	92,99	16.741.535.200,00	15.741.855.008,00	94,03

2.	11.	01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.783.630.600,00	6.004.780.188,00	88,52	5.993.928.000,00	2.758.121.314,00	89,54	3.703.158.100,00	3.246.658.874,00	87,67
2.	12.	01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8.751.382.416,00	8.297.151.430,00	94,81	3.590.092.000,00	4.804.068.102,00	93,72	3.625.631.416,00	3.493.083.328,00	96,34
2.	16.	01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	23.257.894.661,00	21.804.882.538,00	93,75	5.610.474.500,00	5.050.968.609,00	92,39	17.790.975.161,00	16.753.913.929,00	94,17
2.	18.	01	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	10.061.806.612,00	9.312.182.981,00	92,55	7.585.944.000,00	5.524.671.338,00	91,27	4.008.918.112,00	3.787.511.643,00	94,48
TOTAL				258.874.504.933,00	228.531.372.801,00	88,28	72.089.583.000,00	62.863.345.976,00	87,20	189.839.328.933,00	175.668.026.825,00	92,54
3.			URUSAN PILIHAN									
3.	01.	01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	11.792.234.150,00	10.837.772.573,00	91,91	4.192.553.000,00	3.807.883.784,00	90,82	7.599.681.150,00	7.029.888.789,00	92,50
3.	03.	01	DINAS PERTANIAN	52.281.365.143,00	45.453.243.280,00	86,94	28.327.956.000,00	23.648.743.116,00	83,48	23.953.409.143,00	21.804.500.164,00	91,03
3.	06.	01	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	36.560.597.658,00	34.081.104.306,00	93,22	9.554.901.000,00	8.567.546.777,00	89,67	27.005.696.658,00	25.513.557.529,00	94,47
TOTAL				100.634.196.951,00	90.372.120.159,00	89,80	42.075.410.000,00	36.024.173.677,00	85,62	58.558.786.951,00	54.347.946.482,00	92,81
4.			URUSAN FUNGSI PENUNJANG									
4.	01.	01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	18.887.919.850,00	16.650.387.699,00	88,15	6.506.132.000,00	6.042.914.001,00	92,88	12.381.787.850,00	10.607.473.698,00	85,67
4.	02.	00	PPKD	766.764.059.911,73	679.380.871.059,00	88,60	766.764.059.911,73	679.380.871.059,00	88,60	-	-	-
4.	02.	01	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	21.713.387.208,00	19.858.436.975,00	91,46	6.528.137.000,00	6.093.540.676,00	93,34	15.185.250.208,00	13.764.896.299,00	90,65
4.	02.	02	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	30.062.999.800,00	26.465.490.876,00	88,03	17.807.467.950,00	16.062.364.333,00	90,20	12.255.531.850,00	10.403.126.543,00	84,89
4.	03.	01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	25.250.379.140,00	22.239.350.732,00	88,08	7.326.798.500,00	6.868.316.433,00	93,74	17.923.580.640,00	15.371.034.299,00	85,76
4.	05.	01	INSPEKTORAT	21.728.773.900,00	18.005.486.914,00	82,86	11.212.320.000,00	10.479.283.790,00	93,46	10.516.453.900,00	7.526.203.124,00	71,57
4.	06.	00	DPRD									
4.	06.	01	SEKRETARIAT DPRD	80.332.969.975,00	71.891.648.701,00	89,49	35.001.505.400,00	32.053.390.618,00	91,58	45.331.464.575,00	39.838.258.083,00	87,88
4.	07.	00	KDH/WAKIL KDH	845.352.000,00	815.521.645,00	96,47	845.352.000,00	815.521.645,00	96,47	-	-	-
4.	07.	01	SEKRETARIAT DAERAH	70.013.056.896,00	64.840.242.028,00	92,61	18.377.408.500,00	16.904.014.277,00	91,98	51.635.648.396,00	47.936.227.751,00	92,84

**CASCADING RPJMD
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	SKPD Penanggung Jawab	Program
	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon yang agamis, maju, adil, sinergi, dan sejahtera	Meningkatkan kualitas SDM yang berakhlak mulia yang berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik	Membentuk sumber daya manusia yang memiliki integritas (jati diri), sikap dan perilaku yang berlandaskan nilai- nilai agama, jujur dan bertakwa	1 Meningkatnya aktivitas kehidupan beragama dan kesalehan sosial masyarakat serta toleransi antar dan intern umat beragama	Bagian Kesra Sekretariat Daerah	Program-Program Bidang Agama 1 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 2 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 3 Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Kerukunan Umat Beragama 4 Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan
		Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berbudaya, berilmu, dan berkecakupan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan kewirausahaan	Meningkatkan derajat SDM yang sehat, berbudaya, berilmu, berkecakupan dan berdaya saing	1 Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	Dinas Pendidikan	Program-Program Bidang Pendidikan 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3 Program Pendidikan Menengah 4 Program Pendidikan Non Formal dan Informal 5 Program Peningkatan Mutu pendidik dan tenaga kependidikan 6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program-Program Bidang Perpustakaan 1 Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
				2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan RSUD Waled RSUD Arjawinangun	Program-Program Bidang Kesehatan 1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3 Program Pengawasan Obat dan Makanan 4 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 5 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 8 Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) 9 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 10 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 11 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru /rumah sakit mata 12 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru /rumah sakit mata 13 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 14 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 15 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 16 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 17 Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 18 Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) 19 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program-Program Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1 Program Keluarga Berencana 2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 3 Program pelayanan kontrasepsi 4 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
						5 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

No	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	SKPD Penanggung Jawab	Program
						6 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling Kesehatan reproduksi Remaja (KRR)
					BP3A	7 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyandang Masalah Sosial dan HIV/AIDS 8 Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan pembinaan Tumbuh kembang anak 9 Program Penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga Program-Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak: 1 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 3 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 4 Program Kota Layak Anak
			3 Terwujudnya masyarakat yang berbudaya, berkecakupan dan berjiwa kewirausahaan	Disbudparpora Disnakertrans Disnakertrans		Program-Program Bidang Kebudayaan 1 Program Pengembangan Nilai Budaya 2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Program-Program Bidang Ketenaga Kerjaan : 1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 3 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program-Program Bidang Ketransmigrasian 1 Program pengembangan wilayah transmigrasi 2 Program Transmigrasi Lokal
			4 Terwujudnya kabupaten Cirebon sebagai daerah wisata berbasis budaya	Disbudparpora		Program-Program Bidang Pariwisata 1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3 Program Pengembangan Kemitraan
			5 Terwujudnya kemandirian dan peningkatan peran pemuda serta budaya dan prestasi olahraga	Disbudparpora		Program-Program Bidang Kepemudaan dan Olahraga 1 Program peningkatan peran serta kepemudaan 2 Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda 3 program peningkatan peran serta kepemudaan 4 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 5 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 6 Program pengembangan kebijakan manajemen olahraga 7 Program Pembinaan dan Pemasarakan Olah Raga 8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
		Mendorong pemerataan pembangunan tematik/sektoral dan kewilayahan berdasarkan potensi yang tersedia	Meningkatkan pemerataan pembangunan sektoral dan kewilayahan	1 Peningkatan koneksitas antar wilayah	Dishub	Program-Program Bidang Perhubungan : 1 Program peningkatan pelayanan angkutan umum 2 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 3 Program pembangunan Prasarana dan Fasilitas perhubungan 4 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 5 Program Peningkatan Kelangkaan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
				2 Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai	Dinas PUPR	Program-program Bidang Pekerjaan Umum 1 Program pembangunan jalan-jalan dan jembatan 2 Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan
						3 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya

No	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	SKPD Penanggung Jawab	Program
					Disperdagin	5 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program-program Bidang Industri 1 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 2 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
					Dinas Pertanian	4 Program Penataan Struktur Industri 5 Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial 6 Program pembinaan industri 7 Program pengembangan Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Perusahaan Daerah 8 Program pengembangan industri kecil dan menengah Program-program Bidang Pertanian: 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 3 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 4 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 5 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 6 Program peningkatan produksi hasil peternakan 7 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 8 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 9 Program peningkatan Infrastruktur pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan 10 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau 11 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan
					Dinas LH	Program-program Bidang Kehutanan 1 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 2 Program Rehabilitasi hutan dan lahan 3 Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 4 Program pengendalian alih fungsi lahan
					Disperdagin	Program-program Bidang Perdagangan: 1 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 2 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional 3 Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor 4 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 5 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 6 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 7 Program Kebijakan Pengendalian dan Pemanfaatan Penerimaan Pajak Rokok 8 Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah 9 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
					Diskanla	10 Program Peningkatan Usaha Perusahaan daerah 11 Program Pengembangan SDM Badan Usaha Daerah Program-program Bidang Kelautan dan Perikanan 1 Program peningkatan kapasitas kelautan dan perikanan 2 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 3 Program pembinaan dan pengembangan mutu hasil perikanan
						4 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan/pesisir
						5 Program peningkatan manajemen usaha kelautan dan perikanan 6 Program pengendalian hama dan penyakit ikan 7 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

No	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	SKPD Penanggung Jawab	Program
						8 Program pengembangan budidaya perikanan 9 Program pengembangan perikanan tangkap 10 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 11 Program pengelolaan pelabuhan perikanan dan alur lalu lintas kapal perikanan 12 Program peningkatan produksi benih ikan 13 Pengembangan sistem penyuluhan perikanan
					Dinas Ketahanan Pangan DPMPSTSP	14 Program Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan UPT Laboratorium Perikanan 15 Program Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dan Alur lalu Lintas Kapal Perikanan 16 Program Pembinaan dan Pengembangan Mutu Hasil Perikanan 17 Program Peningkatan Produksi Benih Ikan UPT Benih Ikan 18 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat diWil Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 19 Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan 20 Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan 21 Program Pengolahan Sumberdaya Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 22 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 23 Program Pengembangan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Program-program Bidang Ketahanan Pangan 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Program-program Bidang Penanaman Modal 1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 3 Program Penyiapan Potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 4 Program Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal 5 Program Peningkatan Kualitas pelayanan Perizinan 6 Program Penanganan pengaduan Bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
			2 Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas		Dinsos	Program-Program Bidang Sosial 1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 2 Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial 3 Program Pembinaan Anak Terlantar 4 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 5 Program pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 6 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya) 7 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (pendayagunaan dan pemberdayaan PSKS) 8 Program peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosial masyarakat
						9 Program Pengembangan Data dan Informasi Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial
					Dinas LH	10 Program pembinaan pengembangan dan peningkatan kapasitas lembaga dan pelaku kesejahteraan sosial 11 Program Pengentasan Kemiskinan Program-program Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: 1 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 2 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

No	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	SKPD Penanggung Jawab	Program
						3 Program Pengawasan dan Penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
				3 Terpuhinya akses seluruh masyarakat terhadap infrastruktur permukiman layak	Dinas Kimrum	Program-Program Bidang perumahan dan pemukiman: 1 Program pengelolaan bangunan gedung/rumah negara 2 Program pemberdayaan komunitas perumahan 3 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 4 Program pengelolaan areal permakaman 5 Program pembangunan rusunawa 6 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
		Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)	Mewujudkan reformasi sistem birokrasi	1 Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Bapelitbangda Diskominfo Dinas Kimrum Diskominfo Dinas Arpusda Badan Kesbangpol	Program-Program Bidang Perencanaan Pembangunan 1 Program pengembangan data/informasi perencanaan 2 Program Kerjasama Pembangunan 3 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 4 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh dan cepat tumbuh 5 Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 6 Program perencanaan pembangunan daerah 7 Program perencanaan pembangunan ekonomi 8 Program perencanaan sosial budaya 9 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 10 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 11 Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Program-Program Bidang Komunikasi dan Informatika 1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2 Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 3 Program fasilitas Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 4 Program kerjasama informasi dan media masa lokal dan nasional Program-program Bidang Pertanahan : 1 Program penataan penguasaan, kepemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah 2 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Program-program Bidang Statistik 1 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Program-program Bidang Kearsipan : 1 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 2 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 3 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 4 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 5 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan yang Terpadu Program-program Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
						2 Program pemeliharaan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dan tindakan kriminal 3 Program pengembangan wawasan kebangsaan
					Disdukcapil	4 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 5 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) 6 Program pendidikan politik masyarakat 7 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 8 Program Dukungan Kelancaran 9 Fasilitasi Organisasi / lembaga politik dan kemasyarakatan Program-program Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	SKPD Penanggung Jawab	Program
						1 Program pendataan dan perkembangan kependudukan 2 Penataan administrasi kependudukan 3 Program pelayanan pencatatan sipil 4 Program peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan 5 Program Penyelenggaraan SIAK On Line
				2 Meningkatnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Sekretariat Daerah Inspektorat BKPSDM BKAD Kecamatan	Program-Program Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 2 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 3 Program kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 5 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 6 Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa 7 Program Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan 8 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 9 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 10 Program pengentasan kemiskinan 11 Program Penataan Aset Daerah 12 Program Pengembangan BUMD 13 Program pengembangan kebijakan pemerintah 14 Program penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah 15 Program penataan ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah 16 Program penataan pendayagunaan aparatur daerah 17 Program pendidikan kedinasan 18 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 19 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 20 Program Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 21 Program peningkatan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang hukum dan HAM 22 Program peningkatan administrasi dan pengelolaan barang daerah 23 Program Administrasi Kepegawaian
				3 Meningkatnya tata pemerintahan yang baik dan bersih	Sekretariat Daerah Inspektorat	Program-Program Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 2 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 3 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

**RENCANA AKSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA				TARGET						
						TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV			
Meningkatnya Kemampuan Membaca		Angka Melek Huruf				-	-	-	95,23			
Meningkatnya Taraf Pendidikan		Angka Rata-Rata Lama Sekolah				-	-	-	7,00			
		Angka Harapan Sekolah				-	-	-	11,98			
NO	AKSI / STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	Melaksanakan Lomba/Apresiasi PTK-PAUDNI dan Ekspo Kursus Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2019	√	-	√	-	Peserta Lomba Keteladanan, Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi tingkat Provinsi dan Expo Kursus	Program Pendidikan Non Formal	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	66.875.900,00	-	81.075.000,00	-
2	Menurunkan Angka Melek Huruf	√	√	√	√	Warga Belajar KF dan Warga Belajar KUM	Program Pendidikan Non Formal	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	44.802.400,00	895.780.900,00	706.710.900,00	60.160.900,00
3	Masyarakat bisa melanjutkan pendidikan jenjang setara SMA	√	√	√	√	Lulusan Paket C setara SMA	Program Pendidikan Non Formal	Penyelenggaraan Paket C setara SMU	225.810.900,00	322.557.300,00	441.810.900,00	9.810.900,00
4	Melaksanakan Workshop Instruktur LKP Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran	-	-	√	-	Sertifikat Peserta Bimbingan Teknis LKP	Program Pendidikan Non Formal	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	13.140.900,00	13.140.900,00	108.535.900,00	13.140.900,00
5	Melaksanakan Workshop Kurikulum Bagi Tutor Pendidikan Keaksaraan Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran	-	-	√	-	Sertifikat Peserta Bimtek Penyusunan Kurikulum bahan ajar dan Model pembelajaran KF	Program Pendidikan Non Formal	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	-	-	154.415.000,00	-
6	Monitoring dan Pembinaan	-	√	-	-	Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan UN Kesetaraan Paket A, B dan C sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan	Program Pendidikan Non Formal	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	147.804.100,00	190.000,00	-	-
7	Melaksanakan Workshop Tutor Paket C setara SMA untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran	-	-	-	√	Sertifikat Peserta Bimtek sejumlah 152 orang	Program Pendidikan Non Formal	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Paket C	-	-	-	147.922.800,00
Meningkatnya kesempatan dan pemerataan pendidikan		APK				-	-	-	APK PAUD : 40			
NO	AKSI / STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	Lomba - lomba PAUD Tingkat Kab. Cirebon	√	-	-	-	Terpilihnya Juara I,II,dan III Lomba-lomba PAUD Tingkat Kab. Cirebon	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengembangan pendidikan anak usia dini	180.764.800,00	-	-	-

2	Satuan Pendidikan Siap Menghadapi Akreditasi	√	√	√	√	Terlaksananya Pembekalan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Akreditasi PAUD	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Perencanaan dan Penyusunan Program Anak Usia Dini	9.810.612,00	9.810.612,00	65.498.112,00	123.780.912,00
3	Lomba Guru TK dan Kepala TK Tingkat Kab. Cirebon	-	√	-	-	Terpilihnya Juara I,II,dan III Lomba Guru TK, Pengawas TK, dan Kepala TK Berprestasi Tingkat Kab. Cirebon	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	-	55.736.200,00	-	-
4	Bukti Fisik Buku Referensi, Pengayaan, Panduan Pendidikan, dan Raport Siswa.	-	-	√	-	Buku Raport Siswa, Sampul Raport dan STSB/ljazah, Sampul STSB/ljazah PAUD dan Rapat Pengisian Raport	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa	-	-	339.998.300,00	-
5	Terlaksananya Pembelajaran Anak Usia Dini	√	√	√	√	Terlaksananya pembelajaran PAUD	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	20.505.450,00	328.482.750,00	20.505.450,00	20.505.450,00
6	Dimanfaatkannya sarana bermain peserta didik	-	√	-	-	APE Dalam dan APE Luar	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	-	124.997.800,00	-	-
7	Melakukan Survei sekolah akan kesiapan PPDB On Line dan sosialisasi mengenai bahayanya Narkoba	-	√	√	-	Penyelenggaraan PPDB On Line, Peserta Sosialisasi PPDB Online dan Pengadaan Alat Komputer	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Fasilitasi Pelayanan Pendidikan	-	326.920.000,00	150.000.000,00	-
8	Kesejahteraan PTK Non PNS layak	√	√	√	√	Tunjangan penghasilan untuk PTK Non PNS	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SMP/MI/SMPLB serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Formal, SMP	296.160.000,00	296.160.000,00	312.478.400,00	605.620.000,00
9	Tercapainya rasio kebutuhan ruang kelas/rombel	√	√	√	√	Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	68.803.850,00	2.751.470.750,00	14.716.350,00	14.716.350,00
10	1. Merancang Juknis BOS Kabupaten; 2. Mensosialisasikan juknis BOS Kabupaten; 3. Melaksanakan Bimbingan Teknis BOS; 4. Penyusunan DPA Turunan; 5. Pendistribusian Dana BOS ke Sekolah Penerima BOS Kabupaten	√	√	√	√	1. Materi Bimtek dan Sosialisasi Pengelolaan Dana BOS 2. Laporan hasil Monev Pengelolaan Dana BOS	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren	947.687.000,00	945.887.000,00	870.887.000,00	945.887.000,00
Meningkatnya Pemerataan dan Kesempatan Pendidikan						Melek Huruf Al-Qur'an	-	-	-	-	SD (%) : 70	
NO	AKSI / STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	Test Baca Al Quran (IQRA 6/juz Amma)	-	-	-	√	Sertifikat bukti bisa dan mampu baca tulis Al Qur'an	Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Keagamaan	-	-	-	293.473.500,00
Meningkatnya Mutu dan Referensi Pendidikan						Angka Putus Sekolah (APS)	-	-	-	-	SD : 2.24	
											SMP : 0.23	

NO	AKSI / STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Yang Putus Sekolah SMP dan Tidak Melanjutkan Ke SMA	√	√	√	√	Kelompok belajar PKBM Kesetaraan Paket B Setara SMP	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Penyelenggaraan Paket B setara SMP	220.905.450,00	337.280.850,00	436.905.450,00	4.905.450,00
Meningkatnya Mutu dan Referensi Pendidikan						Angka Lulusan (AL)			-	-	-	SD : 99.97 SMP : 99.96
NO	AKSI / STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	Tertatanya lingkungan Sekolah	√	√	√	-	Pagar dan Halaman lingkungan gedung Sekolah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Lapangan Parkir SMP	508.000,00	745.178.400,00	84.307.000,00	-
2	Monitoring dan Pembinaan	√	√	√	√	Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Monev US/UN SD dan Dokumen Laporan Hasil Monev Pengawas SD Penyusunan soal UN	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	53.528.450,00	36.855.450,00	102.105.450,00	4.905.450,00
3	Tertatanya lingkungan Sekolah	√	√	√	-	Halaman dan lingkungan gedung sekolah terpagar, terpasang Vaving blok	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD	113.125.000,00	88.070.100,00	6.555.302.000,00	-
4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	√	√	√	√	Ruang Perpustakaan Sekolah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pembangunan perpustakaan sekolah	176.350.000,00	180.850.000,00	257.650.000,00	175.000.000,00
5	SD di Kab. Cirebon mendapatkan Buku referensi, pengayaan, panduan pendidik dan Raport Siswa, Buku baca tulis Al Qur'an	√	-	√	√	Buku Raport Siswa	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa SD	1.000.000,00	-	37.470.400,00	1.001.000.000,00
6	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	√	-	-	-	Alat Peraktik dan Peraga Pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD	249.898.100,00	-	-	-
Meningkatnya Mutu dan Referensi Pendidikan						Angka Melanjutkan			-	-	-	90,05
NO	AKSI / STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	1. Mendata Siswa Kelas 6 SD Lulusan tahun sebelumnya yang belum melanjutkan; 2. Pendistribusian Bea Siswa Kepada Penerima	√	√	√	√	Pemberian Beasiswa dari keluarga yang kurang mampu	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Penyediaan Beasiswa Transisi	7.905.000,00	184.432.000,00	7.905.000,00	4.905.700,00
Meningkatnya Mutu dan Referensi Pendidikan						Angka Melanjutkan			-	-	-	SD ke SMP Sederajat : 90.01

NO	AKSI / STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	1. Mendata Siswa Kelas 6 SD Lulusan tahun sebelumnya yang belum melanjutkan; 2. Pendistribusian Bea Siswa Kepada Penerima	-	-	√	-	Pemberian Beasiswa dari keluarga tidak mampu	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Penyediaan Beasiswa Transisi			458.060.000	
Meningkatnya Mutu dan Referensi Pendidikan						Rata-rata Nilai UN/US						SD : 78.33 SMP : 29.00
NO	AKSI / STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	Peserta Bimtek dapat mengembangkan materi belajar dengan Menggunakan TIK	√	-	-	-	Peserta Bimtek Guru TIK	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	296.600.000,00	-	-	-
2	Terpilihnya juara I, II, III jenjang SMP dari masing-masing cabang lomba dan mengikuti lomba tingkat Provinsi	√	√	-	-	Pelaksanaan lomba O2SN, FLS2N, OSN, TUB, Pasangiri Sastra dan Bahasa Sunda / Cirebon	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP	426.267.500,00	95.200.000,00	-	-
3	Dokumen Laporan Monev sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan	√	-	-	-	Dokumen Laporan Pelaknasanaan MONEV	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SMP	9.804.300,00	117.129.800,00	9.804.300,00	9.804.300,00
4	Dimanfaatkannya Buku Raport Siswa sebagai laporan pendidikan	√	√	√	√	Buku Raport K13 Siswa SMP	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pengadaan Buku-Buku Alat Tulis Siswa SMP	9.810.000,00	208.610.000,00	251.980.000,00	10.530.000,00
5	Seleksi Lewat Lomba dan Pertandingan	√	√	-	-	Pelaksanaan lomba OSN, FLS2N, O2SN, Calistung, Pasangiri Bahasa dan Sastra Sunda/Cirebon	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	207.014.200,00	191.675.000,00	-	-
4	Melaksanakan Workshop Tutor Paket B setara SMP untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran	√	-	-	-	Sertifikat Peserta Bimtek Paket B sejumlah 60 lembar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Paket B Setara SMP	62.277.000,00	-	-	-
5	Guru memahami proses, maksud dan tujuan adanya Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	√	√	√	√	Peserta sosialisasi sertifikasi pendidik	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	31.952.900,00	286.653.900,00	31.952.900,00	(167.046.904,00)
Meningkatnya Mutu Tenaga Pendidik						Guru Layak Mengajar (Minimal S1)						SD % : 83.50 SMP % 97.50

NO	AKSI / STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	Guru memahami proses, maksud dan tujuan adanya Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	√	-	-	Dokumen Bimbingan dan Sosialisasi	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	-	26.872.500,00	-	-
2	Pelaksanaan BIMTEK Aplikasi DAPODIK Bagi Operator Sebanyak 345 Orang	√	-	√	-	Peserta Bimtek Aplikasi Data Pokok Pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	56.900.000,00	-	99.051.600,00	-
3	Melaksanakan Workshop Tutor Paket B setara SMP untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran	-	-	-	√	Sertifikat Peserta Bimbingan Teknis	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Paket B Setara SMP	-	-	-	147.932.200,00
4	Sosialisasi Kurikulum Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	-	-	√	-	Sertifikat Peserta Workshop Kurikulum, Bahan Ajar, dan Model Pembelajaran PAUD : Dan Sertifikat Peserta Bimtek Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	-	-	239.999.500,00	-
5	Guru Mendapat Sertifikat Pelatihan Kurikulum Sebanyak 590 Orang	-	-	√	√	Peserta Pelatihan mendapat sertifikat	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP	-	-	127.180.000,00	26.552.500,00
6	Guru dapat memenuhi standar kompetensi lulusan (MGBK, MGMP IPS, PKn)	-	-	√	√	Sertifikat Peserta Pelatihan Guru MGP SMP	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	-	-	148.500.000,00	26.512.600,00
7	Guru memiliki kompetensi dan Guru Layak Mengajar	√	√	√	√	Guru Berprestasi Tk. Kabupaten untuk ikut lomba pada tingkat provinsi	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SMP	4.905.000,00	164.308.200,00	59.505.000,00	4.905.000,00
8	Guru Mendapat Sertifikat Pelatihan Kurikulum Sebanyak 250 Orang	-	-	√	-	Guru SD	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	-	-	135.706.100,00	-
9	Juara I, II dan III Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten	-	√	-	-	Juara I, II dan III Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SD	-	130.347.300,00	-	-
Meningkatnya Mutu dan Jumlah Sarana prasarana Pendidikan						Ruang Kelas Baik			-	-	-	PAUD : 67.70 SD : 75.00 SMP : 80.00

NO	AKSI / STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	Melaksanakan Workshop Instruktur LKP Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran	-	√	-	-	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas TK	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	-	96.522.000,00	-	-
2	Ruang kelas / penunjang pembelajaran dalam kondisi baik	√	√	√	-	Ruang Kelas Sekolah SMP	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP	1.900.000,00	270.300.000,00	557.800.000,00	-
3	Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan	√	-	-	-	Jamban Siswa	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	249.898.100,00	-	-	-
4	Terpenuhinya ruang kelas / penunjang pembelajaran yang layak	√	√	√	-	Ruang Kelas Sekolah SD	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	329.665.745,00	4.565.347.055,00	1.807.595.320,00	167.641.380,00
Meningkatnya Mutu dan Jumlah Sarana Prasana Pendidikan						Rasio Siswa/KLS (S/K)			-	-	-	SD : 32.00 SMP : 36.00
NO	AKSI / STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	Tercapainya rasio kebutuhan ruang kelas/rombel	-	√	√	-	Ruang Kelas Sekolah SMP	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMP	-	21.644.500,00	1.121.998.500,00	-
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	√	√	-	√	Meubelair Sekolah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pengadaan Mebeleur Sekolah SD	1.832.714.425,00	595.789.875,00	-	90.000,00
Meningkatnya Mutu dan Jumlah Sarana prasarana Pendidikan						Terakriditasi			-	-	-	SD (%) : 99.97
NO	AKSI / STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	Penilaian Kompetensi Kinerja Kepala Sekolah Dasar	-	-	√	-	SK Akreditasi Sekolah Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	-	-	149.661.600,00	-
Meningkatnya Mutu dan Jumlah Sarana prasarana Pendidikan						Rasio Guru / Siswa			-	-	-	SD (%) : 20.00
NO	AKSI / STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	Proses pembelajaran di sekolah lancar	√	√	√	√	Guru yang sejahtera diberikan honorarium	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Peningkatan Kesejahteraan Guru PNS dan Guru Bantu Daerah Terpencil	34.608.000,00	34.608.000,00	34.608.000,00	34.608.000,00

Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Manajemen Pendidikan						Indeks Kepuasan Masyarakat			-	-	-	SD 79,3 ; SMP 77.64
NO	AKSI / STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	Pelaksanaan BIMTEK Penyusunan IKM Bagi Operator Sebanyak 345 Orang	-	√	-	√	Dokumen Capaian IKM Bidang Pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Sosialisasi dan Advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan	-	83.157.750,00	-	64.552.750,00
Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Manajemen Pendidikan						Manajemen Berbasis sekolah			-	-	-	SD 100.0 ; SMP 100.0
NO	AKSI / STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	Pelaksanaan BIMTEK Pengelolaan Verval PTK dan Verval PD Bagi Operator Sebanyak 465 Orang	-	-	√	-	Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Verval PTK dan Verval PD	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	-	150.347.100,00	-
2	Pelaksanaan Rakoor Bagi Kepala Sekolah dan Kepala UPT Sebanyak 560 Orang	-	√	-	-	Dokumen Rrencana dan Program Kerja Pendidikan Tahun 2020	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	131.730.300,00	-	-
3	Pelaksanaan BIMTEK Pengolahan Data Bagi Operator Sebanyak 345 Orang	√	√	√	√	Dokumen Profil Pendidikan, Kartu NISN	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	24.526.530,00	143.801.330,00	288.731.530,00	24.526.530,00
4	Peserta Kegiatan Monev sebanyak 280 orang	-	-	√	√	Dokumen Capaian Kinerja Bidang Pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	27.500.000,00	70.490.500,00
5	Pelaksanaan BIMTEK Penyusunan SPM (Standar Pelayanan Masyarakat) Bagi Operator Sebanyak 405 Orang	√	-	-	-	Dokumen Penyusunan Capaian Kinerja SPM Bidang	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Penyusunan Capaian Target SPM Bidang Pendidikan	3.950.000,00	132.134.300,00	-	-

6	Seleksi Gugus 40 UPT Pendidikan Kecamatan	-	-	-	√	Juara Lomba Gugus SD dan Pengelola Perpustakaan terbaik	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	-	-	-	83.000.000,00
Penanggulangan penyakit potensial KLB						Penanggulangan KLB Penyakit 1 x 24 jam						100%
NO	AKSI/STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
1	Meningkatkan sistem kewaspadaan dini dan respon KLB	√	√	√	√	Meningkatnya SKD KLB penyakit potensial KLB/wabah di masyarakat, Ketepatan laporan (W1, W2, dan STP)	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Peningkatan surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Rp 41.754.500	Rp 81.287.000	Rp 91.410.000	Rp 120.548.500
Penanggulangan Penyakit potensial KLB						Penanggulangan KLB penyakit 1x24 jam						100%
NO	AKSI/STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
1	Meningkatkan sistem kewaspadaan	√	√	√	√	Tersedianya informasi tentang situasi,	Pencegahan dan	Peningkatan surveilans	82.186.450	97.989.450	99.634.950	44.576.950
Pengendalian penyakit menular						Bertambahnya fasilitas dan layanan HIV/AIDS						60 pkm dan 6 RS
						Case Notification Rate (CNR) 145/100.000 pddk						209/100.000pddk
						Angka Kesembuhan (Cure Rate) >85%						85%
						Layanan komprehensif berkesinambungan						27 Puskesmas
NO	AKSI/STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
2	Meningkatkan pengendalian penyakit menular	√	√	√	√	1. Pelatihan KLB	Pencegahan dan Penanggulangan	Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 245.344.800	Rp 345.297.600	Rp 201.896.300	Rp 322.461.300
		√	√	√	√	2. MVCT 3. Sosialisasi HIV di masyarakat 4. Sosialisasi di Populasi Kunci 5. Pert Pokja HIV 6. pert jejaring LSM 7. Pert Koordinasi dengan SKPD 8. HAS 9. Leaflet 10. Poster 11. Lembar balik 12 Buku Saku kesehatan ibu dan anak , Masyarakat , 26 Kader Karang Taruna dan Ponpes, Sosialisasi dan penanggulangan HIV/AIDS di 40 Kecamatan			Penyemprotan/Fogging	Rp 247.835.900	Rp 243.885.300	Rp 290.102.200
						1. Terlaksananya fogging fokus						
						2. Pemberantasan DBD						

		√	√	√	√	angka pnemuan kasustatalaksana pnemoni, tata laksana diare, penemuan kasus kusta, cacat 2 kusta, DBD yang ditangani		Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	Rp 192.344.000	Rp 219.127.000	Rp 89.307.000	Rp 139.222.000
Pengendalian penyakit tidak menular						Penurunan jumlah kasus baru penyakit tidak menular						23%
NO	AKSI/STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
3	Pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular	√	√	√	√	Pengunjung Posbindu yang berusia 15-59 tahun, kader posbindu sekecamatanpalimanan, Masyarakat,	Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	Surveilans Faktor Resiko PTM (Penyakit Tidk Menular)	Rp 48.280.000	Rp 124.970.000	Rp 142.905.000	Rp 39.525.000
Balita gizi sangat kurus dapat terdeteksi dan tertangani						Menurunnya Prevalensi balita Gizi sangat kurus						0,10%
						Menurunnya Prevalensi balita Gizi Buruk						0,61%
NO	AKSI/STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
4	Meningkatkan upaya perbaikan gizi balita	√	√	√	√	% balita Gizi Buruk mendapat perawatan, % balita gizi buruk menurun, Meningkatkan kesehatan anak balita gizi buruk, Menurunkan angka kematian Ibu,Bayi dan Balita, Balita dan Balita Gizi Buruk, balita GB, Ibu Hamil dan Balita, kader posvandu	Perbaikan Gizi Masyarakat	Penanggulangan Gizi buruk	Rp 66.809.700	Rp 212.347.600	Rp 390.325.500	Rp 814.117.200
		-	-	√	-	% Cakupan ASI Eksklusif bayi 0-6 bulan			Penguatan Peningkatan Cakupan ASI Eksklusif di Kabupaten	Rp -	Rp -	Rp 31.442.900
Terdeteksinya bumil resiko tinggi, dan tertanganinya bumil, bulin dan bufas komplikasi						Menurunnya Rasio kematian ibu						76,29 / 100.000 K
						Meningkatnya presentase kunjungan ibu hamil (K4)						97%
NO	AKSI/STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
5	Meningkatkan deteksi resiko tinggi pada bumil dan penanganankomplikasi bumil, bulin dan bufas	√	√	√	√	Peningkatan kapasitas nakes dalam pelatihan PONED, KB pasca salin, Penggunaan ABPK dalam KIP/ Konseling, orientasi pelayanan persalinan dan nifas normal. Assesmen	Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Peningkatan Kapasitas Kabupaten dalam Penanggulangan Komplikasi Kebidanan dan bayi	Rp 28.270.400	Rp 48.750.000	Rp 89.049.600	Rp 193.530.000
		√	√	√	√	1. Bidan peserta ANC terpeadu 2. Tim Pembahasan kasus 3. tim pengkaji audit maternal 4. Manajemen pelayanan KB di Puskesmas			Peningkatan Kesehatan Ibu hamil, Bersalin dan Nifas	Rp 37.165.300	Rp 206.525.900	Rp 208.246.800

		√	√	√	√	5. Penguatan program KIA bagi											
						1. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan neonatal 2. Meningkatnya kinerja klinis Puskesmas PONED	Pembangunan Sistem Implementasi Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru lahir	Rp 5.377.800	Rp 41.822.200	Rp 83.710.000	Rp 29.090.000						
Peningkatan Cakupan Imunisasi						Cakupan UCI DESA						100%					
NO	AKSI/STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)								
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV					
1	Meningkatkan upaya pencegahan penyakit melalui imunisasi	√	√	√	√	Terlaksananya pelayanan imunisasi pada bayi, bumil dan anak sekolah di Kabupaten Cirebon	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Peningkatan Imunisasi	65.471.600	123.292.100	69.766.300	41.470.000					
Pengendalian penyakit menular						Bertambahnya fasilitas dan layanan HIV/AIDS						60 Puskesmas dan 6 RS					
						Case Notification Rate (CNR) 145/100.000 pddk						209/100.000 pddk					
						Angka Kesembuhan (Cure Rate) >85%						85%					
						Layanan komprehensif berkesinambungan						27 pkm dan 6 RS					
NO	AKSI/STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)								
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV					
2	Meningkatkan pengendalian penyakit menular	√	√	√	√	1. pelatihan LKB, 2. MVCT, 3. sosialisasi HIV di masyarakat, 4. sosialisasi di populasi kunci, 5. pert pokja HIV, 6. pert jejaring LSM, 7. perte Koordinasi dgn SKPD, 8. HAS, 9. leaflet, 10. poster, 11. lembar balik 12. buku saku, Kesehatan Ibu dan Anak, Masyarakat, 26 Kader KR TARUNA dan PONPES, Sosialisasi dan Penanggulangan HIV/AIDS di 40 Kecamatan	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penanggulangan HIV/AIDS	245.344.800	345.297.600	201.896.300	322.461.300					
		√	√	√	√	Terlaksananya fogging fokus 100% dari kasus, Pemberantasan DBD		Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk	247.835.900	243.885.300	290.102.200	342.726.600					
		√	√	√	√	angka penemuan kasustatalaksana pnemoni, tata laksana diare, penemuan kasus kusta, cacat 2 kusta, DBD yang ditangani		Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	192.344.000	219.127.000	89.307.000	139.222.000					
Masalah gizi makro dan mikro pada masyarakat tertangani						Menurunnya Prevalensi KEK pada Bumil						3,15%					
						Menurunnya Prevalensi Anemi pada Bumil						5,41%					
NO	AKSI/STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)								
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV					

3	Meningkatkan upaya perbaikan gizi masyarakat baik mikro maupun makro	√	√	√	√	% balita ditimbang , % ibu hamil mendapat fe, % remaja puteri mendapat fe, % jumlah KK mengonsumsi garam beryodium, % bayi dan anak balita mndapat kapsul vit A 2 x setahun, Menurunkan angka kematian Ibu,Bayi dan Balita, Ibu hamil kurang darah	Perbaikan Gizi Masyarakat	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEK), Anemia Gizi Besi, gangguan akibat kurang Yodium(GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat Gizi Mikro lainnya	19.375.000	172.974.900	383.950.000	2.250.000
Balita gizi sangat kurus dapat terdeteksi dan tertangani						Menurunnya Prevalensi balita Gizi sangat kurus						0,10%
						Menurunnya Prevalensi balita Gizi Buruk						0,61%
NO	AKSI/STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
4	Meningkatkan upaya perbaikan gizi balita			√	√	% Cakupan ASI Eksklusif bayi 0-6 bulan	Perbaikan Gizi Masyarakat	Penguatan Peningkatan Cakupan ASI Eksklusif di Kabupaten			31.442.900,00	88.557.000,00
Meningkatnya pelayanan kesehatan usia lanjut						Presentase pelayanan kesehatan lansia						40%
NO	AKSI/STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
5	Meningkatkan pelayanan kesehatan lansia	-	√	√	√	Semua desa memiliki Posbindu	Peningkatan pelayanan kesehatan Usia Lanjut	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	-	2.626.800	28.616.400	28.756.800
Meningkatkan sarana sanitasi dasar di masyarakat						Presentase penggunaan jamban						75%
						Jumlah desa ODF						110 DESA ODF
NO	AKSI/STRATEGIS	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
6	Meningkatkan pengguna sarana air bersih (SAB), rumah sehat	√	√	√	√	Akses rumah tangga terhadap sarana air bersih dan akses rumah tangga terhadap jamban sehat,	Pengembangan Lingkungan Sehat	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	85.480.000	114.673.800	13.340.000	34.006.200
		√				Pasien dan klien diberikan KIP/K di klinik sanitasi dan dilaksanakannya intervensi lingkungan terhadap masyarakat		Klinik Sanitasi	25.000.000	-	-	-
		√	√	√	√	Cakupan rumah tangga akses terhadap jamban keluarga, Peningkatan akses masyarakat terhadap jamban keluarga, Tokoh Masyarakat, Tomas , Kader Posyandu		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat(STBM)	129.580.000	47.043.000	89.834.000	1.800.000
Tertanganinya neonatus komplikasi dan penanganan bayi & balita sakit						Rasio Kematian Bayi						3,92

		JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)			
NO	AKSI/STRATEGIS	TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
		Persentase neo komplikasi yang ditangani										
1	Meningkatkan penanganan neonatus komplikasi, bayi dan balita sakit	√	√	√	√	Peningkatan kapasitas nakes dalam penanganan bayi balita sakit dengan MTBS penanganan BBLR , SDIDTK dan Kelas Ibu Balita,	Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Peningkatan Kapasitas Kabupaten dalam Penanganan Bayi dan Balita	39.413.800	104.286.200	115.700.000	115.600.000
		√	√	√	√	Peningkatan kapasitas nakes dalam penanganan kegawatdaruratan pada bayi, kasus komplikasi neonatal > 80 & serta kasus bayi dan balita sakit yang di tangani oleh nakes dengan pendekatan MTBS lebih dari 50 % sehingga jumlah kematian bayi menurun sebesar 25 % dari tahun sebelumnya		Peningkatan Pelayanan kesehatan Bayi dan Balita	13.937.000	61.001.000	24.602.000	50.460.000
Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan untuk kelancaran arus lalu lintas dan mempermudah akses perekonomian						Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap						82%
NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			
		TK. I	TK. II	TK.III	TK. IV				TK. I	TK. II	TK.III	TK. IV
1	Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Jalan	√	√	√	√	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			5.533.488.784	49.653.639.432	73.349.590.914	23.620.699.197
						Jumlah Dokumen Desain teknis perencanaan Peningkatan jalan dan jembatan		Perencanaan Pembangunan Jalan	25.045.450	192.944.050	254.855.250	469.055.250
						Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan dan Pembangunan Jalan Baru		Pembangunan Jalan	3.889.867.058	45.525.325.550	50.510.518.602	19.972.346.196
						Jumlah Jembatan Kabupaten yang ditingkatkan dan Pembangunan		Pembangunan Jembatan	1.606.954.076	3.918.405.332	22.563.324.062	3.168.777.451
						Tersedianya laporan Evaluasi program pembangunan jalan dan jembatan		Monitoring, Evaluasi dan Pelapor	11.622.200	16.964.500	20.893.000	10.520.300
							Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		5.060.245.550	19.166.744.750	6.433.744.050	10.705.025.650
						Tersedianya dokumen teknis perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan		Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	26.436.950	198.762.550	199.155.750	25.644.750
						Panjang Jalan Kabupaten yang dipelihara secara Rutin dan Periodik		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	4.199.827.200	16.395.638.800	6.196.649.600	10.655.644.400
						Jumlah Jembatan Kabupaten yang terpelihara		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jemba	818.773.200	2.549.431.400	14.012.400	5.783.000
						Tersedianya laporan Evaluasi Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan		Monitoring, Evaluasi dan Pelapor	15.208.200	22.912.000	23.926.300	17.953.500
					Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong		1.634.715.201	9.183.688.319	8.560.737.576	7.806.348.444		
				Jumlah Dokumen desain teknis perencanaan Bangunan Pelengkap Jalan		Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	-	2.959.100	54.419.400	204.421.500		

					Jumlah Bangunan Pelengkap jalan yang dibangun		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	1.634.715.201	9.175.773.719	8.494.702.176	7.593.498.444	
					Jumlah Dokumen laporan Evaluasi Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong		Monitoring, Evaluasi dan Pelapor	-	4.955.500	11.616.000	8.428.500	
						Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan		26.307.900	274.905.800	272.353.800	26.432.500	
					Jumlah dokumen data kondisi jalan		Penyusunan Sistem Informasi/Database Jalan	22.934.900	128.192.800	125.734.900	23.137.400	
					Jumlah dokumen data kondisi jembatan		Penyusunan Sistem Informasi/Database Jembatan	3.373.000	146.713.000	146.618.900	3.295.100	
						Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan		2.560.200	203.039.200	2.041.500	1.359.100	
					Jumlah Laporan Pemanfaatan Ruang milik Jalan yang dipergunakan masyarakat		Pemanfaatan Jalan	2.560.200	203.039.200	2.041.500	1.359.100	
						Program Pengaturan Jasa Konstruksi		102.978.850	104.243.450	21.091.350	20.966.350	
					Jumlah Badan Usaha dan Lembaga Konstruksi yang Tersosialisasi dan Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Bersertifikat		Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan, Jasa Konstruksi, dan Peraturan Lainnya	102.978.850	104.243.450	21.091.350	20.966.350	
Meningkatnya Kapasitas tampung Sumber Air					Meningkatnya Intensitas tanam						250%	
					Prosentase Berkurangnya Luas Wilayah yang Terkena Banjir						5%	
NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			
		TK. I	TK. II	TK.III	TK. IV				TK. I	TK. II	TK.III	TK. IV
1	Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air	√	√	√	√		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya		8.511.190.650	30.131.414.349	24.380.288.850	12.617.195.650
		√	√	√	√	Jumlah dokumen desain teknis perencanaan Jaringan Irigasi		Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	26.732.850	222.331.950	222.892.350	176.942.850
		√	√	√	√	Jumlah dokumen desain teknis Pembangunan Reservoir		Perencanaan Pembangunan Res	11.253.450	59.918.650	65.388.450	10.479.450
		√	√	√	√	Jumlah Daerah Irigasi yang Terehabilitasi		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaring	91.673.250	11.985.013.650	4.971.911.050	1.628.712.050
		√	√	√	√	- Draft Perbub Tentang Rencana Tata Tanam(RTT), Rencana Penyediaan dan Pengaturan Irigasi (RPPA) dan Jadwal Penerimaan Jaringan Irigasi - Prosentase Petani yang tersosialisasi tentang Rencana Tata Tanan (RTT)		Pemberdayaan Petani Pemakai /	85.000.200	103.865.600	26.942.100	84.192.100
		√	√	√	√	Jumlah dokumen laporan pengawasan peningkatan / pemeliharaan Sumber Daya Air		Monitoring, Evaluasi dan Pelapor	23.315.800	24.798.900	28.279.200	23.606.100
		√	√	√	√	Jumlah Daerah Aliran Sungai yang terpelihara		Operasi dan Pemeliharaan Sumb	1.868.373.400	2.479.961.700	2.245.653.500	2.456.011.400

		√	√	√	√	Tersedianya desain teknis Penanganan Sarana Prasarana Sungai dan Muara		Perencanaan Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sungai, Muara Sungai dan Pengaman Kawasan Pantai	25.270.900	73.442.900	127.296.800	222.399.400
		√	√	√	√	Jumlah Daerah Irigasi yang dipelihara		Operasi dan Pemeliharaan Irigasi	1.645.788.500	2.615.542.100	1.757.491.200	3.145.176.000
		√	√	√	√	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ditingkatkan dan bangunan Embung		Pembangunan dan Peningkatan Sumber Air	4.733.782.300	12.566.538.899	14.934.434.200	4.869.676.300
		√	√	√	√		Program Pengendalian Banjir		3.204.836.200	4.370.387.100	511.880.000	37.896.700
		√	√	√	√	Prosentase Sarana dan Prasarana Pengaman Pantai yang terbangun / ditingkatkan		Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Muara Sungai dan Pengaman Pantai	2.107.156.850	1.848.643.350	24.522.650	19.677.150
		√	√	√	√	Jumlah Daerah Aliran Sungai yang Muara pantainya terpelihara		Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Muara Sungai dan Pengaman Pantai	1.097.679.350	2.521.743.750	487.357.350	18.219.550
		√	√	√	√			Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	31.411.900	79.229.700	80.671.200	31.987.200
					√		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-	-	-	75.000.000
					√			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	75.000.000
Meningkatnya perencanaan, kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang						Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kab beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital						100%
NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			
		TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV				TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV
1	Pembuatan Draft atau Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Daerah	√	√	√	√		Program Perencanaan Tata Ruang		105.773.200	3.834.645.480	34.984.300	24.597.700
						Jumlah Raperda RDTRK yang terbit		Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	27.977.900	1.149.900.980	12.310.900	9.810.900
						Jumlah Kecamatan yang memiliki dokumen teknis RDTRK peta analog, peta digital, dan Draft Perda tentang RDTRK,		Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	56.227.000	1.711.801.200	18.623.400	13.348.400
						Jumlah Kawasan yang memiliki dokumen teknis/kajian RTRK dari 6 KSK dan Draft Perda tentang Rencana Teknis Ruang Kawasan Strategis Kabupaten		Penyusunan rencana teknis ruang kawasan	21.568.300	972.943.300	4.050.000	1.438.400
							Program Pemanfaatan Ruang		113.277.300	286.972.700	93.750.000	36.000.000
						Jumlah Rekomendasi Kajian Teknis Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan		Penyusunan kebijakan pemanfaatan ruang	68.286.800	46.213.200	49.500.000	36.000.000
						Prosentase Rekomendasi kajian teknis pemanfaatan ruang		Pengendalian Pemanfaatan Ruang	42.875.500	42.874.500	44.250.000	-

						Jumlah Peserta Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	2.115.000	197.885.000	-	-	
						Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		176.426.900	53.432.700	50.432.700	226.907.700	
						Meningkatnya prosentase media Informasi sebagai sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan ruang	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	142.767.300	24.810.900	24.810.900	174.810.900	
						Jumlah Surat Teguran bagi bangunan yg melanggar sempadan	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	33.659.600	28.621.800	25.621.800	52.096.800	
						Kesesuaian Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	16.747.525	16.747.525	16.922.525	17.272.525	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengelolaan infrastruktur Pekerjaan Umum						Tersedianya Peralatan pendukung pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum					291 Unit	
NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			
		TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV				TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV
1	Penambahan Peralatan Baru dan Pemeliharaan	√	√	√	√		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan		639.259.200	2.117.170.600	250.372.100	131.198.100
						Bertambahnya jumlah alat-alat berat	Pengadaan Alat-alat Berat		-	1.750.000.000	-	-
						Bertambahnya jumlah peralatan bengkel alat-alat berat	Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat		4.300.000	45.700.000	-	-
						Bertambahnya alat-alat laboratorium Pekerjaan Umum	Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinarmargaan		191.550.000	91.450.000	-	-
						jumlah alat-alat berat yang dipelihara	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat		247.274.600	210.398.800	230.750.300	111.576.300
						jumlah peralatan bengkel alat-alat berat yang dipelihara	Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Aat-alat Berat		5.000.000	-	-	-
						jumlah alat-alat laboratorium Kebinarmargaan yang dipelihara	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinarmargaan		191.134.600	19.621.800	19.621.800	19.621.800
Laporan Administrasi yang Akuntabel						Nilai hasil Evaluasi LKIP SKPD					67%	
NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			
		TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV				TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV
1	Penyelenggaraan Tertib Administrasi	√	√	√	√		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		442.591.400	1.003.781.900	367.746.800	750.319.600
						Terselesainya Jasa komunikasi, Listrik, air dan PBB	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		127.580.000	132.580.000	125.480.000	88.200.000
						Terjaminnya Kendaraan Operasional Dinas	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		-	-	-	70.000.000
						Terjaminnya izin kendaraan operasional dinas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan		52.900.000	43.400.000	-	1.700.000
						Jumlah Peralatan Kerja Yang dipelihara	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		44.600.000	40.500.000	34.500.000	30.400.000
						Tersedianya Alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor		30.957.000	30.096.000	29.346.000	46.901.000
						Tersedianya cetakan dan penggandaan sebagai penunjang administrasi	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		27.711.900	27.518.700	27.010.700	27.648.400
						Tersedianya komponen listrik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan		13.452.100	13.296.500	6.100.900	7.150.500

		√	√	√	√	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	550.000.000	-	276.255.000
		√	√	√	√	Tersedianya peralatan rumah tangga		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.270.400	27.136.700	4.192.200	156.950.700
		√	√	√	√	Tersedianya bahan bacaan		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.042.000	24.042.000	24.039.000	24.036.000
		√	√	√	√	Tersedianya makanan dan minuman penunjang kegiatan dinas		Penyediaan Makanan dan Minuman	18.078.000	16.212.000	18.078.000	18.078.000
		√	√	√	√	Terpenuhinya koordinasi dengan instansi terkait		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	99.000.000	99.000.000	99.000.000	3.000.000
		√	√	√	√		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		31.456.500	22.677.600	29.272.200	28.669.500
		√	√	√	√	Jumlah Laporan capaian kinerja dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.655.200	11.058.300	14.130.300	15.232.200
		√	√	√	√	Jumlah Laporan Keuangan dan Aset		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	9.801.300	11.619.300	15.141.900	13.437.300
		√	√	√	√	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	6.000.000	-	-	-
		√	√	√	√		Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor		19.871.350	5.557.650	20.753.350	4.900.650
		√	√	√	√	Jumlah Dokumen Perencanaan Sektor		Perencanaan Sektor	19.871.350	5.557.650	20.753.350	4.900.650
		√	√	√	√		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		370.134.500	1.306.207.700	339.134.500	1.498.169.500
		√	√	√	√	Jumlah bangunan yang terbangun		Pembangunan Gedung Kantor	-	-	-	200.900.000
		√	√	√	√	Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara secara berkala		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rum	-	300.000.000	-	305.700.000
		√	√	√	√	Jumlah Bangunan Kantor yang dipelihara		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	176.544.500	323.617.700	156.544.500	156.544.500
		√	√	√	√	Jumlah Kendaraan Dinas yang terjamin kondisinya		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	169.090.000	169.090.000	169.090.000	164.730.000
		√	√	√	√	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	24.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
		√	√	√	√	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-	500.000.000	-	656.795.000
		√	√	√	√		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		-	150.000.000	-	-
		√	√	√	√	Jumlah Pakaian untuk pekerja Lapangan		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	-	150.000.000	-	-
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan							Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	-	-	-	-	13 Pokmas
							Tersedianya Sarana dan Prasarana Persampahan	-	-	-	-	3 Jenis%
							Meningkatnya pelayanan pengangkutan sampah	-	-	-	-	5%
No	AKSI/STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
	Meningkatkan pembinaan masyarakat dalam pengelolaan sampah, penyediaan teknologi dan informasi status lingkungan	√	√	√	√	Terbentuknya pokmas, lembaga bank sampah dan meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	111.992.000	215.668.000	72.000.000	58.200.000

		√	√	√	√	Pelayanan kepada masyarakat, baik pasar, permukiman, dan perusahaan		Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	3.255.922.300	3.591.752.050	2.952.426.050	2.240.626.050
		√	√	√	√	- Persentase pengangkutan sampah - Persentase pengoperasian TPA		Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	2.780.732.000	4.470.950.000	3.884.000.000	2.170.750.000
		√	√	√	√	- BinteK pengelolaan lingkungan bagi siswa. - BinteK adiwiyata pembinaan 10 sekolah sebagai prasyarat adiwiyata mandiri - Stimulan dalam bentuk hadiah uang - Pembinaan calon sekolah adiwiyata mandiri - Pembinaan adiwiyata nasional - Pembinaan adiwiyata kabupaten dan provinsi - Pembentukan dan pembekalan lingkungan bagi duta-duta lingkungan sekolah - Pelaksanaan kemah lingkungan	Program Peningkatan Edukasi dan komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	48.312.500	48.312.500	48.312.500	48.312.500
		√	√	√	√	- Tersedianya data base informasi lingkungan		Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	675.000	132.125.000	15.375.000	1.825.000
Meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan bagi dunia usaha dan masyarakat						Meningkatnya kualitas lingkungan di kota sumber sebagai kota kecil yang bersih		-	-	-	1 Penghargaan	
						Tersedianya data kualitas udara, air sungai, air laut dan air sumur		-	-	-	1 dokumen	
						Meningkatnya kegiatan usaha yg mentaati peraturan di bidang lingkungan hidup		-	-	-	30 Unit Kegiatan	
						Tersedianya data/alat untuk pengambilan kebijakan pengelolaan lingkungan akibat pencemaran		-	-	-	1 Kajian	
						Penurunan pencemaran melalui peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan		-	-	-	4 Unit Industri	
No	AKSI/STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	Meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan bagi dunia usaha dan masyarakat	√	√	√	√	- Monitoring ke perusahaan - Perusahaan yang menjadi peserta sosialisasi - Penyusunan data base	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	35.750.000	250.000	44.000.000	0
						- Penilaian dokumen lingkungan - BinteK tentang Dokumen		Koordinasi Penyusunan AMDAL	50.375.000	52.185.000	47.775.000	52.355.000

						Kajian Daya dukung lahan Industri di Kabupaten Cirebon	Pengkajian Dampak Lingkungan	12.075.000	41.250.000	184.550.000	7.125.000
						Kajian Perhitungan Beban Pencemar DAS	Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih	4.500.000	88.500.000	4.500.000	4.500.000
						- Laporan hasil pemantauan kualitas lingkungan - Bintek peningkatan kapasitas masyarakat untuk kualitas lingkungan	Pemantauan Kualitas Lingkungan	43.540.000	65.310.000	65.310.000	55.840.000
						- Kegiatan usaha milik pemerintah maupun swasta yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup	Koordinasi Pengelolaan Prokasih/ Superkasi	4.500.000	88.500.000	4.500.000	4.500.000
		√	√	√	√	- Laporan hasil pengawasan ketaatan kegiatan usaha terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup	Pemantauan Kualitas Lingkungan	43.540.000	65.310.000	65.310.000	55.840.000
						- Kegiatan usaha milik pemerintah maupun swasta yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup - Laporan hasil pengawasan ketaatan kegiatan usaha terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	57.450.000	31.500.000	36.750.000	39.600.000
						- Penyusunan raperbup	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	-	5.350.000	44.650.000	-
		√	√	√	-	Penyusunan Masterplan dan DED area relokasi pengusaha batu alam	Penanganan Limbah Batu Alam	1.085.150.000	406.550.000	8.300.000	-
Meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan bagi dunia usaha dan masyarakat							Tersedianya data kualitas udara, air sungai, air laut dan air sumur	-	-	-	2 Dokumen
							Meningkatnya kegiatan usaha yg mentaati peraturan di bidang lingkungan hidup	-	-	-	300 Unit Kegiatan Usaha
							Tersedianya data/alat untuk pengambilan kebijakan pengelolaan lingkungan akibat pencemaran	-	-	-	1 Kajian

						Penurunan pencemaran melalui peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup						100 Unit Industri
No	AKSI/STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
2	Meningkatkan pengendalian dan rehabilitasi serta pengawasan fungsi sumber daya alam	√	√	√	√	Monitoring ke perusahaan Perusahaan yang menjadi peserta sosialisasi Penyusunan data base	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	12.100.000	38.000.000	30.100.000	0
		√	√	√	√	Penilaian dokumen lingkungan Bintek tentang Dokumen Lingkungan dan Pelaporan pelaksanaannya		Koordinasi Penyusunan AMDAL	22055450	58067650	58930450	45405450
		√	√	√	√	Kajian Daya dukung lahan Industri di Kabupaten Cirebon		Pengkajian Dampak Lingkungan	6.710.450	5.225.450	252.183.050	5.381.050
		√	√	√	√	Kajian Perhitungan Beban Pencemar DAS		Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih	24.483.650	23.505.450	56.105.450	4.905.450
		√	√	√	√	Laporan hasil pemantauan kualitas lingkungan Bintek peningkatan kapasitas masyarakat untuk kualitas lingkungan		Pemantauan Kualitas Lingkungan	118.450.000	33.650.000	143.200.000	6.350.000
		√	√	√	√	Kegiatan usaha milik pemerintah maupun swasta yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup Laporan hasil pengawasan ketaatan kegiatan usaha terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup		Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	21.477.450	58.137.450	38.477.650	54.137.450
				√	√	Penyusunan raperbup		Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	0	0	41.010.000	12.740.000
						Penyusunan Masterplan dan DED area relokasi pengusaha batu alam		Penanganan Limbah Batu Alam	0	0	0	0
Meningkatnya kualitas fungsi sumber daya alam						Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim		-	-	-	2 Kampung Iklim	
						Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam					1 Dokumen	
						Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam di pesisir pantai					4 Kecamatan	
No	AKSI/STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV

3	Meningkatkan pengendalian dan rehabilitasi serta pengawasan fungsi sumber daya alam	√	√	√	√	Bintek Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Penurunan pencemaran melalui peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup	11.460.000	26.750.000	31.000.000	7.190.000
		√	√	√	√	Terjaganya fungsi kawasan resapan dan sumber-sumber air		Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air	78.302.500	5.000.000	58.655.000	0
Terselesaikannya pengaduan sengketa lingkungan						Terselesaikannya Pengaduan/Sengketa dengan Pencemaran Lingkungan			-	-	-	100%
No	AKSI/STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
4	Meminimalisir terjadinya konflik dan pencemaran lingkungan	√	√	√	√	- Terlayannya pengaduan kasus lingkungan - Laporan hasil kegiatan - Pengujian kualitas air dan udara	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi Pos Pengaduan Sengketa Lingkungan	15.000.000	59.800.000	10.000.000	20.000.000
Meningkatnya ketersediaan RTH						persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kabupaten Cirebon			-	-	-	5 buah
No	AKSI/STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
5	Meminimalisir terjadinya konflik dan pencemaran lingkungan	√	√	√	√	Terbangunnya sarana dan prasarana penghijauan	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Penataan RTH	367.378.500	1.994.684.619	1.679.528.926	15.650.000
		√	√	√	√	Terpeliharanya RTH		Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	342.500.507	790.620.521	738.123.712	151.890.206
Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui rehabilitasi sosial						Cakupan PMKS yang terehabilitasi						250 PRSE 30 AJ 30 AMPK 20 ABH
No.	AKSI/STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	Persentase PMKS yang terehabilitasi		√			PRSE memiliki Uep KUBE	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	Bimbingan Sosial dan Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi		10.650.000		

		√		Anak Jalanan Dapat Sekolah Dengan Layak	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Bimbingan Sosial dan Keterampilan Bagi Anak Jalanan			90.000.000	
√				Anak nakal yang memiliki KUBE		Bimbingan Sosial dan Keterampilan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus			90.000.000	
			√	ABH yang telah mempunyai keterampilan (20ABH)		bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)				100.000.000
			√	Bertambahnya anak terlantar yang memiliki KUBE	Program Pembinaan Anak Terlantar	Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar		200.000.000		
	√			Penyandang Cacat Trauma memiliki KUBE	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat	Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma		251.462.300		
		√		ODKB yang dapat memenuhinya kebutuhan dasar		Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat			242977000	
√				Eks korban penyalahgunaan Napza mendapatkan rekomendasi tindak lanjut	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)	Unit Pelayanan Sosial Keliling bagi Korban Penyalahgunaan Napza	165.000.000			
		√		Para Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Alat bantu		Bimbingan Sosial dan Pemberian Alat Bantu bagi para penyandang disabilitas			402200000	
√	√			Eks Penyandang penyakit sosial (eks WTS) yang telah mempunyai keterampilan		bimbingan sosial dan keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit sosial	99.100.000	900.000		

						Eks korban penyalahgunaan Napza yang telah mempunyai keterampilan		Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA		142.977.000		
						Pelayanan sosial kepada PMKS jalanan (PGOT)		Pelayanan Rumah Singgah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	188.051.150	70.733.550	69837156	71378150
Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Melalui Perlindungan dan jaminan sosial						Prosentase PMKS yang terlindungi						
No.	AKSI/STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
2	Prosentase PMKS yang terlindungi		√			Bertambahnya lanjut usia yang mendapatkan bantuan sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia		193.560.000		
		√	√			Rehabilitasi korban trauma akibat bencana		Penanganan dan Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	43.364.500	193.560.000		
		√		√	√	Verifikasi Data JKN PBI		Fasilitasi perlindungan jaminan sosial	200.000.000		80.800.000	119200000
		√	√	√	√	pendamping PKH yang terfasilitasi pengembangan		Fasilitasi Pengembangan Program Keluarga Harapan	28.405.450	228.367.150	55.927.450	17299950
		√	√	√	√	Bantuan Transport bagi orang terlantar		Pemberian Transport bagi Orang Terlantar di Perjalanan	9.650.000	14.450.000	10.500.000	5.400.000
Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berdaya						Prosentase PSKS yang mampu menjalankan fungsinya						
No.	AKSI/STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV				TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
3	Prosentase PSKS yang mampu menjalankan fungsinya		√			Biaya Operasional dan Pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo		514.780.000		
				√		Tagana dan Relawan menguasai Evakuasi bencana baik alam maupun non alam		Pelatihan dan pementapan Relawan Penanggulangan Bencana			320.000.000	

				√	Bertambahnya karang taruna yang memiliki KUBE	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha				100.000.000	
			√		Bertambahnya Orsos yang mendapatkan bantuan		Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat			1.455.908.000		
				√	Bertrambahnya pengetahuan masyarakat tentang kesetiakawanan sosial		Fasilitasi Penyuluhan Kepedulian Sosial				122.200.000	
		√			Bertambahnya PSM yang memahami tupoksi		Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat		543723000			
				√	Realisasi rehabilitasi Taman Makam Pahlawan		Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan			1.187.499.220		
Menurunnya Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Melalui Penanganan Fakir Miskin					Presentase PMKS yang meningkat kesejahteraannya						100,00%	
AKSI/STRATEGI		JADWAL PELAKSANAAN				PAGU ANGGARAN (Rp)						
No.		TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV	OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	TR. I	TR. II	TR. III	TR. IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Menurunnya Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Melalui Penanganan Fakir Miskin	√	√	√	√	Terjaminnya keluarga miskin mendapatkan beras yang aman dan berkualitas	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	Koordinasi Fasilitasi dan Monitoring Beras Miskin (Raskin)	273.646.000	84.998.842	102.478.667	23.981.641
					√	Keluarga miskin mempunyai ketrampilan		Bimbingan Sosial dan Keterampilan Bagi Keluarga Miskin	98.949.700	110.148.100	55.549.100	55.549.100
		√	√	√	√	Berkurangnya keluarga berumah idak layak huni	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial bagi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	1.412.038.936	3.299.775.000	3.773.490.000	1.009.200.000
					Presentase tercapainya akuntabilitas						100,00%	
5	Meningkatnya pelayanan prima	√				Terdokumentasinya laporan hasil monitoring dan evaluasi	Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKIP,LKPJ,LPPD,Laporan SPM)	4.872.000			
			√	√				Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran			3.219.000	
					√			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	4.535.000			
		√	√	√	√			Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Laporan Triwulanan)	39.599.250	31.049.250	31.649.250	32.402.250

		√				terdokumentasinya Perencanaan sektoral	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	Penyusunan Dokumen Perencanaan sektoral	41.372.000				
						TARGET							
SASARAN STRATEGIS						INDIKATOR KINERJA				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD						Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				25%	30%	30%	15%
NO	AKSI/STRATEGI	JADUAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)				
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV	
1	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	√	√	√	√	Jumlah Rekening yang terbayar (Listrik, PDAM dan Telepon)	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	29.750.000	29.750.000	29.750.000	29.750.000	
		√	√	√	√	Jumlah Perizinan Pajak Kendaraan bermotor Roda 2 (Dua) dan Roda 4 (empat)		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	2.088.750	2.088.750	2.088.750	2.088.750	
		√	√	√	√	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang di beli		Penyediaan alat tulis kantor	6.682.500	6.682.500	6.682.500	6.682.500	
		√	√	√	√	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.682.500	6.682.500	6.682.500	6.682.500	
		√	√	√	√	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
		√	√	√	√	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor yang tersedia		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	51.035.867	51.035.867	51.035.867	51.035.867	
		√	√	√	√	Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan yang tersedia		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.620.000	4.620.000	4.620.000	4.620.000	
		√	√	√	√	Jumlah Makan dan Minuman yang di sediakan		Penyediaan makanan dan minuman	7.425.000	7425000	7425000	7425000	
		√	√	√	√	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar	38.156.732	38156732	38156732	38156732	
						TARGET							
SASARAN STRATEGIS						INDIKATOR KINERJA				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
Tercapainya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai						Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur				28.59%	28.59%	28.59%	28.59%
NO	AKSI/STRATEGI	JADUAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)				
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV	
2	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	√	√	√	√	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	29.699.900	29.699.900	29.699.900	29.699.900	

SASARAN STRATEGIS						INDIKATOR KINERJA			TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
Tercapainya akuntabilitas sistem pelaporan perencanaan pembangunan sektoral						Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral			25%	30%	30%	15%
NO	AKSI/STRATEGI	JADUAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
5	Meningkatkan akuntabilitas sistem pelaporan perencanaan pembangunan sektoral		√	√		Jumlah dokumen Rencana Kerja (RENJA) dan Perjanjian Kinerja (PERKIN) yang tersusun	Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	Penyusunan dokumen perencanaan sektoral		1.500.000	1.500.000	
				√		Jumlah dokumen RKA yang tersusun		Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD			1.499.990	
			√			Jumlah dokumen profil dinas yang tersusun		Penyusunan pembuatan profil dinas		9.999.990		
									TARGET			
SASARAN STRATEGIS						INDIKATOR KINERJA			TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa						Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif			25%	30%	30%	15%
NO	AKSI/STRATEGI	JADUAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
6	Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan masyarakat pedesaan	√	√	√	√	Jumlah kader PKK Desa yang dilatih	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Fasilitasi Penguatan TP. PKK	115.225.000	115.225.000	115.225.000	115.225.000
		√	√	√	√	Jumlah strata posyandu mandiri		Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Pokjanal Posyandu	66.512.585	66.512.585	66.512.585	66.512.585
		√	√	√	√	Jumlah desa yang masyarakatnya berpartisipasi dalam gotong royong		Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
		√			√	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang dilatih		Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat	70.284.500			70.284.500
		√	√	√	√	Jumlah peserta P3MD yang dilatih		Pelatihan P3MD		183.168.400		183.168.400
			√		√	Jumlah peserta penguatan lembaga RT/RW yang di latih		Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi RT / RW	34,933,750	41,920,500	41,920,500	20,960,250
				√	√	Jumlah peserta penguatan kapasitas LPMD/K yang di latih		Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi LPMD/K			56.075.000	56.075.000

						TARGET						
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV			
Meningkatnya IndeK Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa		Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik				25%	30%	30%	15%			
NO	AKSI/STRATEGI	JADUAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
7	Meningkatkan perekonomian masyarakat yang kuat melalui pengembangan potensi Badan Usaha Milik Desa dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat	√	√	√	√	Jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes dan pengurusnya sudah dilatih	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	214.567.675	214.567.675	214.567.675	214.567.675
		√	√	√	√	Jumlah inovasi teknologi yang di ikut sertakan dalam lomba tingkat Provinsi dan tingkat nasional		Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Nasional	32.065.875	32.065.875	32.065.875	32.065.875
		√	√	√	√	Jumlah keluarga yang diberdayakan ekonominya secara informal		Pemberdayaan Usaha Ekonomi Keluarga dan Usaha Sektor Informal	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
				√	√	Jumlah desa yg direvitalisasi Posyanteknya		Revitalisasi Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)			22.500.000	22.500.000
		√	√	√	√	Jumlah aset eks PNPM- Mpd yang dilestarikan		Pelestarian Aset dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Program PNPM-MP	48.527.150	48.527.150	48.527.150	48.527.150
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA				TARGET						
Terwujudnya kemandirian desa berbasis sumberdaya/ potensi unggulan desa		Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi				25%	30%	30%	15%			
NO	AKSI/STRATEGI	JADUAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
8	Meningkatkan pembangunan desa, potensi desa, dan sumber daya desa		√	√	√	Jumlah desa yang difasilitasi untuk melaksanakan musrenbangdes	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa		51.982.400	51.982.400	51.982.400
		√	√	√	√	Jumlah unsur Masyarakat/kelembagaan masyarakat desa dan unsur TNI yang berpartisipasi dalam mendukung kegiatan TMMD dan BSMSS		Fasilitasi TMMD dan BSMSS	61.866.475	61.866.475	61.866.475	61.866.475
		√	√	√	√	Jumlah desa terbaik tingkat kabupaten		Penyelenggaraan Perlombaan Desa	82,500,000	99,000,000	99,000,000	49,500,000

		√	√		√	Jumlah desa yang di fasilitasi untuk memperoleh bantuan keuangan provinsi		Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	57.017.200	57.017.200		57.017.200	
			√			Jumlah desa/kel yang dibina		Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Sumber Daya Desa/Kelurahan		70.564.900			
					√	Jumlah desa yang difasilitasi		Fasilitasi Penataan Batas Desa				60.000.000	
						TARGET							
SASARAN STRATEGIS						INDIKATOR KINERJA				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
Meningkatnya Indek Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa						Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan)				25%	30%	30%	15%
NO	AKSI/STRATEGI	JADUAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)				
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV	
9	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel	√	√	√	√	Jumlah desa yang aparatur desanya dilatih bidang pengelolaan keuangan desa		Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	64.500.000	64.500.000	64.500.000	64.500.000	
		√	√	√	√	Jumlah desa yang aparatur desanya dilatih bidang manajemen pemerintahan desa		Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	71.087.500	71.087.500	71.087.500	71.087.500	
		√	√	√	√	Jumlah desa yang dimonev terkait pilwu		Monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang fasilitasi pemilihan kuwu	26.343.750	26.343.750	26.343.750	26.343.750	
		√	√	√	√	Jumlah dokumen profil desa yang disusun		Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	40.990.000	40.990.000	40.990.000	40.990.000	
		√		√	√	Jumlah desa yang anggota BPD nya dilatih		Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	61.786.667		61.786.667	61.786.667	
		√		√	√	Jumlah desa yang diberi pembekalan terkait pilwu		Pembekalan persiapan penyelenggaraan pemilihan kuwu	58.696.667		58.696.667	58.696.667	
		√	√		√	Jumlah desa yang dimonev terkait penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	66.733.333	66.733.333		66.733.333	
		√	√	√	√	Jumlah desa yang difasilitasi penyelesaian masalah kedesaan		Fasilitasi Penyelesaian Masalah Kedesaan	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	
		√	√	√	√	Jumlah kuwu yang dilantik		Pengesahan dan pelantikan kuwu terpilih	53.891.250	53.891.250	53.891.250	53.891.250	
				√	√	Jumlah Perbup yang dievaluasi		Evaluasi Perbup tentang Pemerintah Desa			15.000.000	15.000.000	
						TARGET							
SASARAN STRATEGIS						INDIKATOR KINERJA				TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
Tercapainya peningkatan fungsi pembinaan dan pengawasan aparatur kecamatan						Terwujudnya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan pendamping desa				25%	30%	30%	15%

NO	AKSI/STRATEGI	JADUAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			
		TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV				ANGGARAN (Rp)	TR.I	TR.II	TR.III
10	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan pendamping desa	√	√	√	√	Terfasilitasinya pengelolaan administrasi desa bagi fasilitator kecamatan dan pendamping desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan	Forum Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa bagi Fasilitator Kecamatan	11.250.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000



Sumber
BUPATI CIREBON 2019

Drs. H. SUMAJAYA PURWADISASTRA, MM., M.Si

|

|

**KESELERASAN RPJMD
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	NO	PROGRAM			KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)		CATATAN	
					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TERKAIT	TIDAK TERKAIT		
1	Meningkatnya aktivitas kehidupan beragama dan kesalehan sosial masyarakat serta toleransi antar dan intern umat beragama	1	Angka Melek Huruf Alquran Lulusan SD/MI		Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan	AMH Alquran	AMH Alquran	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Keagamaan	Sertifikat bukt bisa dan mampu baca dan tulis Al - Qur'an	973,962			
		2	Angka Melek Huruf Alquran Lulusan SMP/MTs		Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan	AMH Alquran	AMH Alquran	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Keagamaan untuk Baca Tulis Al Qur'an Siswa SMP	Pembelajaran Baca Tulis Al Qur'an terhadap siswa SMP	377,413			
		3	Angka Melek Huruf Alquran Lulusan SMA/MA		Program Pendidikan Menengah	APK, APM, AMO	AMO						
		4	Angka Melek Huruf Alquran Lulusan SMK		Program Pendidikan Menengah	APK, APM, AMO	AMO						
		5	Jumlah Siswa Yang Hafal Juz Amma pada Pendidikan SLTP dan SLTA		Program Pendidikan Menengah	APK, APM, AMO	AMO						
		6	Jumlah DKM yang menyelenggarakan kegiatan Ba'da Maghrib Mengaji		Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan	Meningkatnya jumlah DKM yang menyelenggarakan Ba'da Maghrib menaji	Jumlah DKM yang menyelenggarakan Ba'da Maghrib menaji						
		7	Jumlah Penghapal Alquran		Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama	Jumlah Penghapal Alquran						
		8	Prestasi Lomba Keagamaan Tingkat Provinsi Jawa Barat		Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama	Prestasi Lomba Keagamaan Tingkat Provinsi Jawa Barat						
		9	Jumlah Kasus Konflik Yang Bermanuasa Agama		Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama	Jumlah Kasus Konflik Yang Bermanuasa Agama						
2	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua	1	Peningkatan Indeks Pendidikan	1	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan	Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS.	Bantuan Biaya Operasional SMP Negeri 1 Atap	430			
				2	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan	Penyelenggaraan Paket B setara SMP	- PKBM Kesetaraan Paket B Setara SMP - PKBM Kesetaraan Paket A Setara SD	2.463.982			
				3	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan	Penyediaan Beasiswa Transisi	Peserta Didik Baru SMP yang kurang mampu	5.029.409			
				4	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Peningkatan Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan	Kegiatan Expo Pendidikan	Pameran Pembangunan Bidang Pendidikan	200			
				5	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan	Peningkatan Kesejahteraan Guru PNS dan Guru Bantu Daerah Terpencil	Guru SD di Daerah terpencil	297,629			
				6	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan	Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar SD	Juara Lomba Gugus SD dan Pengelola Perpustakaan terbaik	178,45			
				7	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Dasar	Pelaksanaan lomba: OSN, FLSN, O2SN, Calistung, Pasanggiri Bahasa dan Sastra Sunda/Cirebon	1.334.955			
				8	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan	Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Peserta Bimbingan Teknis Guru TIK	5.759.480			
				9	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	SK Akreditasi Sekolah Dasar	499,434			
				10	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan MONEV US/UN SD	516,509			

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM			KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)		CATATAN	
				NO								
				11	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Paket B Setara SMP	Sertifikat Peserta Bimbingan Teknis	127,277		
				12	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan	Bimbingan Teknis Penataan Penilaian Angka Kredit Fungsional	Dokumen Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru	124,448		
				13	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru layak Mengajar	Kompetensi Guru	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Calon Peserta Diklat Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	400,057		
				14	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru layak Mengajar	Kompetensi Guru	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	Dokumen Bahan Pelatihan dan Sertifikat	275,296		
				15	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru layak Mengajar	Kompetensi Guru	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peserta Bimtek program dan aplikasi Data Pokok Pendidikan	383,68		
				16	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru layak Mengajar	Kompetensi Guru	Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peserta Bimbingan Teknis Verifikasi dan validasi Data NUPTK	297,025		
				17	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru layak Mengajar	Kompetensi Guru	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dokumen Rencana dan Program Kerja Pendidikan Tahun 2019	283,4		
		2	Angka Melek Huruf (AMH) pada Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	1	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf (AMH)	AMH	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Warga Belajar Pendidikan Keaksaraan Fungsional	7.268.128		
				2	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf (AMH)	AMH	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	Sertifikat Peserta Bimbingan Teknis LKP	132,46		
				3	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf (AMH)	AMH	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	PTK PNF berprestasi	310,38		
				4	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf (AMH)	AMH	Pengembangan Data dan Informasi Kelembagaan dan Sarana Keagamaan	Dokumen Data dan Informasi Pendidikan Non Formal	43.000		
		3	Rata-Rata Lama Sekolah	1	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Akreditasi Sekolah dan Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Sosialisasi dan Advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan	Dokumen Capaian Target Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pendidikan	204		
				2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Akreditasi Sekolah dan Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Dokumen Data Profil Pendidikan dan Kartu NISN Siswa Baru Kelas I SD	979,465		
				3	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Akreditasi Sekolah dan Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	198,625		
				4	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Akreditasi Sekolah dan Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Fasilitasi Pelayanan Pendidikan	Penyelenggaraan PPDB On Line dan Peserta pembinaan pencegahan dan penyalahgunaan penyimpangan perilaku siswa	4.326,677		
				5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Akreditasi Sekolah dan Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Penyusunan Capaian Target SPM Bidang Pendidikan	Dokumen Laporan Hasil Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Pendidikan	174,4		
		4	Angka Partisipasi Kasar (SD, SMP, SMA)	1	Program Pendidikan Menengah	APK, APM, AMQ	AMQ	Penyelenggaraan Paket C setara SMU	PKBM Kesetaraan Paket C setara SMA	3.220.842		
		5	Angka Partisipasi Murni (SD, SMP, SMA)	2	Program Pendidikan Menengah	APK, APM, AMQ	AMQ	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Paket C	Sertifikat Peserta Bimtek	127,652		
				3	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK)	APK	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SMP	Juara I, II dan III Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tingkat Kabupaten	411.660		
				4	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK)	APK	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP	Guru SMP dan Calon Pendamping mendapat Sertifikat	861,195		
				5	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK)	APK	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SMP/MI/SMPLB serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SMP	1. Materi Sosialisasi dan Bimtek 2. Laporan hasil sosialisasi dan bimtek	66.322.955		
				6	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK)	APK	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP	Pelaksanaan lomba: OSN, FLS2N, O2SN, TUB, Pasanggih Bahasa dan Sastra Sunda/Cirebon	460.350		
				7	Program Pendidikan Non Formal	Angka Partisipasi Kasar (APK)	APK	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	Sertifikat dan SK Akreditasi Lembaga Pendidikan	90.000		

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	CATATAN			
				8	Program Pendidikan Non Formal	Angka Partisipasi Kasar (APK) APK	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Sertifikat Peserta Bimtek Penyusunan Kurikulum bahan ajar dan Model pembelajaran KF	139.325		
				9	Program Pendidikan Non Formal	Angka Partisipasi Kasar (APK) APK	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan UN Kesetaraan Paket A, B dan C	55.600		
		6	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	1	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Pembangunan gedung sekolah SD	Gedung Sekolah	2.428.561		
				2	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar	9.352.795		
				3	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Penambahan ruang guru sekolah SD	Ruang Kerja Guru	1.011.583		
				4	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	Ruang Laboratorium Komputer	2.100.000		
				5	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Pembangunan ruang serba guna/aula	Ruang Serbaguna pada SDN 1 Markangen Kec.Plumbon	100.000		
				6	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD	Halaman sekolah yang terpasang vaving blok, Pagar lingkungan sekolah	14.379.344		
				7	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SMP	Dokumen Hasil Pelaksanaan Movev BOS dan UN SMP	105.500		
				8	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Pembangunan perpustakaan sekolah SD	Ruang Perpustakaan Sekolah	2.019.450		
				9	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SD	Jamban Siswa	933.100		
				10	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa SD	Buku referensi, pengayaan, panduan pendidik dan Raporit Siswa, Buku baca tulis Ajour'an	3.213.295		
				11	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD	Alat Peraktik dan Peraga Pendidikan	4.205.982		
				12	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Pengadaan Mebeleur Sekolah SD	Meubelair Sekolah	3.584.373		
				13	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD	Ruang Kelas Sekolah	141.102.878		
				14	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga	Lapangan dan Sarana Prasarana Olah Raga Sekolah	250		
				15	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Ruang Perpustakaan Sekolah SD	213.761		
				16	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SD	Juara I, II dan III Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten	213.313		
				17	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD	Guru SD dan Calon Pendamping mendapat Sertifikat	674.329		
				18	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Pembinaan SMP Terbuka	1. Pengadaan Seragam Batik untuk siswa terbuka kelas 7, 2. Juara Lomojari, 3. Materi Workshop	234.743		
				19	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD	1. Materi Sosialisasi dan Bimtek 2. Laporan hasil sosialisasi dan bimtek	163.932.852		
				20	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia tingkatan sekolah	Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMP	Ruang Kelas Baru SMP	12.639.447		

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM			KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)		CATATAN	
				NO								
				21	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia <u>tingkatan sekolah</u>	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia <u>tingkatan sekolah</u>	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Lapangan Parkir SMP	Jalan Lingkungan SMP Negeri 2 Suranenggala	1.100.000		
				22	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia <u>tingkatan sekolah</u>	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia <u>tingkatan sekolah</u>	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SMP	Sarana Air Bersih dan Jamban Sekolah	1.650.000		
				23	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia <u>tingkatan sekolah</u>	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia <u>tingkatan sekolah</u>	Pengadaan Buku-Buku Alat Tulis Siswa SMP	Sarana Air Bersih dan Jamban Sekolah	1.650.000		
				24	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia <u>tingkatan sekolah</u>	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia <u>tingkatan sekolah</u>	Pengadaan Buku-Buku Alat Tulis Siswa SMP	Buku referensi, pengayaan, panduan pendidik dan Raport	2.248.495		
				25	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia <u>tingkatan sekolah</u>	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia <u>tingkatan sekolah</u>	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP	Alat Peraga dan Peraktik Pembelajaran Siswa SMP	6.000.000		
				26	Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia <u>tingkatan sekolah</u>	Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per Usia <u>tingkatan sekolah</u>	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP	Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri	22.052.407		
3	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	Angka Harapan Hidup (AHH)		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Adanya tempat pengelolaan makanan yang higienisi	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Meningkatnya jumlah petugas dim peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer (pengobatan rasional, pel.Kes gigi, pel laboratorium, labkesda dan pel kegawaldaruratan Puskesmas)	243,746		
					Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang aman dan bermutu di puskesmas dan jaringannya	Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1. Tersedianya obat, perbekalan kesehatan dan reagen yang aman dan bermutu di puskesmas dan jaringannya 2. Terlaksananya maring alat kesehatan 3. Terlaksananya kalibrasi 72 alat puskesmas			
					Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang aman dan bermutu di puskesmas dan jaringannya	Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Telatihnya petugas pengelola obat tentang PIO, Konseling, visite dan Home care	219,405		
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Adanya tempat pengelolaan makanan yang higienisi	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan di pos kesehatan tebaran, natal & tahun baru dan P3K petugas dalam penanganan kasus kegawaldaruratan dan bencana	927,319		
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Adanya tempat pengelolaan makanan yang higienisi	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Jumlah yang menerima biaya operasional dan pemeliharaan	22.506.022		
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Adanya tempat pengelolaan makanan yang higienisi	Pelayanan Operasi Katarak	Jml Penderita katarak yang dilemukan (penjaringan kasus) dari keluarga miskin dapat dilakukan operasi	641,826		
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Adanya tempat pengelolaan makanan yang higienisi	Pelayanan Kesehatan Pengembangan/Khusus	Jumlah Puskesmas yang mampu melaksanakan upaya kesehatan tradisional, perawatan kesehatan masyarakat dan kesehatan indera	305,539		
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Adanya tempat pengelolaan makanan yang higienisi	Peningkatan Kesehatan Jemaah Calon Haji	jumlah jamaah haji yang terpantau kondisi kesehatannya melalui pemeriksaan dan pembinaan di puskesmas RS dan Dinas Kesehatan	149,444		
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Adanya tempat pengelolaan makanan yang higienisi	Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja	Seluruh sekolah melaksanakan penjaringan dan pelayanan kesehatan anak sekolah, Perwakilan SD, Remaja dari umur 12 s/d 18 tahun, anak SD	173,507		
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Adanya tempat pengelolaan makanan yang higienisi	Pembinaan Sarana Kesehatan Swasta	Sarana kesehatan swasta melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku	32,931		
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Adanya tempat pengelolaan makanan yang higienisi	Penyediaan Dukungan Manajemen BOK		757,553		

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	NO	PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)		CATATAN	
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Adanya tempat pengelolaan makanan yang higienisi	Penyediaan Dukungan Manajemen Jaminan Persalinan		136.819		
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Adanya tempat pengelolaan makanan yang higienisi	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas		22.584.529		
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Adanya tempat pengelolaan makanan yang higienisi	Penilaian Puskesmas Berprestasi	Terpilinya Puskesmas berprestasi			
					Program Pengawasan Obat dan Makanan	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Adanya tempat pengelolaan makanan yang higienisi	Pengawasan dan Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan	Meningkatnya cakupan tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	71.100		
					Program Pengawasan Obat dan Makanan	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Adanya tempat pengelolaan makanan yang higienisi	Pengawasan dan Pembinaan Tempat-tempat Umum	Meningkatnya cakupan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	48.253		
					Program Pengawasan Obat dan Makanan	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Adanya tempat pengelolaan makanan yang higienisi	Pengawasan dan Pembinaan Industri	Meningkatnya cakupan industri yang memenuhi syarat kesehatan	29.512		
					Program Pengawasan Obat dan Makanan	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Adanya tempat pengelolaan makanan yang higienisi	Pengawasan Obat (distribusi dan penggunaan)	1. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan obat narkotika dan psikotropika 2. sosialisasi Gerakan Masyarakat Menggunakan Obat	71.462		
					Program Pengawasan Obat dan Makanan	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Adanya tempat pengelolaan makanan yang higienisi	Bimbingan dan Penyuluhan Keamanan Pangan	Terbinanya industri rumah tangga pangan yang memenuhi syarat kesehatan	58.470		
					Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Adanya perubahan perilaku masyarakat dari tidak sehat menjadi berperilaku sehat	PHBS	Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Peningkatan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat, Masyarakat, Pemuda Se-Kecamatan Pasaleman, Pemuda dan Karier	783.913		
					Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Adanya perubahan perilaku masyarakat dari tidak sehat menjadi berperilaku sehat	PHBS	Pengembangan Indikator Desa Siaga Aktif	Petugas Siaga sehat, Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Desa, Desa Siaga	564.305		
					Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan pelayanan kesehatan pra lansia dan Cakupan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan pelayanan kesehatan pra lansia dan Cakupan pelayanan kesehatan lansia	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Semua desa memiliki Posbindu	44.738		
					Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (TPM)	Menurunnya jumlah kasus baru penyakit tidak menular sebesar 25%	Menurunnya jumlah kasus baru penyakit tidak menular sebesar 25%	Surveilans Faktor Risiko PTM (Penyakit Tidak Menular)	Pengujung Posbindu yang berusia 15-59 tahun, kader posbindu se kecamatan palimanan Masyarakat	80.091		
					Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (TPM)	Menurunnya jumlah kasus baru penyakit tidak menular sebesar 25%	Menurunnya jumlah kasus baru penyakit tidak menular sebesar 25%	Pengendalian Kesehatan Jiwa	Cakupan Penemuan kasus gangguan kesehatan jiwa menggunakan sistem 2 menit	50.000		
					Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Puskesmas terakreditasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,25 di UPT Kesehatan Puskesmas berkinerja baik	Puskesmas terakreditasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,25 di UPT Kesehatan Puskesmas berkinerja baik	Penyusunan Standar Kesehatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat & Dokumen Naskah Akademik Perubahan Perda Retribusi	666.600		
					Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Puskesmas terakreditasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,25 di UPT Kesehatan Puskesmas berkinerja baik	Puskesmas terakreditasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,25 di UPT Kesehatan Puskesmas berkinerja baik	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Terselenggaranya Penyusunan Buku Profil Kesehatan dan Pertemuan Evaluasi SPM, dan Penyelenggaraan Pengelolaan Data & Informasi	143.162		
					Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Puskesmas terakreditasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,25 di UPT Kesehatan Puskesmas berkinerja baik	Puskesmas terakreditasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,25 di UPT Kesehatan Puskesmas berkinerja baik	Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi kesehatan	88.480		

NO	SASAPAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASAPAN	NO	PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)		CATATAN	
					Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Puskesmas terakreditasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,25 di UPT Kesehatan Puskesmas berkinerja baik	Puskesmas terakreditasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,25 di UPT Kesehatan Puskesmas berkinerja baik	Penilaian Kinerja Puskesmas		60,483		
					Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Puskesmas terakreditasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,25 di UPT Kesehatan Puskesmas berkinerja baik	Puskesmas terakreditasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,25 di UPT Kesehatan Puskesmas berkinerja baik	Akreditasi Puskesmas	Terselenggaranya Sosialisasi akreditasi, Pendampingan implementasi mutu oleh Tim Pembina dan Tim Mentor, serta Terselenggaranya Evaluasi upaya peningkatan mutu puskesmas	2.794.997		
					Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Puskesmas terakreditasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,25 di UPT Kesehatan Puskesmas berkinerja baik	Puskesmas terakreditasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,25 di UPT Kesehatan Puskesmas berkinerja baik	Peningkatan Kapasitas SDM	Tenaga Fungsional yang memiliki sertifikat sebagai tenaga fungsional	300.000		
					Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Puskesmas terakreditasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,25 di UPT Kesehatan Puskesmas berkinerja baik	Puskesmas terakreditasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,25 di UPT Kesehatan Puskesmas berkinerja baik	Manajemen Pengelolaan SDM	Seluruh Puskesmas mampu memetakan analisis jabatan dan analisis beban kerja di puskesmas	50.000		
					Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan sarana sanitasi dasar	Cakupan sarana sanitasi dasar	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok	Cak. RT tdk merokok dim ruangan	500.000		
					Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan serta Prestasi dalam Lomba Sekolah Sehat Tingkat BKPP dan Provinsi Jawa Barat	Prestasi dalam Lomba Sekolah Sehat Tingkat BKPP dan Provinsi Jawa Barat	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	Akses rumah tangga terhadap sarana air bersih dan akses rumah tangga terhadap jamban sehat,	470,823		
					Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan serta Prestasi dalam Lomba Sekolah Sehat Tingkat BKPP dan Provinsi Jawa Barat	Prestasi dalam Lomba Sekolah Sehat Tingkat BKPP dan Provinsi Jawa Barat	Klinik Sanitasi	Pasien dan klien diberikan KIP/K di klinik sanitasi dan dilaksanakannya intervensi lingkungan terhadap masyarakat	73,368		
					Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan serta Prestasi dalam Lomba Sekolah Sehat Tingkat BKPP dan Provinsi Jawa Barat	Prestasi dalam Lomba Sekolah Sehat Tingkat BKPP dan Provinsi Jawa Barat	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Cakupan rumah tangga akses terhadap jamban keluarga, Peningkatan akses masyarakat terhadap jamban keluarga, Tokoh Masyarakat, Tomas , Kader Posyandu	145,952		
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1x24 jam, dan UCI Desa	Penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1x24 jam, dan UCI Desa	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	Terlaksananya fogg fokus 100% dari kasus, Pemberantasan DBD	1.377.414		
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1x24 jam, dan UCI Desa	Penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1x24 jam, dan UCI Desa	Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	angka penemuan kasustatalaksana pnemoni, tata laksana diare, penemuan kasus kusta, cacat 2 kusta, DBD yang ditangani	719,178		
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1x24 jam, dan UCI Desa	Penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1x24 jam, dan UCI Desa	Peningkatan Imunisasi	Terlaksananya pelayanan imunisasi pada bayi, bumi dan anak sekolah di Kabupaten Cirebon	419,82		
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1x24 jam, dan UCI Desa	Penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1x24 jam, dan UCI Desa	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Meningkatnya SKD KLB penyakit potensial KLB/wabah di masyarakat, Ketepatan laporan (W1, W2, dan STP)	351,393		

NO	SASAPAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASAPAN	NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	CATATAN				
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1x24 jam, dan UCI Desa	Penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1x24 jam, dan UCI Desa	Penanggulangan HIV/AIDS	1. pelatihan LKB, 2. MVCT, 3. sosialisasi HIV di masyarakat, 4. sosialisasi di populasi kunci, 5. pert pojka HIV, 6. pert jejaring LSM, 7. perte. Koordinasi dgn SKPD, 8. HAS, 9. Ileaflet, 10. poster, 11. lembar balik, 12. buku saku, Kesehatan Ibu dan Anak, Masyarakat, 26 Kader KR TARUNA dan PONPES, osialisasi dan Penanggulangan HIV/AIDS di 40	1.425.824		
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1x24 jam, dan UCI Desa	Penanggulangan KLB penyakit dan keracunan makanan 1x24 jam, dan UCI Desa	Penanggulangan Tuberkulosis	Angka Cakupan pengobatan semua kasus TB (CDR)	300.000		
		2	Angka Kematian Ibu (AKI)		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Rasio kematian ibu	Angka Kematian Ibu (AKI)	Peningkatan Kapasitas Kabupaten dalam Penanggulangan Komplikasi Kebidanan dan Bayi	Peningkatan kapasitas nakes dalam penanganan persalinan dan nifas normal sesuai dengan standar, pengambilan keputusan berKB, KB Pasca Salin, penanganan kegawatdaruratan ibu dan bayi, Puskesmas PKRT, Pengenalan tanda bahaya bagi kader	405.343		
					Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Rasio kematian ibu	Angka Kematian Ibu (AKI)	Peningkatan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas	Bidan peserta ANC terpadu, Tim pembahasan kasus kematian ibu, tim pengkaji audit maternal, manajemen pelayanan KB di Puskesmas, Penguatan program KIA bagi BPM	558.917		
					Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Rasio kematian ibu	Angka Kematian Ibu (AKI)	Pembangunan Sistem Implementasi Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan neonatal, meningkatnya kinerja klinis Puskesmas PONED	153.952		
					Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Rasio kematian ibu	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jaminan Persalinan		2.079.770		
		3	Angka Kematian Bayi (AKB)		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Persentase neo komplikasi yang ditangani rasio kematian bayi	Angka Kematian Bayi (AKB)	Peningkatan Kapasitas Kabupaten dalam Penanganan Bayi dan Balita	Peningkatan kapasitas nakes dalam penanganan bayi balita sakit dengan MTBS, penanganan BBLR, SDIDTK dan Kelas Ibu Balita	419.267		
					Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Persentase neo komplikasi yang ditangani rasio kematian bayi	Angka Kematian Bayi (AKB)	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita	Peningkatan kapasitas nakes dim penanganan kegawatdaruratan pada bayi, kasus komplikasi neonatal >80 dan serta kasus bayi dan balita sakit yang ditangani oleh nakes dengan pendekatan MTBS dari 50% sehingga jumlah kematian bayi menurun sebesar 25% dari tahun sebelumnya	157.342		
		4	Balita gizi buruk (BB/TB)		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Menurunnya Prevalensi Gizi Buruk, temuan kasus baru pada bayi dan balita, Dan Menurunnya Prevalensi Anemia dan KEK pada Remaja, Bumil dan Bufas	Balita gizi buruk (BB/TB)	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	% balita dilimbang, % ibu hamil mendapat fe, % remaja puteri mendapat fe, % jumlah KK mengonsumsi garam beryodium, % bayi dan anak balita mndapat kapsul vit A 2 x setahun, Menurunkan angka kematian Ibu,Bayi dan Balita, Ibu hamil kurang darah	624.143		
					Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Menurunnya Prevalensi Gizi Buruk, temuan kasus baru pada bayi dan balita, Dan Menurunnya Prevalensi Anemia dan KEK pada Remaja, Bumil dan Bufas	Balita gizi buruk (BB/TB)	Penanggulangan Gizi Buruk	% balita Gizi Buruk mendapat perawatan, % balita gizi buruk menurun, Meningkatkan kesehatan anak balita gizi buruk, Menurunkan angka kematian Ibu,Bayi dan Balita, Balita dan Balita Gizi Buruk, balita GB, Ibu Hamil dan Balita, Kader	2.548.275		

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	NO	PROGRAM			KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)		CATATAN
					Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Menurunnya Prevalensi Gizi Buruk, temuan kasus baru pada bayi dan balita, Dan Menurunnya Prevalensi Anemia dan KEK pada Remaja, Bumil dan BuFas.	Balita gizi buruk (BB/TB)	Penguatan Peningkatan Cakupan ASI Eksklusif di Kabupaten	% Cakupan ASI Eksklusif bayi 0-6 bulan	155,123		
		5	cakupan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin pada pelayanan dasar		Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Cakupan pelayanan kesehatan dasar peserta BPJS	cakupan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin pada pelayanan dasar	Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas)	Jumlah fasilitas tk pertama (Puskesmas) yang melaksanakan pelayanan kesehatan	95.909.236		
					Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Cakupan pelayanan kesehatan dasar peserta BPJS	cakupan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin pada pelayanan dasar	Manajemen Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan	meningkatnya jumlah kepesertaan sasaran JKN di Kab. Cirebon	100.000		
		6	Rasio rumah sakit per satuan penduduk		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Jumlah rumah sakit terbangun	Rasio rumah sakit per satuan penduduk					
		7	Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk		Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan iaringannya	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal sarana dan prasarana	Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk	Pembangunan Puskesmas		2.400.000		
					Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan iaringannya	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal sarana dan prasarana	Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk	Pembangunan Puskesmas Pembantu		1.800.000		
					Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan iaringannya	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal sarana dan prasarana	Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk	Pengadaan Puskesmas Keliling		1.500.000		
					Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan iaringannya	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal sarana dan prasarana	Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas		2.500.000		
					Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan iaringannya	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal sarana dan prasarana	Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	Terbangunnya puskesmas pembantu dan polindes	1.600.000		
					Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan iaringannya	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal sarana dan prasarana	Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk	Pengembangan Sarana dan Prasarana Fisik Puskesmas	Pelayanan Masyarakat untuk warga di 6 desa, pemagaran pkm lurah	1.690.000		
					Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan iaringannya	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal sarana dan prasarana	Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas	Terbangunnya Puskesmas dengan bangunan yang memadai	1.500.000		
					Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan iaringannya	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal sarana dan prasarana	Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk	Pengembangan Bangunan UPT Kesehatan	Tersedianya UPT Kesehatan Masyarakat	550.000		
					Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan iaringannya	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal sarana dan prasarana	Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk	Pengadaan Sarana dan Prasarana UPT Kesehatan	Terlaksananya pengadaan alat kesehatan di UPT Labkesda dan Labkesling Kab Cirebon	3.200.000		
		8	Jumlah puskesmas yang menyediakan pelayanan dokter anak dan kandungan		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Jumlah rumah sakit terbangun	Jumlah puskesmas yang menyediakan pelayanan dokter anak dan kandungan	Pengadaan Sarana Rantai Vaksin		550.000		
		9	Rasio dokter terhadap penduduk		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Adanya tempat pengelolaan makanan yang higienis	Pelayanan Perizinan Praktik Perorangan dan Pembinaan Sarana Kesehatan	Legalisasi praktik perorangan	67.698		

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	NO	PROGRAM			KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)		CATATAN
		10	Rasio paramedis terhadap penduduk		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi	Adanya tempat pengelolaan makanan yang higienisi	Pelayanan Perizinan Praktik Perorangan dan Pembinaan Sarana Kesehatan	Legalisasi praktik perorangan	67,698		
		11	presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan		Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Terlayannya PBI daerah peserta BPJS sebanyak 213.645 jiwa	presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang termasuk ke dalam penerima bantuan iuran (PBI) daerah	35.000.000		
					Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Terlayannya PBI daerah peserta BPJS sebanyak 213.645 jiwa	presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	Kemitraan antara Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta dan RS dalam rangka Penguatan Sistem Rujukan	Perjanjian kerja sama antara pelayanan kesehatan dasar dengan rumah sakit	408,967		
					Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Terlayannya PBI daerah peserta BPJS sebanyak 213.645 jiwa	presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	Kemitraan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)	Tersedianya perangkat sistem informasi pelayanan kesehatan rujukan	104,490		
					Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Terlayannya PBI daerah peserta BPJS sebanyak 213.645 jiwa	presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	Kemitraan dengan Masyarakat Umum dan Organisasi Profesi	Nota kesepahaman (MoU) antara dinas kesehatan dgn masyarakat dan organisasi profesi	38,439		
		12	Jumlah Posyandu Purnama		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Tereselenggaranya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Tereselenggaranya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Strata Posyandu	Kader posyandu, 1 Paket, 390 orang, 60 kader, 100 orang, 11 desa, 119 posyandu kelurahan x 5 or x 10000 x 12 hl	725,282		
4	Terwujudnya masyarakat yang berbudaya, berketrampilan dan berjiwa kewirausahaan	1	Jumlah kawasan seni		Program Pengembangan Nilai Budaya	Bertambahnya produk budaya yang bertahan hidup	Jumlah produk budaya yang bertahan hidup	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah group seni yang direvitalisasi, direkonstruksi, diwariskan, dan diberi penghargaan	160.000		
					Program Pengembangan Nilai Budaya	Bertambahnya produk budaya yang bertahan hidup	Jumlah produk budaya yang bertahan hidup	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Jumlah kegiatan kajian nilai budaya melalui seminar dan lokakarya	330.000		
					Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terkelolanya museum, cagar budaya dan buku kebudayaan	Jumlah Museum, Cagar Budaya dan Buku Kebudayaan yang dikelola	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah kegiatan pameran kesenian	44.000		
					Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terkelolanya museum, cagar budaya dan buku kebudayaan	Jumlah Museum, Cagar Budaya dan Buku Kebudayaan yang dikelola	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Jumlah benda cagar budaya yang dikoleksi	75.000		
					Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terkelolanya museum, cagar budaya dan buku kebudayaan	Jumlah Museum, Cagar Budaya dan Buku Kebudayaan yang dikelola	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Jumlah garapan misi kesenian yang dipergelarkan di luar daerah, Hari Jadi Kabupaten Cirebon dan PHBN	387.000		
					Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terkelolanya museum, cagar budaya dan buku kebudayaan	Jumlah Museum, Cagar Budaya dan Buku Kebudayaan yang dikelola	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	Jumlah cagar budaya yang dipelihara yang menjadi tujuan wisata	235.000		
					Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terkelolanya museum, cagar budaya dan buku kebudayaan	Jumlah Museum, Cagar Budaya dan Buku Kebudayaan yang dikelola	Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah	Jumlah Gedung dan Kawasan seni yang dibangun	2.000.000		
					Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terkelolanya museum, cagar budaya dan buku kebudayaan	Jumlah Museum, Cagar Budaya dan Buku Kebudayaan yang dikelola	Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah judul buku kebudayaan yang dicetak	132.000		
					Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Bertambahnya kelompok budaya yang dibina	Jumlah kelompok budaya yang dibina	Fasilitasi Pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta	Jumlah lembaga yang dibina melalui kemitraan	165.000		
		2	Jumlah pertunjukan/pagelaran/ festival budaya tingkat nasional		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Bertambahnya pagelaran karya seni kreasi baru	Jumlah pagelaran karya seni kreasi baru	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah pelaksanaan upacara yang diikuti korp musik	400.000		
					Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Bertambahnya pagelaran karya seni kreasi baru	Jumlah pagelaran karya seni kreasi baru	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	Jumlah kegiatan yang mendukung keragaman budaya daerah	900.000		
					Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Bertambahnya pagelaran karya seni kreasi baru	Jumlah pagelaran karya seni kreasi baru	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah kreasi seni tematis yang difestivalkan tingkat pelajar, seniman daerah dan seniman nasional	700.000		

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	NO	PROGRAM			KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)		CATATAN
		3	Cakupan peserta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (spm)		Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.	Tersedianya tenaga kerja Terlatih dari pencari kerja per tahun.	Jumlah tenaga kerja Terlatih dari pencari kerja per tahun.	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja	Terlaksananya Pengadaan Sarana Peralatan Pendidikan dan Pelatihan Berupa: - Mesin Bubut - Kendaraan Praktek Roda 4 - Kendaraan Praktek Roda 2 - Mesin Jahit - Mesin Bordir - Mesin Las Tig - Mesin Las Mig - Mesin Gerinda Tangan - Mesin Bor Tangan	4.000.000		
					Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.	Tersedianya tenaga kerja Terlatih dari pencari kerja per tahun.	Jumlah tenaga kerja Terlatih dari pencari kerja per tahun.	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja: - Berbasis Kompetensi - Berbasis Kewirausahaan	8.090.000		
		4	Jumlah wirausahawan baru		Program peningkatan penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Bertambahnya pemuda yang memiliki kemampuan berwirausaha	Jumlah pemuda yang memiliki kemampuan berwirausaha					
					Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran	Jumlah kesempatan kerja bagi masyarakat	Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	22.973		
					Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Bertambahnya pemuda yang memiliki kemampuan berwirausaha	Jumlah Wirausahawan baru	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	440.000		
					Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Bertambahnya pemuda yang memiliki kemampuan berwirausaha	Jumlah Wirausahawan baru	Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda	Jumlah pemudayang mengikuti diklat life skills	154.000		
		5	Angka pengangguran terbuka		Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran	Berkurangnya Jumlah Pengangguran	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	- Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja - Jumlah Lowongan Kerja	407.178		
					Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran	Berkurangnya Jumlah Pengangguran	Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	506.623		
					Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran	Berkurangnya Jumlah Pengangguran	Penyebarluasan Informasi Prosedur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri	Terlaksananya Penyebarluasan informasi prosedur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja luar negeri	336.270		
					Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran	Berkurangnya Jumlah Pengangguran	Tenaga Kerja Mandiri	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri	329.000		
					Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran	Berkurangnya Jumlah Pengangguran	Job Fair	- Terlaksananya Pameran Bursa kerja dengan peserta - Jumlah lowongan kerja	407.658		
					Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran	Berkurangnya Jumlah Pengangguran	Pembinaan Pencari Kerja	Terbinanya Pencari Kerja	106.246		
					Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran	Berkurangnya Jumlah Pengangguran	Pemagangan Dalam Negeri	Terlaksananya Pemagangan dalam negeri	111.790		
					Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang terlindungi.	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Terlaksananya penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial melalui mediasi	58.938		
					Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang terlindungi	Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	Terlaksananya sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang: a. Peraturan Perusahaan; c. Organisasi Pekerja (Serikat Pekerja); d. LKS Bipartit b. Perjanjian Kerja Bersama.	193.514		

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	NO	PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)		CATATAN	
					Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang terlindungi	Pembinaan Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Terlaksananya Pembinaan persyaratan kerja dan kesejahteraan melalui: a. Bimtek b. Seminar BPJS	170.900		
					Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang terlindungi	Fasilitasi Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon	Terlaksananya Fasilitasi Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon	135.300		
					Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang terlindungi	Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit	- Terlaksananya Pemilihan Pekerja Teladan - Terlaksananya Pemilihan Perusahaan terbaik - Terlaksananya Bazar LKS Tripartit	275.000		
					Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Tercapainya Pelatihan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembaku	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan Kerja	Pelatihan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembaku	Terlatihnya dan terdidiknya masyarakat di lingkungan sekitar industri tembaku	400.000		
					Program Cirebon Bebas Pengangguran	Tercapainya Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Kampung Produktif	Peserta yang sudah mendapat pelatihan	300.529		
5	Terwujudnya kabupaten Cirebon sebagai daerah wisata berbasis budaya	1	Meningkatnya kunjungan wisatawan		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Bertambahnya kunjungan wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	2.500.000		
					Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Bertambahnya kunjungan wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Jumlah Produk Pariwisata Unggulan	440.000		
					Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Bertambahnya ODTW yang ditata	Jumlah ODTW yang ditata	Peningkatan pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah penataan ODTW	250.000		
					Program pengembangan kemitraan	Bertambahnya bentuk kerjasama pengembangan pariwisata	Jumlah kerjasama pengembangan pariwisata	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	Jumlah peserta koordinasi pariwisata	100.000		
					Program pengembangan kemitraan	Bertambahnya bentuk kerjasama pengembangan pariwisata	Jumlah kerjasama pengembangan pariwisata	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah kegiatan MICE yang dilaksanakan	430.000		
6	Terwujudnya kemandirian dan peningkatan peran pemuda serta budaya dan prestasi olahraga	1	Prestasi olahraga di tingkat Provinsi Jawa Barat		Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	Tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mengenai penyelenggaraan kepemudaan	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mengenai penyelenggaraan kepemudaan	Peningkatan keimanan dan ketakwaan kepemudaan	Jumlah pemuda yang mengikuti diklat Bimbingan Mental	55.000		
					Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	Tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mengenai penyelenggaraan kepemudaan	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mengenai penyelenggaraan kepemudaan	Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti rakor OKP	165.000		
					program peningkatan peran serta kepemudaan	Terbinanya anggota OKP di Kabupaten Cirebon yang memiliki peran strategis dalam menawal pembangunan	Jumlah anggota OKP di Kabupaten Cirebon yang dibina	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah Pembina Pramuka yang mengikuti pelatihan	220.000		
					program peningkatan peran serta kepemudaan	Terbinanya anggota OKP di Kabupaten Cirebon yang memiliki peran strategis dalam menawal pembangunan	Jumlah anggota OKP di Kabupaten Cirebon yang dibina	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Jumlah pemuda yang mengikuti diklat paskibra	660.000		
					program peningkatan peran serta kepemudaan	Terbinanya anggota OKP di Kabupaten Cirebon yang memiliki peran strategis dalam menawal pembangunan	Jumlah anggota OKP di Kabupaten Cirebon yang dibina	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi dan pelatihan pemuda pelopor kemandirian lingkungan	275.000		
					program peningkatan peran serta kepemudaan	Terbinanya anggota OKP di Kabupaten Cirebon yang memiliki peran strategis dalam menawal pembangunan	Jumlah anggota OKP di Kabupaten Cirebon yang dibina	Pameran prestasi hasil karya pemuda	Jumlah Kegiatan Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda	385.000		
					Program Upaya Pencegahan penyalahgunaan narkoba	Bertambahnya pemuda yang memiliki wawasan tentang NAPZA		Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan narkoba	110.000		
					Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatnya jumlah bibit dan atlet olahraga berprestasi	Jumlah Atlet dan Bibit Atlet Berprestasi	Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah	Jumlah cabor yang dikompesiskan	800.000		
					Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatnya jumlah bibit dan atlet olahraga berprestasi	Jumlah Atlet dan Bibit Atlet Berprestasi	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Jumlah Cabor yang dibina	800.000		
					Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatnya jumlah bibit dan atlet olahraga berprestasi	Jumlah Atlet dan Bibit Atlet Berprestasi	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Peringkat prestasi POPDA, PORSENITAS, PORPMDA, ORTRADPROV, PASANGGIRI	1.330.000		
					Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatnya jumlah bibit dan atlet olahraga berprestasi	Jumlah Atlet dan Bibit Atlet Berprestasi	Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	Jumlah kegiatan pemassalan olahraga di masyarakat	1.210.000		

NO	SASAPAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASAPAN	NO	PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)		CATATAN	
					Program Pembangunan infrastruktur perdesaan	Terbangunnya dan terpeliharanya Infrastruktur Jalan dan Jembatan Perdesaan						
8	Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai	1	Jumlah jalan produksi pertanian dan perikanan									
		2	Jumlah rumah tangga berakses air minum untuk keperluan sehari-hari		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Tersedianya sarana air limbah, sanitasi, sumber mata air dan jaringan air bersih bagi masyarakat						
		3	Jumlah daerah rawan banjir		Program Pengendalian Banjir	Berkurangnya tinggi dan lama genangan banjir						
		4	Persentase pengangkutan sampah		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya pelayanan persampahan untuk seluruh stakeholder di Kabupaten Cirebon (Pembangunan TPA SL baru)						
		5	Persentase penduduk yg terlayani sistem jaringan drainase Skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun		Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Terbangun dan terpeliharanya Saluran/Gorong-gorong di Kabupaten Cirebon						
		6	Persentase pengurangan sampah di perkotaan (daerah layanan persampahan)		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya pelayanan persampahan untuk seluruh stakeholder di Kabupaten Cirebon (Pembangunan TPA SL baru)						
		7	Cakupan ketersediaan rumah layak huni		Program Pembangunan Rusunawa	Terbangunnya Rusunawa						
		8	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten (pos jaga)		Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Terdidik dan terlalainya anggota pemadam kebakaran sehingga meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran						
9	Terwujudnya Cirebon yang bersih, asri dan lestari	1	Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah mandiri		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Berkurangnya timbulan sampah dan berkembangnya konversi sampah menjadi biogas		Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	PIS : Penyediaan prasarana dan sarana persampahan PIK : a. Penyediaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) b. Penyediaan kendaraan roda 3 pengangkut sampah c. Pengadaan mesin pencacah plastik d. Pengadaan mesin kompos e. Pengadaan mesin pengolah sampah f. Pengadaan mesin penghancur sampah (incenerator) g. Pengadaan kontainer sampah h. Pengadaan ionisator dengan hanggar i. Pengadaan gerobak sampah	46.117.450		

NO	SASAPAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASAPAN	NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	CATATAN		
						<p>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</p> <p>PIS : a. Pembentukan kelompok masyarakat pengelola sampah dan kelembagaan bank sampah b. Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui bintek pengelolaan sampah c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan sampah plastik d. Alat kebersihan dan bahan pembersih e. Peralatan pelebur plastik PIK : a. Pelatihan pengolahan sampah b. Diklat pengelolaan sampah c. Bintek peningkatan kerajinan bahan baju sampah kering d. Bintek peningkatan pengelola sampah Desa e. Bintek pengelolaan sampah mandiri f. Pelatihan pengelolaan sampah g. Pelatihan masalah sampah h. Pelatihan daur ulang sampah di tingkat RT/RW i. Sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam persampahan</p>	787.671			
		2	Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Terbangun dan terkelolanya RTH di 20 Kecamatan		<p>Penataan RTH</p> <p>PIS : Terbangunnya ruang terbuka hijau untuk umum (alun-alun kecamatan dan hutan kota) PIK : a. Pembangunan gapura b. Pembuatan RTH c. Penghijauan d. Taman kota</p>	2.218.159	
					Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau		<p>Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p> <p>Pembangunan prasarana dan sarana bangunan pelayanan umum dan taman</p>	2.133.035	
		3	Prosentase kawasan lindung		Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	a. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam gerakan rehabilitasi b. Pemulihan ekosistem pesisir serta secara swadaya masyarakat melakukan upaya rehabilitasi ekosistem pesisir				
					Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Ketersediaan sumber daya alam serta partisipasi masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim				
					Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	Terehabilitasi dan pulihnya kondisi sumber daya alam				
		4	Penghargaan Adipura		Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	Terehabilitasi dan pulihnya kondisi sumber daya alam				
		5	Jumlah sungai yang memenuhi kualitas baku mutu air		Program Penyediaan dan Pengelolaan Air baku	Berkurangnya daerah rawan air bersih				
					Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dibidang lingkungan dan tersedianya basis data & informasi lingkungan				
		6	Jumlah industri yang memenuhi kualitas baku mutu udara		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dibidang lingkungan dan tersedianya basis data & informasi lingkungan				

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	NO	PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)		CATATAN		
		7	Jumlah pengaduan kasus dugaan terjadinya pencemaran lingkungan		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terkendalinya kegiatan perusakan lingkungan hidup							
					Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Cirebon							
					Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Terlaksananya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup							
					Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Terlindungi dan terkonservasinya sumber daya alam							
10	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1	Jumlah komunitas										
		2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat desa dalam pembangunan	Mengualnya kapasitas lembaga masyarakat desa	Fasilitasi Penguatan TP.PKK	terlatihnya kader dan TP. PKK diselap tingkatan : (jumlah PKK aktif : RT 2.593, RW 9.168, desa/kel. 424, Kec. 40)	561.000			
					Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan	Mengualnya kapasitas lembaga masyarakat desa	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Pokjanal Posyandu	terbinanya Pokjanal Posyandu : (jumlah posyandu : pralama 0, madya 1.189/46%, purnama 738/28%, mandiri 664/26%, total 2.591 per Desember 2016)	427.626			
		3	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Terbinanya lembaga ekonomi pedesaan, BUMDES dan GOLEKMAH	Jumlah Lembaga Ekonomi Yang Terbina	Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	terlatihnya pengurus/pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	400.000			
					Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Terbinanya lembaga ekonomi pedesaan, BUMDES dan GOLEKMAH	Jumlah Lembaga Ekonomi Yang Terbina	Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Nasional	Terlaksananya Sosialisasi TTG 300 orang dari 10 Desa dan terlaksananya Gelar TTG Tingkat Provinsi Serta Tingkat Nasional	350.000			
					Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Terbinanya lembaga ekonomi pedesaan, BUMDES dan GOLEKMAH	Jumlah Lembaga Ekonomi Yang Terbina	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kelurga dan Usaha Sektor Informal	terbinanya kelompok usaha usaha ekonomi keluarga dan usaha sektor informal	400.000			
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan			Terbinanya lembaga ekonomi pedesaan, BUMDES dan GOLEKMAH	Jumlah Lembaga Ekonomi Yang Terbina	Revitalisasi Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)	Terlaksananya revitalisasi Posyantek	75.000					
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan			Terbinanya lembaga ekonomi pedesaan, BUMDES dan GOLEKMAH	Jumlah Lembaga Ekonomi Yang Terbina	Pelestarian Aset dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Program PNPMP	terlatihnya para pelaku PNPMPd mengenai pelestarian aset dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan program PNPMPd	425.000					
11	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	1	Nilai PDRB	1	Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya rencana pembangunan daerah yang memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan	Dokumen rencana Pembangunan Ekonomi	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	250.000			
		2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Peningkatan kualitas data dan informasi bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan	Data dan Informasi Hasil pembangunan ekonomi	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Penyelenggaraan pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	185.000			
					3	PDRB per kapita	3	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Peningkatan kualitas data dan informasi bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan	Data dan Informasi Hasil pembangunan ekonomi	Penyusunan dan pengumpulan data PDRB	Dokumen PDRB kecamatan	263.874
					4	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Peningkatan kualitas data dan informasi bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan	Data dan Informasi Hasil pembangunan ekonomi	Penyusunan dan Pengumpulan Data Survei Ekonomi Daerah	Dokumen Survei Ekonomi Daerah (SUSEDA)	360.000		
			4	Tingkat inflasi	1	Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah tentang Perekonomian	Terwujudnya Kebijakan Pemerintah Daerah yang optimal	Kebijakan Daerah Yang Optimal	Fasilitasi Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)	Laporan hasil rakor TPID	75.000		
			5	Jumlah daerah rawan pangan		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Penguatan cadangan pangan (ton setara beras)						

NO	SASAPAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASAPAN	NO	PROGRAM			KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)		CATATAN
					Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya ketahanan pangan						
		6	Nilai investasi		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terselenggaranya promosi, kerjasama investasi dan pembinaan penanaman modal	Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Investasi dan terbinyanya penanaman modal	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Meningkatkan Kerjasama Dalam Pengembangan Investasi di Kabupaten Cirebon	345.600		
					Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terselenggaranya promosi, kerjasama investasi dan pembinaan penanaman modal	Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Investasi dan terbinyanya penanaman modal	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA	Data Minat Investasi PMA/PMDN dan Non PMA/PMDN	153.301		
					Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terselenggaranya promosi, kerjasama investasi dan pembinaan penanaman modal	Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Investasi dan terbinyanya penanaman modal	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Tercapainya Koordinasi Tentang Skala Prioritas Potensi Investasi	186.624		
					Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terselenggaranya promosi, kerjasama investasi dan pembinaan penanaman modal	Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Investasi dan terbinyanya penanaman modal	Peningkatan kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terbinyanya Perusahaan	278.490		
					Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terselenggaranya promosi, kerjasama investasi dan pembinaan penanaman modal	Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Investasi dan terbinyanya penanaman modal	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Terselenggaranya Pameran Investasi	950.000		
					Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terselenggaranya promosi, kerjasama investasi dan pembinaan penanaman modal	Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Investasi dan terbinyanya penanaman modal	Penilaian Perusahaan PMDN / PMA Terbaik	Data dan Profil Perusahaan	196.992		
					Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Tersedianya cetak biru Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), penyederhanaan prosedur penanaman modal dan penanganan masalah penanaman modal	Cetak biru Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), penyederhanaan prosedur penanaman modal dan penanganan masalah penanaman modal	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Kajian Teknis Untuk Rancangan Peraturan Daerah Terkait Pelayanan Perizinan (Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air, dan Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D	194.466		
					Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Tersedianya cetak biru Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), penyederhanaan prosedur penanaman modal dan penanganan masalah penanaman modal	Cetak biru Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), penyederhanaan prosedur penanaman modal dan penanganan masalah penanaman modal	Penanganan Permasalahan Penanaman Modal Terkait Investasi	Penanganan Permasalahan Pengaduan Penanaman Modal Terkait Investasi	223.430		
					Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Tersedianya pedoman pengembangan penanaman modal sebagai kajian sumber daya alam sebagai potensi dan peluang investasi daerah	Pedoman pengembangan penanaman modal sebagai kajian sumber daya alam sebagai potensi dan peluang investasi daerah	Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	- Data Kajian Sumberdaya Yang Terkait Investasi - Data Hasil Analisa Kelayakan Kajian Potensi Investasi - Review Kajian Akademis Tentang RIUPM	535.680		
					Program Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Terselenggaranya sosialisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal pada masyarakat, pelaku usaha dan aparat desa	Terselenggaranya sosialisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal pada masyarakat, pelaku usaha dan aparat desa	Sosialisasi di Bidang Perizinan	Tersosialisasinya Masyarakat/ Pelaku Usaha Yang Belum Memiliki Izin	727.701		
					Program Peningkatan Kualitas pelayanan Perizinan	Tersedianya SISYANDU (Sistem Pelayanan Terpadu) untuk meningkatkan kualitas perizinan yang tepat waktu dan sesuai SOP	SISYANDU (Sistem Pelayanan Terpadu) untuk meningkatkan kualitas perizinan yang tepat waktu dan sesuai SOP	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	Terbangunnya SICANTIK (Sistem Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik	345.600		
					Program Peningkatan Kualitas pelayanan Perizinan	Tersedianya SISYANDU (Sistem Pelayanan Terpadu) untuk meningkatkan kualitas perizinan yang tepat waktu dan sesuai SOP	SISYANDU (Sistem Pelayanan Terpadu) untuk meningkatkan kualitas perizinan yang tepat waktu dan sesuai SOP	Operasionalisasi Pelayanan Perizinan	SK Perizinan	1.254.170		
					Program Peningkatan Kualitas pelayanan Perizinan	Tersedianya SISYANDU (Sistem Pelayanan Terpadu) untuk meningkatkan kualitas perizinan yang tepat waktu dan sesuai SOP	SISYANDU (Sistem Pelayanan Terpadu) untuk meningkatkan kualitas perizinan yang tepat waktu dan sesuai SOP	Pengembangan dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu	Terpeliharanya Manajemen Mutu Pelayanan /Upgrading ISO 9000:2008	165.888		

NO	SASAPAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASAPAN	NO	PROGRAM			KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)		CATATAN			
					Program Peningkatan Kualitas pelayanan Perizinan	Tersedianya SISYANDU (Sistem Pelayanan Terpadu) untuk meningkatkan kualitas perizinan yang tepat waktu dan sesuai SOP	SISYANDU (Sistem Pelayanan Terpadu) untuk meningkatkan kualitas perizinan yang tepat waktu dan sesuai SOP	Penyusunan Data Base Perizinan	Data dan Laporan Perizinan Serta Terwujudnya Database Manajemen Sistem	208.968					
					Program Peningkatan Kualitas pelayanan Perizinan	Tersedianya SISYANDU (Sistem Pelayanan Terpadu) untuk meningkatkan kualitas perizinan yang tepat waktu dan sesuai SOP	SISYANDU (Sistem Pelayanan Terpadu) untuk meningkatkan kualitas perizinan yang tepat waktu dan sesuai SOP	Penyusunan Data Minat Investasi PMA /PMDN dan Non PMA / PMDN	Tersusunnya Dokumen Data Minat Investasi	207.360					
					Program Penanganan pengaduan Bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Tersedianya pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Penyelenggaraan Survey IKM	Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Kepada Para Pemohon Perizinan/Non Perizinan Yang dipilih Secara Acak. Setelah Para Pelaku Pemohon Selesai Membuat Izin dan Menerima SK Perizinan/Non Perizinan	145,152					
				7	Persentase koperasi aktif	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi sebagai badan usaha dalam meningkatkan perekonomian daerah								
						Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Tersusunnya dokumen penerapan sistem IT bagi pengembangan koperasi								
						Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Tersusunnya keputusan bupati tentang pengembangan koperasi								
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya jumlah SDM yang mempunyai kompetensi pada pengadministrasian, pengelolaan keuangan, kemampuan pada jaringan usaha dan pembiayaan								
					8	Jumlah lokasi wisata kuliner di kecamatan	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Tertampungnya pedagang pasar tradisional dan tersedianya sarana dan prasarana pedagang kaki lima dan asongan							
				12	Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas	1	Menurunnya Jumlah penduduk miskin	Program Pengentasan Kemiskinan	Jumlah subsidi reskin untuk penerima manfaat						
								Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	Meningkatnya jumlah keluarga miskin dan PMKS lainnya yang mandiri						
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	Tersalurkannya Bantuan bagi Kaum Dhuafa dan Yatim Piatu 100%													
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial													
	Program Pembinaan Anak Terlantar	Terselenggaranya pembinaan terhadap anak terlantar													
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Meningkatnya pelayanan bagi penyandang cacat													
	Pembinaan Pantli Asuhan/ pantli jompo	Meningkatnya Pantli Asuhan/ Pantli Jompo yang terbina													
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya)	Meningkatnya kualitas pelayanan sosial bagi eks penyandang penyakit sosial													
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (pendayagunaan dan Pemberdayaan PSKS)	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial													

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	NO	PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)		CATATAN
					Program peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatnya hasil kajian dan kebijakan bidang kesejahteraan sosial dan agama dan meningkatnya penanganan bencana alam					
					Program Pengembangan Data dan Informasi Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya laporan data dan informasi keagamaan dan kesejahteraan sosial, data dana hibah dan bansos					
					Program pembinaan pengembangan dan peningkatan kapasitas lembaga dan pelaku kesejahteraan sosial	Meningkatnya Kemampuan Teknis Lembaga dan Pelaku Kesejahteraan Sosial					
		2	Meningkatnya cakupan listrik bagi penduduk								
13	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	1	Indeks Kepuasan Masyarakat		Pengembangan kebijakan pemerintah	Meningkatnya kinerja SKPD		Monitoring dan Evaluasi Kepuasan Masyarakat	Fasilitasi dan pembinaan penyusunan IKM terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah	85.000	
					Penataan Pendayagunaan Aparatur	Meningkatnya kinerja satuan perangkat daerah					
				2	Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan SOP dan SPM	Program Penataan Kelatalaksanaan Organisasi	Terimplementasikannya SOP	Jumlah SKPD Yang Mengimplementasikan SOP	Fasilitasi SOP	Fasilitasi dan pembinaan penyusunan SOP terhadap OPD di lingkungan Pemerintah Daerah	80.000
		3	Kecamatan yang menjalankan Pelayanan administrasi Terpadu kecamatan (PATEN)		Program administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Meningkatnya rasio jenis perizinan dan rekomendasi yang diterbitkan	Jumlah Kecamatan Yang Menerapkan PATEN	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN	Terlaksananya inovasi pelayanan administrasi kecamatan terpadu	110.000	Terlaksananya
					Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian kebijakan KDH bidang Pemerintahan, Tantrib, Ekbang, Yanum, dan Kesra					
14	Meningkatnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	1	Rasio pegawai S2 terhadap jumlah seluruh pegawai		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kompetensi aparatur					
					Program Fasilitasi Kesejahteraan Aparatur	Terpenuhinya hak-hak kesejahteraan aparatur					
		2	Penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi/ latar pendidikan		Program Administrasi Kepegawaian	Prosentase pelayanan tepat waktu dan objek					
					Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Mewujudkan aparatur yang bersih dan berprestasi					
			Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya data layanan dan data aparatur yang up to date							
15	Meningkatnya tata pemerintahan yang baik dan bersih	1	Rata-rata capaian kinerja SKPD		Pengembangan kebijakan pemerintah	Meningkatnya kinerja SKPD					
					Penataan Pendayagunaan Aparatur	Meningkatnya kinerja satuan perangkat daerah					
		2	Penilaian RAD Pencegahan Penanggulangan Korupsi (PPK)		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH	Meningkatnya Nilai RAD PPK	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Laporan hasil pemeriksaan kasus	585.750	
					Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH	Meningkatnya Nilai RAD PPK	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Laporan hasil pemberantasan pungli	1.039.500	
		3	Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Terwujudnya SPIP Kabupaten Cirebon	Terimplementasikannya SPIP pada SKPD	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Laporan pelaksanaan SPIP OPD	189.735	
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya prosentase diunggulkannya laporan peningkatan pengembangan sistem pengawasan internal dan kebijakan KDH	Terlaksananya fungsi pengawasan dan pengendalian intern pemerintah	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Laporan hasil pemeriksaan/ monitoring	5.186.500	

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	CATATAN				
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Meningkatnya prosentase difungsikannya laporan peningkatan pengembangan sistem pengawasan internal dan kebijakan KDH.	Terlaksananya fungsi pengawasan dan pengendalian intern pemerintah	Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	Laporan hasil pemeriksaan kasus	530.000		
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Meningkatnya prosentase difungsikannya laporan peningkatan pengembangan sistem pengawasan internal dan kebijakan KDH	Terlaksananya fungsi pengawasan dan pengendalian intern pemerintah	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Laporan hasil tindak lanjut	3.106.200		
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Meningkatnya prosentase difungsikannya laporan peningkatan pengembangan sistem pengawasan internal dan kebijakan KDH	Terlaksananya fungsi pengawasan dan pengendalian intern pemerintah	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Laporan monitoring dan evaluasi Inpres No.5 tahun 2004, koordinasi dan sosialisasi penagwasan	229.000		
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Meningkatnya prosentase difungsikannya laporan peningkatan pengembangan sistem pengawasan internal dan kebijakan KDH	Terlaksananya fungsi pengawasan dan pengendalian intern pemerintah	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH : Bidang Pemerintahan	1 dok lap.review keu & 1 dok lap.evaluasi LAKIP OPD, Review RKA dan PK APIP	735.000		
		4	Peningkatan Pendapatan asli daerah		Peningkatan dan Pengembangan Pengelblaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Peningkatan dan Penerimaan 5 Jenis Pajak (Pajak BPHTB, PBB, SBW, PPJ dan PAT)	Meningkatnya Penerimaan Pajak BPHTB	1.030.000		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelblaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Penyusunan Pelaporan dan Pembinaan UPT Pajak dan Wajib Pajak	Peningkatan Kemampuan Penyusunan Pelaporan Pajak Daerah	115.971		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelblaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Penyusunan Pelaporan 5 Jenis Pajak	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	175.646		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelblaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PPJ, PAT dan SBW	Peningkatan Kemampuan Penyusunan Pelaporan Pajak Daerah	109.500		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelblaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Pemutakhiran Data Objek dan Subjek PBB Masal	Data Objek dan Subjek PBB Yang Termutakhir	2.300.000		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelblaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah (Penerimaan dan Piutang)	Tersusnya Laporan Penerimaan dan Piutang Pajak Daerah Secara Periodik	86.250		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelblaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah	Tersampainya Informasi Tentang Pajak Daerah	230.000		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelblaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Fasilitasi dan Pengaduan Pajak Daerah	Terfasilitasinya Pengaduan Permasalahan Wajib Pajak Daerah	115.000		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelblaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	Meningkatnya Tertib Administrasi Pembukuan Wajib Pajak	115.000		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelblaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Pengelolaan Piutang Pajak Daerah	Terkelolanya Piutang Pajak Daerah	172.500		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelblaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Peningkatan Kompetensi Wajib Pungut Pajak Restoran pada SKPD	Meningkatkan Pemahaman Wajib Pungut	185.000		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelblaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Penyisiran dan Penjaringan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Reklame	1. Data CWP Hasil Penjaringan 2. Data Potensi 6 Jenis Pajak	175.000		

NO	SASAPAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASAPAN	NO	PROGRAM			KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)		CATATAN
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran	Meningkatnya Pemahaman Wajib Pajak Restoran	150.000		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Pendistribusian SPTPD, SKPD dan Pemungutan 6 Jenis Pajak Daerah	Penerimaan Pajak Daerah Tepat Waktu	245.000		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Kajian Pemetaan Data Pajak Parkir, Air Tanah, PPJ dan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Tersusunnya Data Pajak Daerah Yang Valid	280.000		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Reklame	Meningkatnya Validasi Data Para Wajib Pajak Daerah	77.000		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Peningkatan Motivasi Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Reklame	Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Meningkat	500.000		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Peningkatan Pelayanan 6 Jenis Pajak Daerah	Data Jenis Pajak Daerah Yang di Verifikasi	380.000		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Penilaian Wajib Pajak Daerah dan Penyerahan Reward Kepada Wajib Pajak Teladan	Terpilihnya Wajib Pajak Teladan	400.000		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Operasi Terpadu Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Terciptanya Penerimaan Pajak Daerah	402.500		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah	Meningkatnya Pengelolaan pelayanan Pajak PBB dan BPHTB	3.140.000		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah	Pemutakhiran Basis Data PBB dan BPHTB	1.000.000		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.	Meningkatnya pendapatan daerah	Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Tersajinya Data Piutang PBB	600.000		



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp./Fax (0231) 321643
SUMBER

KP. 45611

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON**

Nomor : 890/LHR. 374 /Insp

Kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini, mencakup beberapa hal berikut :

1. Belum adanya kesesuaian jumlah Indikator Kinerja Sasaran yang disajikan dalam Perjanjian/Penetapan Kinerja dengan Laporan Kinerja.
2. Penyajian analisis capaian indikator kinerja sasaran yang bersifat komposit (lintas SKPD) belum seluruhnya memadai mengingat analisis yang dilakukan hanya terbatas pada capaian SKPD tertentu dan belum mencakup keterkaitan SKPD lainnya.
3. Indikator kinerja sasaran yang dipergunakan belum seluruhnya bersifat "SMART" dan/atau didukung dengan rumusan/formulasi yang jelas.
4. Penyajian capaian indikator kinerja sasaran pada umumnya belum membandingkan dengan standar nasional, misal Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Terhadap permasalahan di atas, manajemen Pemerintah Kabupaten Cirebon tengah berupaya menindaklanjuti secara berjenjang dengan melaksanakan serangkaian tindakan yang mengarah pada perbaikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meskipun untuk penyelesaiannya masih memerlukan waktu.

Dikeluarkan di Sumber
Pada tanggal 09 Maret 2020



**INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON**

HENDRA NIRMALA, S.Sos. M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001